

SOF 2009

**PERAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DALAM PERUBAHAN
SOSIAL POLITIK INDONESIA MELALUI PARTAI POLITIK**

(Studi Partai Keadilan Sejahtera)

TESIS

Akbar Mia

0606022763



UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL

KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN

JAKARTA

2008



**PERAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DALAM PERUBAHAN
SOSIAL POLITIK INDONESIA MELALUI PARTAI POLITIK**

(Studi Partai Keadilan Sejahtera)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

Akbar Mia

0606022763



UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL

KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN

JAKARTA

2008

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Akbar Mia

NPM : 0606022763

Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional


Konsentrasi : Kajian Stratejik Ketahanan Nasional

Judul Tesis : Peran Kepemimpinan Pemuda dalam Perubahan Sosial
Politik Indonesia Melalui Partai Politik (Studi Partai
Keadilan Sejahtera)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

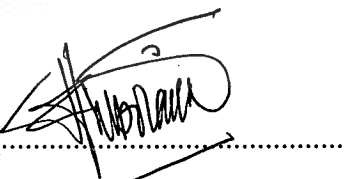
Ketua Sidang : Dr. Amy S. Rahayu, M.Si

()

Pembimbing Tesis : Dr. Puji Wahono

()

Penguji Tesis : Drs. Erlangga Masdiana, M.Si

()

Jakarta, 3 Juli 2008

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

15 Juli 2008



Akbar Mia

0606022763

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ... QS Ar Ra'd: 11

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. QS. At Taubah: 41

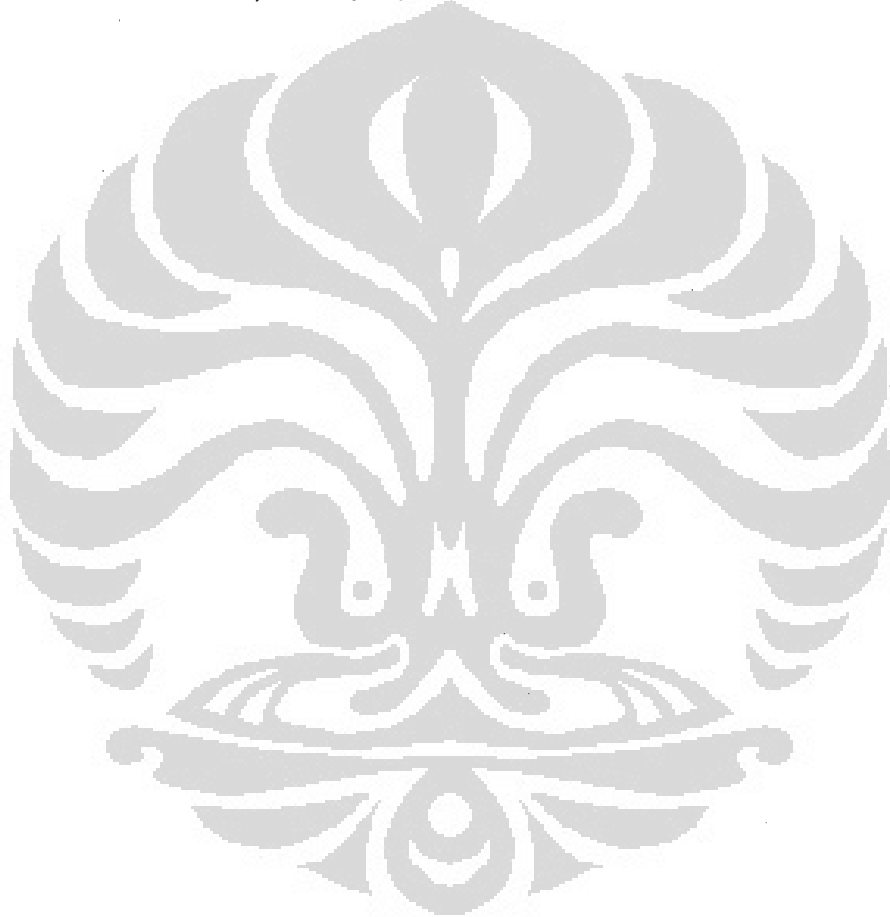
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. QS. Ali Imran: 104

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

*Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang
Telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur.
dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak
mengubah (janjinya) QS. Al Ahzab: 23*



Akulah seorang petualang yang mencari kebenaran

Akulah manusia yang mencari makna dan hakikat kemanusiaan di tengah manusia

*Akulah patriot yang berjuang menegakkan kehormatan, kebebasan, ketenangan dan kehidupan yang baik
bagi tanah air di bawah naungan Islam yang hanif*

Akulah lelaki bebas yang telah mengetahui rahasia hidup

*Akupun berseru, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb
semesta alam yang tiada sekutu bagi-Nya*

Kepada yang demikian itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri

(Al Imam Asy Syahid Hasan Al Banna).

..... dengan cinta sepenuh hati,


Kepada istriku tercinta Zainab Albaar dan buah hati kami, Maryam Jamilah,

Teriring pula cinta kepada almarhum papa, ibunda dan kakak-kakak tersayang,

Semua cinta tersebut datang setelah cinta kepada Allah,

Rasulullah SAW dan jihad fi sabilillah tentunya.....

Special thank's buat saudara-saudaraku se-iman dan se-Islam yang telah mendorong dan membantu selesainya tesis ini. Yang tiada henti-hentinya mengingatkanku untuk segera menuntaskan tugas yang satu ini, karena ia juga merupakan amanah Allah. Terutama buat Agus, Diah, Lyza, Saip, Tia dan Teh Isye, sungguh menyenangkan punya teman dan rekan seperti kalian. Special buat D'tje... Thanks for everything... Plus buat para ikhwah se-halaqahku... jalan da'wah ini masih sangat panjang, semoga Allah menguatkan 'azzam kita 'tuk selalu berada di dalamnya...



***'Kan melangkahkan kaki dengan pasti, menerobos segala onak duri
Generasi baru yang tak dinanti, tak takut dicaci, tak gentar mati
Bagai gelombang terus menerjang, menumbangkan segala kezhaliman
Dengan tulus ikhlash untuk keadilan, hingga pertiwi gapai sejahtera...
(Shoutul Haraqah, Gelombang Keadilan)***

Universitas Indonesia

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Wr Wb

Segala puji bagi Allah, Rabb pemilik semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyebarkan cahaya Islam ke dunia ini, yang membimbing manusia dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang. Sosok pribadi agung dan mulia yang padanya terdapat seluruh teladan yang baik. Satu-satunya orang yang pantas diteladani. Seorang pejuang tak kenal lelah, politikus berhati bersih, ekonom yang jujur, sekaligus ayah yang penyayang, suami yang lembut dan da'i terbaik sepanjang masa.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga karya ini dapat terselesaikan. Adalah suatu hal yang menarik memperhatikan kiprah para pemuda di negara Indonesia ini. Sebagai aset terbesar suatu bangsa, pemuda di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan pemuda-pemuda di tempat lainnya, mereka memiliki potensi dan energi yang besar. Potensi dan energi yang besar tersebut yang dibutuhkan oleh setiap bangsa untuk membangun dan melakukan perubahan terhadap masyarakatnya.

Indonesia telah mengalami perubahan kondisi sosial politik yang cukup drastis dan dramatis sejak tahun 1998, ketika dimulainya reformasi. Gerakan yang dipelopori oleh para pemuda dan mahasiswa tersebut kemudian membawa Indonesia ke dalam masa yang baru yang jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya, salah satunya adalah dimulainya era multipartai di Indonesia. Para agen pengubah bangsa, tulang punggung negara tersebut kemudian tersebar ke berbagai partai yang ada tersebut. Salah satu partai yang cukup menarik perhatian adalah Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang didirikan pada tahun 2002 ini merupakan transformasi dari Partai Keadilan yang dinyatakan tidak memenuhi *electoral threshold* setelah pemilu 1999.

Yang menarik dari partai ini adalah kebanyakan kadernya terdiri atas pemuda dan cara gerak politik yang berbeda dengan kebanyakan partai pada umumnya. Bermula dari gerakan tarbiyah yang mulai berkembang sejak tahun 1980-an, partai ini kemudian menjelma menjadi salah satu entitas yang cukup diperhitungkan. Memproklamirkan diri tidak hanya sebagai partai politik semata, tetapi juga partai dakwah, PK Sejahtera tidak hanya melakukan aktivitas politik tetapi juga berbagai aktivitas sosial. Aktivitas-aktivitas tersebut ternyata merupakan bagian dari usaha mereka mentransformasi masyarakat Indonesia menuju apa yang mereka sebut masyarakat madani.

Yang menarik untuk ditelaah adalah kiprah para pemuda di dalam partai tersebut dalam melakukan transformasi kepada masyarakat Indonesia. Sejauh mana peran para pemuda tersebut dalam melakukan transformasi sosial politik Indonesia melalui partai pilihannya, dalam hal ini PK Sejahtera. Hal inilah yang diangkat sebagai tema penelitian di dalam tesis ini. Melalui penelitian ini diharapkan akan didapat pengetahuan mengenai bagaimana peran para pemuda dalam melakukan transformasi atau perubahan sosial politik di Indonesia. Dari hal ini diharapkan nantinya dapat dirumuskan sebuah kebijakan pemberdayaan pemuda dalam melakukan perubahan sosial politik menuju Indonesia yang lebih baik.

Setelah melalui berbagai kendala, akhirnya karya ini dapat dirampungkan. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas taufiq, hidayah dan inayah-Nyalah karya ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada seluruh keluarga yang senantiasa mengingatkan, mendorong dan mendukung agar dapat segera menyelesaikan karya ini. Kepada istri tercinta Zainab Albaar, yang senantiasa mengingatkan dan mendampingi di saat-saat sulit. Juga ketika harus mengikhlaskan sebagian uang belanjanya yang tidak seberapa harus terpakai untuk biaya pengadaan atau foto kopi buku penunjang kuliah dan penyelesaian karya ini. Kepada anakku tercinta, Maryam Jamilah, yang selalu menjadi pelipur ketika lara itu datang, penyemangat ketika kejenuhan menyapa dan penghibur hati dengan seluruh tingkahnya dan tawa riangnya. Tidak lupa pula kepada ibunda Zaidar Kadir, kakanda-kakanda, Firstonmia, Bintang Mia, Rany Mia, Amstrong Mia,

Universitas Indonesia

Gusnawita dan Fajar Budi Lestari, serta keponakan-keponakanku Shasha dan Michelle.

Terima kasih juga penulis tujukan kepada Ibu Dr. Amy Rahayu selaku penanggung jawab program sekaligus sebagai Ketua Sidang Penguji Tesis. Juga kepada bapak Dr. Puji Wahono selaku pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan, dorongan bantuan dan arahan dalam penulisan tesis ini. Tidak lupa kepada Bapak Drs. Erlangga Masdiana, M. Si yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Penguji Tesis yang memberikan banyak masukan dalam penyempurnaan karya ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh amal Bapak-bapak dan Ibu dengan balasan yang lebih baik, sebagaimana yang Allah janjikan di dalam surat Ar Rahman.

Penulis juga menghaturkan rasa terima kasih kepada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan beasiswa sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan pasca sarjana strata dua ini. Terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan, khususnya angkatan 2006, serta seluruh rekan kerja di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, khususnya Bapak Dr. Muhammad Budi Setiawan, M. Eng, Bapak Drs. Zulkifli Akbar, Psi, Bapak Drs. Bosar Napitupulu, M.Si, "Ummi" Dra. Sapuroh, Bapak Purwanto, Bapak Drs. Djoko Purwanto, M.Pd, Bapak Didin Sugiarto, S.E., M.Pd, Ibu Rosih Rukminingsih, Bapak Drs. Karsono, M.Si, Bapak Budiyanto, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Juga kepada rekan-rekan seperjuangan di Markaz Da'wah, dalam menapaki jalan panjang peradaban antara Mampang-Tanjung Barat, serta rekan-rekan di DPRa Ciganjur dan di DPC Jagakarsa.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan *jazakumullah khairan jaziilan* kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu mereka yang begitu berharga untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Kepada Bang Bachtiar Firdaus, S.T., MPP., Bang Rama Pratama, S.E., dan juga kepada Ust. Dr. Hidayat Nur Wahid, yang meskipun Allah belum mentakdirkan saya untuk mewawancarai

dalam suasana yang lebih formal namun telah memberikan beberapa informasi dalam pertemuan informal yang sebenarnya “tidak disengaja”.

Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendorong dan mendukung penyelesaian karya ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Laiknya sebuah karya, tentunya tidak lepas dari kesalahan, apalagi penulis menyadari bahwa penulis hanyalah hamba Allah yang lemah dan *dhaif*. Penulis akan sangat berterima kasih apabila pembaca yang budiman berkenan memberikan kritik dan saran, sehingga penulis dapat lebih memperbaiki diri dan karya. Semoga karya ini dapat berguna bagi masyarakat luas.

“Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling banyak memberikan kontribusi bagi ummat” (Al Hadits).

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Assalamu 'Alaikum Wr Wb

Jakarta, Juli 2008



Akbar Mia

ruhbanullail@gmail.com

Universitas Indonesia

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Mia

NPM : 0606022763

Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional

Konsentrasi : Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan

Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"Peran Pemuda dalam Perubahan Sosial Politik Indonesia melalui Partai Politik – Studi Partai Keadilan Sejahtera 2002 – 2007"** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Jakarta, 15 Juli 2008

Yang Menyatakan,



Akbar Mia

ABSTRAK

Nama : Akbar Mia
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Kajian : Kajian Stratejik Kepemimpinan Nasional
Judul : Peran Kepemimpinan Pemuda dalam Perubahan Sosial Politik
Indonesia Melalui Partai Politik (Studi Partai Keadilan Sejahtera)

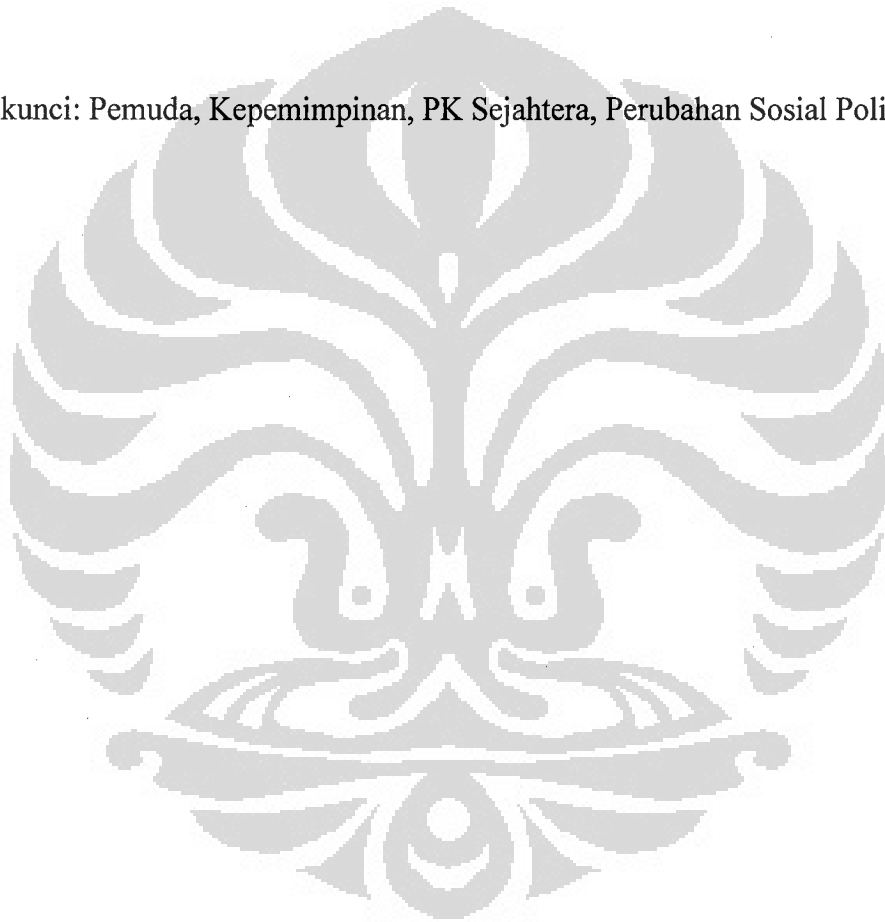
Tema mengenai pemuda dan kepemimpinan pemuda merupakan tema yang sangat menarik dan tidak pernah habis dibicarakan. Berbicara mengenai pemuda, maka tidak dapat dilepaskan dari membicarakan energi perubahan yang senantiasa menyertainya. Sejarah telah menunjukkan bahwa dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat lainnya, para pemuda adalah yang senantiasa menjadi pelopor dan penggerak perubahan suatu bangsa atau masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pemuda diharapkan menjadi penggerak perubahan yang sama, yang dapat membawa Indonesia kembali ke kegemilangannya. Gerakan reformasi tahun 1998 yang dipelopori oleh para mahasiswa dan pemuda telah membawa Indonesia pada era keterbukaan. Saat inilah dimungkinkan adanya partisipasi politik masyarakat yang lebih luas melalui partai-partai politik sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh manakah peran kepemimpinan pemuda terhadap perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia, khususnya peran melalui partai politik yang ada. Penelitian difokuskan pada Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PK Sejahtera) sebagai salah satu partai yang terdapat di Indonesia dan diketahui sebagai salah satu partai dengan kader muda terbanyak. Peran kepemimpinan pemuda dalam perubahan sosial politik Indonesia tersebut akan dijabarkan dengan terlebih dahulu mengenai bentuk kepemimpinan pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik Indonesia, pandangan PK Sejahtera mengenai pemuda dan perubahan sosial politik itu sendiri serta pandangan PK Sejahtera mengenai konsep sosial politik masa depan Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan metode etnografi, yaitu berusaha untuk memahami secara mendalam, utuh dan menyeluruh obyek yang diteliti, melalui wawancara mendalam dan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan informan yang terdiri atas mantan ketua-ketua BEM UI yang menjadi pelaku sejarah gerakan reformasi 1998 dan kemudian menjadi fungsionaris PK Sejahtera, salah satu pemuda pendiri PK Sejahtera, Ketua Kepemudaan DPP PK Sejahtera dan para narasumber diskusi mengenai PK Sejahtera yang dihadiri langsung oleh peneliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran kepemimpinan pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik Indonesia cukup besar namun belum dapat dikatakan maksimal. Dalam konteks sosial politik Indonesia, para pemuda PK Sejahtera menjadi ikon gerakan politik baru dengan gaya berpolitik yang diluar kelaziman. Terutama sekali hal ini bersumber dari ideologi yang mereka pergunakan dalam berpolitik, yaitu ideologi Islam. ketidakmaksimalan peran para pemuda ini dalam melakukan perubahan sosial politik di Indonesia, terutama karena struktur sosial masyarakat Indonesia yang masih sangat mementingkan figur. Sebagai pemuda dengan pengalaman yang dapat dikatakan masih sedikit, sebagian pemuda kader PK Sejahtera ini belum mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Masyarakat belum memandang sebelah mata terhadap para agen pengubah ini.

Kata kunci: Pemuda, Kepemimpinan, PK Sejahtera, Perubahan Sosial Politik



ABSTRACT

Name : Akbar Mia
Study Program : National Resilience Study
Concentration : Leadership Development Strategyc Study
Judul : The Role of Youth Leadership in Social Political Change in
Indonesia through Political Party (Study of Justice and Welfare
Party)

The theme about youth and leadership has always been a very interesting theme and has never stopped being discussed. Discussing about youths, one cannot separate it from the energy of change that accompany them. History has taught us that from time to time, from places to places, it was the youths that have always been the pioneer and driving force of the change occurring to a nation or society. In Indonesian context, the youths were expected to be same driving force of change; which can lead Indonesia back to her glory. The reformation movement of 1998 which was led by the students and youths has brought Indonesia into the era of openness. It is this time when people's broader political participation was made possible through their own political party.

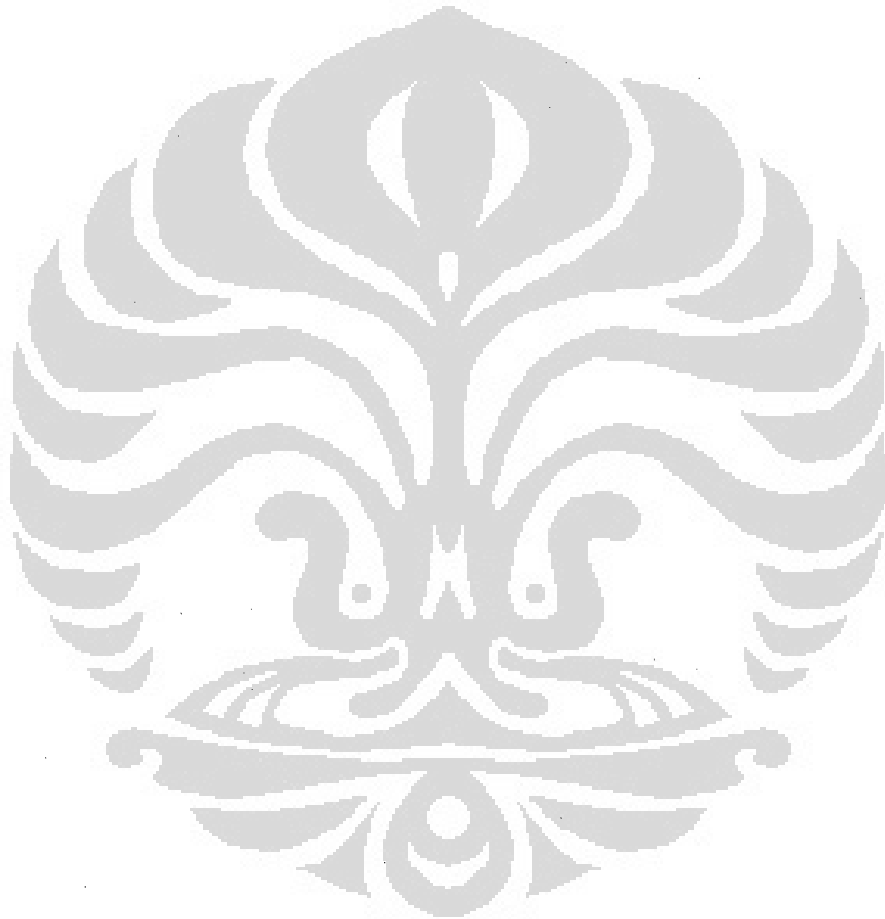
The objective of this research is to understand how far was the role of youth leadership in social political change occurring in Indonesia, especially the role made through existing political party. The research is being focused on Justice and Welfare party (called PK Sejahtera, from this point forward) as one of the parties that have the highest number of youth in its membership. The role of youth leadership in Indonesian social political change would be explained by defining first about the form of PK Sejahtera youth leadership in the social political change of Indonesia, PK Sejahtera's view about youth and the social political change itself and PK Sejahtera's views about Indonesia future social political concepts.

To answer the problems in this qualitative research, the writer is using ethnographic method, which tried to deeply, fully and comprehensively understand the object being researched, through interview and related documents in terms of this research, while the informants consisted of ex-BEM UI's chairmans which was part of the reformation movement 1998 and then became active member of PK Sejahtera, one of the youths that was one of PK Sejahtera founder and speakers from few discussion about PK Sejahtera. The data collected, then being analyzed so that conclusion (s) can be taken as the answer (s) of the problems being questioned.

The result of this research shows that although the role of PK Sejahtera youth leadership is quite big, but still can not be categorized as maximum. In

Indonesia socio political context, the PK Sejahtera youths have become new political movement with their unregular political conduct. This thing mostly based from their ideology which they used in politic, that is Islamic ideology. The unmaximized role of these youths in conducting social political change in Indonesia, mainly because the Indonesian society social struktur that stil consider highy on the figure. As youths with very little experience, part of these PK Sejahtera youths haven't got their place in the society yet. The society hasn't yet see these agents of change for their ability rather for their age.

Keywords: Youth, Leadership, PK Sejahtera, Social Political Change



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KALAM ILAHI	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Permasalahan	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Signifikansi Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB 2 KERANGKA TEORI	
2.1. Teori Kepemimpinan	11
2.2. Teori Perubahan Sosial	14

2.3.	Teori Sosialisasi Politik -----	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1.	Ruang Lingkup Penelitian -----	20
3.1.1.	Batasan Objek Penelitian -----	20
3.1.2.	Jenis Data -----	21
3.2.	Informan Penelitian -----	23
3.3.	Teknik Pengumpulan Data -----	23
3.4.	Teknik Analisa Data -----	24
BAB IV PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PEMUDA		
4.1.	Sejarah Partai Keadilan Sejahtera -----	26
4.1.1.	Peta Sosial Politik Indonesia Sebelum Berdirinya Partai Keadilan (Sejahtera) -----	26
4.1.2.	Gerakan Tarbiyah: Cikal Bakal Partai Keadilan Sejahtera ----	35
4.1.3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera -----	39
4.1.3.1.	Faktor Politik -----	40
4.1.3.2.	Faktor Sosial dan Ekonomi -----	41
4.1.3.3.	Faktor Kultural dan Pendidikan -----	44
4.2.	Konsep dan Gerakan Partai Keadilan Sejahtera -----	46
4.2.1.	Dakwah Pergerakan Partai Keadilan Sejahtera -----	46
4.2.2.	Jalan Dakwah dan Keteguhan Hati dalam Pandangan Partai Keadilan Sejahtera -----	50
4.2.3.	Strategi Dakwah Partai Keadilan Sejahtera -----	53

4.3.	Prinsip Politik Partai Keadilan Sejahtera -----	56
4.3.1.	Konsepsi Politik Partai Keadilan Sejahtera -----	59
4.3.2.	Aktivitas Politik Partai Keadilan Sejahtera -----	61
4.4.	Pemuda, Pemimpin dan Kepemimpinan Pemuda dalam Partai Keadilan Sejahtera-----	65
4.4.1.	Pemuda: <i>Core Business</i> Partai Keadilan Sejahtera -----	65
4.4.2.	Posisi Pemuda dalam Gerakan dan Aktivitas Partai Keadilan Sejahtera -----	69
4.4.3.	Gerak Pemuda Partai Keadilan Sejahtera -----	70
BAB V PEMUDA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PERUBAHAN SOSIAL POLITIK DI INDONESIA		
5.1.	Mengenai Partai Keadilan Sejahtera dan Perubahan Sosial – Politik di Indonesia -----	75
5.2.	Metode Perubahan Partai Keadilan Sejahtera -----	78
5.3.	Partai Keadilan Sejahtera dan Kepemimpinan Pemuda -----	82
5.3.1.	Partai Keadilan Sejahtera Memandang Kepemimpinan Indonesia -----	82
5.3.2.	Kepemimpinan Pemuda dalam Partai Keadilan Sejahtera ----	84
5.4.	Pemuda Partai Keadilan Sejahtera dan Perubahan Sosial Politik Indonesia -----	88
5.4.1.	Energi Perubahan Pemuda Partai Keadilan Sejahtera -----	92
5.4.2.	Peran Sosial Politik Pemuda Partai Keadilan Sejahtera Pada Reformasi 1998 dan Setelahnnya -----	96

BAB VI PENUTUP

6.1.	Kesimpulan -----	106
6.2.	Rekomendasi -----	109
	DAFTAR PUSTAKA -----	112

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera

Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera

Visi – Misi Partai Keadilan Sejahtera

Paltform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera

Panduan Wawancara

Transkrip-transkrip wawancara

Biografi Tokoh-tokoh Partai Keadilan Sejahtera

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tahun 1998 merupakan salah satu masa yang sangat penting dalam sejarah sosial politik Indonesia. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia diperintah oleh pemimpin – pemimpin yang relatif otoriter, namun keadaan mulai berubah pada tahun 1998. Tahun 1998 menandai berubahnya sistem politik Indonesia menuju arah yang lebih demokratis, ditandai dengan adanya gerakan reformasi.

Setelah beberapa lama menderita kesulitan ekonomi akibat badai krisis ekonomi yang menerpa dunia, rakyat Indonesia bangkit untuk meminta diadakannya perubahan. Krisis ekonomi telah mengakibatkan kebanyakan rakyat Indonesia terpuruk. Keterpurukan ini ternyata membangkitkan militansi sebagian diantara mereka, mungkin karena kesulitan ekonomi yang mendera membuat mereka tidak lagi memikirkan tekanan dari rejim yang akan mereka terima apabila mereka menuntut perubahan. Pada masa itu penolakan terhadap kata – kata penguasa identik dengan perlawanan terhadap Negara, apabila hal ini dilakukan maka ancaman penangkapan atau hukuman penjara dengan tuduhan “subversif” dapat dialami oleh siapapun dan kapan pun (Haris, 1999).

Meskipun krisis ekonomi hanyalah merupakan satu faktor saja dari reformasi yang kemudian terjadi di Indonesia, peranannya cukup penting sebagai pemicu bangkitnya semangat reformasi. Bangkitnya kesadaran akibat kemiskinan dan keterpurukan yang terus menerus, berujung pada desakan dan dorongan adanya perubahan pada bidang politik dan pemerintahan Indonesia. Desakan dan dorongan ini dimotori oleh kaum intelektual, para mahasiswa.

Puncak dari desakan dan dorongan ini terjadi pada 13 – 15 Mei 1998 ketika terjadi kerusuhan yang meluas hingga di hampir setiap kota besar di Indonesia. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto (saat itu) mengumumkan pengunduran dirinya dan kemudian melimpahkan kekuasaan kepada Profesor Baharuddin Jusuf Habibie yang saat itu memegang jabatan Wakil Presiden. Kekuasaan Habibie sendiri tidak berlangsung lama. Habibie dianggap sebagai murid dan kroni Soeharto, sehingga desakan untuk melakukan reformasi tetap mengemuka. Untuk itulah kemudian diselenggarakanlah Pemilu pada tahun 1999. Angin segar keterbukaan yang dibawa gerakan reformasi, membuat keran – keran aspirasi yang tadinya tersumbat menjadi mengalir lancar. Ramai – ramai berbagai pihak mendirikan partai sebagai upaya menjadi corong suara rakyat di parlemen, meski tidak dinafikan terdapat pula sebagian pihak yang menjadikan hal ini sebagai usaha untuk mendapat kekayaan. Tercatat 48 (empat puluh delapan) partai politik mengikuti Pemilu 1999, salah satunya adalah Partai Keadilan.

Partai ini didirikan oleh para pemuda aktivis gerakan, yang dikenal sebagai gerakan tarbiyah, yang memiliki basis massa dari kampus – kampus dan sekolah. Termasuk diantara para pemuda tersebut, aktivis kampus yang turut serta dalam gerakan mahasiswa untuk melengserkan Soeharto pada tahun 1998. Sebagai partai baru, Partai Keadilan (PK) hanya mampu meraih suara 1,3% pada pemilu 1999. Jumlah suara yang tidak mencukupi untuk melewati batas *Electoral Threshold* (ET) yaitu 3%. Namun demikian, capaian suara tersebut dinilai cukup fenomenal bagi sebuah partai yang baru didirikan satu tahun sebelum pemilu, dan terdiri atas orang – orang yang baru berkecimpung dalam dunia politik praktis Indonesia.

Kegagalannya mencapai batas ET, membuatnya tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya pada tahun 2004. Para pengurusnya kemudian mendirikan Partai Keadilan Sejahtera, sebagai wadah baru berpolitik. Partai Keadilan kemudian meleburkan diri dengan Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2000. Dengan wadah baru tersebut, mereka kemudian kembali berusaha meraih kepercayaan rakyat dalam Pemilu 2004. Hasilnya sungguh

Universitas Indonesia

mencengangkan, PK Sejahtera mampu meraih suara 7% pada Pemilu 2004 tersebut. Meskipun banyak pengamat ataupun saingannya dari partai yang berbeda meramalkan suara PK Sejahtera akan turun dibandingkan raihan suara PK tahun 1999, ternyata mereka mampu membuktikan sebaliknya. Sebagai partai baru, yang didirikan oleh pemuda – pemuda yang dapat dikatakan awam di dalam kancah politik nasional Indonesia, perolehan tersebut memang dapat dikatakan cukup mencengangkan. Mencengangkan apabila dibandingkan dengan sesama partai – partai politik baru yang rata – rata hanya mendapatkan perolehan suara yang sangat kecil dan bahkan tidak dapat memenuhi *electoral threshold*. Cukup fantastis mengingat Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai baru yang belum memiliki jaringan sekuat partai – partai politik lama dengan pengalaman yang mendalam mengenai dunia perpolitikan nasional Indonesia dan segala seluk beluknya. Jumlah suara yang didapatnya pada Pemilu 2004, memungkinkan PK Sejahtera untuk menempatkan 45 orang wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, setelah sebelumnya menempatkan 7 orang wakilnya pada pemilu 1999 melalui Partai Keadilan. Saat ini jumlah wakil Partai Keadilan Sejahtera yang duduk di DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II di seluruh Indonesia berjumlah 1112 orang. Jumlah ini belum termasuk berbagai kepala daerah di seluruh Indonesia yang didukung PK Sejahtera, baik secara independen ataupun berkoalisi dengan partai lainnya.

Pada perjalanannya kemudian, partai yang dimotori oleh kaum muda ini kemudian mampu merebut banyak perhatian dengan gerakan – gerakannya yang kadang diluar kewajaran sebagai sebuah partai politik. Berbagai julukan diberikan pada partai ini, mulai dari Partai Kantong Sendiri, Partai Bakti Sosial, hingga “Massa Bening di Dunia yang Bergetah”. Partai ini didirikan oleh para pemuda yang sebelumnya merupakan aktivis – aktivis pengajian dengan basis massa tersebar di berbagai kampus dan sekolah. Sebelum berkiprah di dunia politik, mereka merupakan sosok – sosok yang sangat peduli dengan masyarakat, terlihat dengan banyaknya kegiatan sosial seperti bakti sosial, pengobatan gratis dan lain sebagainya, melalui berbagai yayasan

yang mereka dirikan. Sebagian besar dari mereka juga merupakan sosok – sosok yang dikenal cukup alim, yang cukup rajin menghadiri berbagai pengajian yang mereka bentuk.

Hingga kini PK Sejahtera terus berkiprah sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia yang cukup diperhitungkan oleh partai – partai politik lainnya, bahkan oleh sesama partai politik yang telah lama berkiprah di dunia politik nasional. Sebagai salah satu partai politik yang cukup berhasil pada pemilu 2004 dan sebagai salah satu partai pendukung pemerintah yang sedang berkuasa, peran dan posisi PK Sejahtera tidaklah dapat dipandang enteng. Terlebih lagi dengan banyaknya kader pemuda yang dimilikinya yang tentunya memiliki energi untuk berkiprah yang relatif lebih kuat dan lebih lama dibandingkan senior – seniornya yang telah berumur. Ditambah dengan kekuatan idealisme pemuda yang dimilikinya.

Tanpa kehadiran Partai Keadilan Sejahtera, perjalanan sosial politik Indonesia akan sangat berbeda dibandingkan saat ini. Sebagai salah satu partai politik yang turut mewarnai dunia sosial – politik Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera tidak dapat dipandang sebelah mata. Peningkatan perolehan suara yang sangat signifikan yang didapatnya menunjukkan posisinya dalam kancah perpolitikan nasional.

1.2. Rumusan Permasalahan

Sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan, pemuda merupakan rahasia kekuatannya. Hal ini dikemukakan kurang lebih 50 tahun yang lalu oleh Imam Syahid Hasan Al Banna, pendiri dan pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir, salah satu gerakan Islam yang dianggap sebagai salah satu gerakan islam terbesar abad ini. Al Banna sendiri mendirikan Ikhwanul Muslimin pada usia yang belum genap 25 tahun. Almarhum Soekarno menyatakannya dalam kalimat “*berikan padaku sepuluh pemuda, akan ku guncang dunia*”.

Kenyataan ini dapat kita saksikan di hampir seluruh permukaan bumi. Hampir semua perubahan besar yang terjadi di dunia ini terjadi karena adanya campur tangan pemuda di dalamnya. Di Indonesia sendiri sejarah mencatat para penggerak reformasi tahun 1998 adalah para mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Sejarah Indonesia kemudian mencatat bahwa para pemuda tersebut kemudian menyebar ke berbagai lembaga di Indonesia untuk memberikan sumbangsih mereka bagi negara ini. Sebagian dari para pemuda tersebut kemudian bergabung dengan Partai Keadilan yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2002 karena tidak mampu memenuhi persyaratan *electoral threshold*.

Keadaan ini menarik untuk ditelaah, mengingat Partai Keadilan Sejahtera dianggap sebagai salah satu partai yang fenomenal di Indonesia. Capaian suara yang diraihinya pada tahun 1997 dianggap cukup mengejutkan mengingat partai ini terdiri atas orang – orang yang dapat disebut masih awam dalam percaturan politik Indonesia. Meskipun demikian, kefenomenalan tersebut belum cukup untuk memposisikan Partai Keadilan menjadi partai pemilu berikutnya, karena capaian suara tersebut tidak cukup untuk melampaui hambatan *electoral threshold* yang mensyaratkan capaian 3% suara secara nasional. Untuk itu para kader partai ini mendirikan Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2002. Partai Keadilan kemudian meleburkan diri ke dalam Partai Keadilan Sejahtera.

Pemilu 2004 mencatat perolehan suara signifikan yang didapat Partai Keadilan Sejahtera. Sebuah capaian yang kembali dianggap cukup fenomenal, lagi – lagi karena mengingat para penggerak partai tersebut merupakan sosok – sosok yang masih baru di kancah politik Indonesia. Banyak yang menyatakan bahwa diantara faktor – faktor yang membuat PK Sejahtera berhasil meraih suara yang cukup signifikan tersebut adalah kedekatannya dengan rakyat. PK Sejahtera dikenal sebagai partai yang sering mengadakan bakti sosial dan pengobatan murah atau gratis bagi masyarakat. Selain itu anggota dewan dari PK Sejahtera (dahulu masih dari Partai Keadilan) di berbagai daerah dikenal sebagai anggota dewan yang cukup

Universitas Indonesia

kritis dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Misalnya dengan diungkapkannya permasalahan dana *kadeudeuh* anggota DPRD provinsi Jawa Barat, dan lain sebagainya.

Tulisan ini akan mengulas mengenai kiprah para pemuda yang tergabung di dalam Partai Keadilan Sejahtera. Kiprah mereka mau tidak mau tentunya telah mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini. Untuk lebih memfokuskan penulisan, maka hanya dua aspek yang akan diteliti dalam tulisan ini, yaitu aspek sosial dan politik. Tulisan ini akan mengulas mengenai peran yang dimainkan oleh para pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia, utamanya sejak masa reformasi. Untuk keutuhan ulasan, maka akan disajikan pula kondisi sosial politik Indonesia sebelum masa reformasi, sehingga bisa di dapat gambaran yang relatif cukup menyeluruh mengenai peran para pemuda tersebut dalam perubahan – perubahan sosial dan politik yang terjadi di negara ini.

Masyarakat Indonesia secara umum telah menstigma masyarakat politik Indonesia sebagai kelompok yang korup dan hanya memperjuangkan kepentingan diri atau kelompoknya sendiri saja. Kehadiran para pemuda aktivis Partai Keadilan Sejahtera seakan melawan semua stigma masyarakat tersebut. Perilaku politik mereka yang secara umum berlawanan dengan kenyataan umum yang ada seakan merupakan jawaban apatisme masyarakat. Jargon ilmu politik dimana disebutkan “politik tidak lah kotor, namun sebagian pelakunyalah yang kotor”, bagaikan menemukan realitas dalam diri para aktivis PK Sejahtera. Mereka menunjukkan bagaimana berperilaku politik yang santun dan bersih.

Bermodalkan idealisme yang tinggi, para pemuda aktivis PK Sejahtera turut berkecimpung dalam dunia sosial politik Indonesia. Gerak politiknya kemudian menarik perhatian dan simpati banyak pihak. Di saat banyak partai politik yang kehilangan kepercayaan masyarakat, para pemuda aktivis PK Sejahtera justru mulai merebut banyak kepercayaan. Hal inilah yang menarik untuk di telaah. PK Sejahtera dengan para pemuda sebagai penggerak

Universitas Indonesia

utamanya bagaikan menjadi fenomena, yang bergerak melawan arus sosial politik konvensional yang berlaku di Indonesia.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dalam rangka membuktikan ada atau tidaknya peran yang diberikan oleh kepemimpinan pemuda di dalam Partai Keadilan Sejahtera dalam perubahan sosial politik di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijelaskan, antara lain adalah:

1. Bagaimanakah konsep, posisi dan gerakan pemuda menurut Partai Keadilan Sejahtera?
2. Konsep perubahan sosial politik seperti apakah yang dicita-citakan PK Sejahtera terhadap Indonesia?
3. Sejauh apa peran kepemimpinan pemuda Partai Keadilan Sejahtera dalam proses perubahan sosial politik di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui paradigma politik pemuda Partai Keadilan Sejahtera dalam konteks perpolitikan Indonesia.
2. Untuk mengetahui seperti apakah konsep sosial politik yang diusung PK Sejahtera, dalam usahanya melakukan perubahan sosial politik di Indonesia.
3. Untuk mengetahui peran kepemimpinan pemuda Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan sosial – politik Indonesia, dan sejauh mana peran yang diberikan.

1.5. Signifikansi Penelitian

Sejauh yang telah diamati oleh penulis, penulis belum mendapatkan adanya penelitian terdahulu dengan topik yang sama dengan topik yang akan diteliti oleh penulis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa topik yang akan diteliti merupakan topik yang baru. Topik ini merupakan topik yang cukup penting karena menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Sejak merdeka pada tahun 1945, dunia perpolitikan Indonesia didominasi oleh golongan yang *notabene* tidak lagi muda, terutama sejak berkuasanya Soeharto pada 1966.

Sejak saat itu dunia perpolitikan di Indonesia semakin didominasi oleh golongan tua. Hal ini dapat dilihat pada ketiga partai politik (Partai Persatuan Pembangunan, Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia) peserta pemilu sejak 1966 hingga dimulainya gerakan reformasi pada 1998. Sejak 1998, terlihat adanya perubahan konstelasi politik, dimana kaum muda mulai memasuki dunia perpolitikan Indonesia. Tercatat nama – nama seperti Rama Pratama (mantan ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia), Budiman Sujatmiko, Fitra Asril dan lain sebagainya yang kemudian memasuki partai pilihannya masing – masing.

Penelitian ini akan memberikan sumbangan berharga berupa tulisan mengenai kiprah kaum muda tersebut di dalam partai politik, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera, dan sejauh mana idealisme pemuda mampu memberikan sumbangan terhadap perjalanan partai politik sebagai salah satu entitas politik di Indonesia. Dalam hal ini, akan terlihat sejauh mana para pemuda yang terdapat di dalam Partai Keadilan Sejahtera mampu mewarnai dan membawa perjalanan partai tersebut menuju visi dan misinya sebagai agen pengubah bangsa dengan idealisme yang masih belum tercemar.

Apabila tujuan penelitian di atas dapat tercapai, maka signifikansi penelitian ini adalah:

Universitas Indonesia

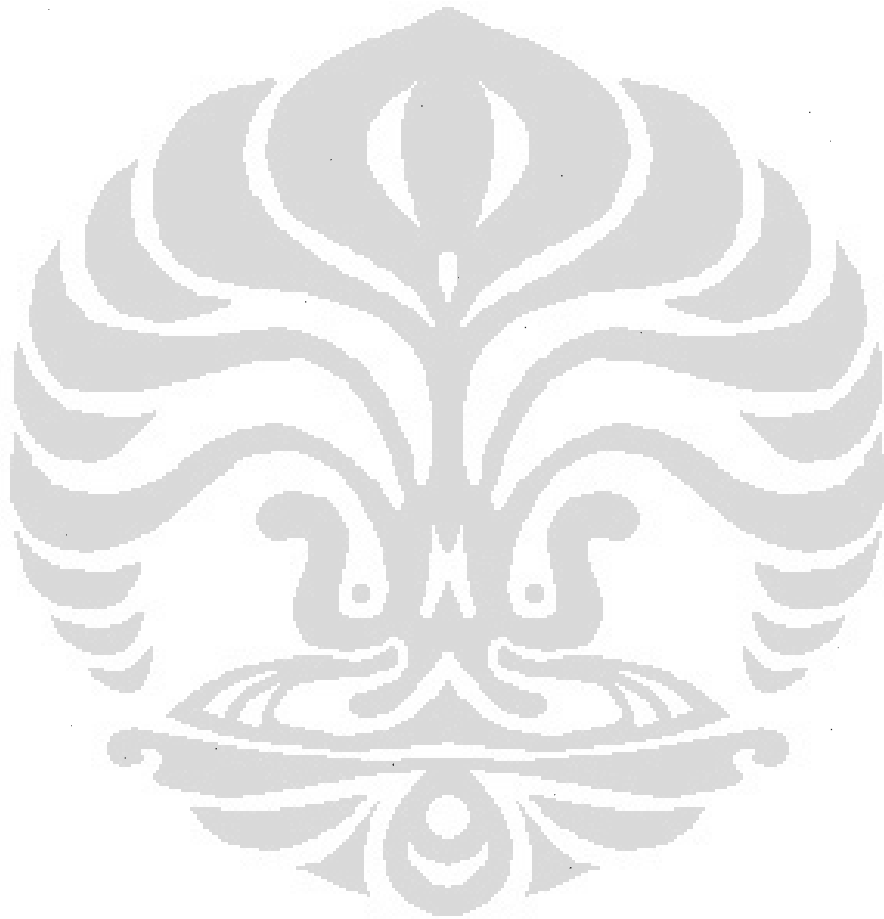
1. Sebagai sumbangan bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pemikiran kepemimpinan pemuda, sosial – politik dan relasinya dengan dunia kontemporer dewasa ini.
2. Sebagai referensi historis – analitis terhadap pemikiran dan perilaku politik pemuda di dalam partai politik di Indonesia
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memahami dan mengamati realitas sosial politik yang dialami dan diperjuangkan pemuda di Indonesia.
4. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memahami kepemimpinan pemuda di dalam partai politik sebagai salah satu wadah aktualisasi diri di dalam masyarakat.

1.6. Sistematika Penulisan

- BAB 1 Berisikan tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB 2 Bab ini berisikan mengenai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori kepemimpinan, teori sosiologi, teori perubahan dan teori sosiologi politik.
- BAB 3 Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini.
- BAB 4 Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi umum konstelasi sosial politik Indonesia terutama setelah dimulainya gerakan reformasi 1998, termasuk di dalamnya latar belakang berdirinya PK Sejahtera dan konsep gerakan PK Sejahtera. Selain itu akan dibahas pula pandangan PK Sejahtera mengenai pemuda dan kepemimpinan pemuda.
- BAB 5 Sebelum dilakukan interpretasi data, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai bentuk kepemimpinan pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik Indonesia, pandangan PK Sejahtera mengenai pemuda dan perubahan sosial politik itu sendiri serta pandangan PK

Sejahtera mengenai konsep sosial politik masa depan Indonesia untuk mengetahui sejauh apa peran kepemimpinan para pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik Indonesia dan mengapa mereka mampu memberikan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut.

BAB 6 Berisikan kesimpulan penelitian ini



Universitas Indonesia

BAB 2

KERANGKA TEORI

Dalam melakukan analisa dan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan, peneliti akan menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisa untuk melakukan analisa.

2.1. Teori Kepemimpinan

Ukuran sejati dari kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Hal ini dikemukakan oleh John C Maxwell dalam bukunya 21 Hukum Kepemimpinan Sejati (2001). Berbicara mengenai kepemimpinan dalam banyak hal memang berarti berbicara mengenai pengaruh seseorang atas orang lainnya.

Kepemimpinan telah didefinisikan dengan berbagai cara selama bertahun-tahun. Kepemimpinan sendiri seringkali didefinisikan sebagai pengaruh seseorang atas orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kebanyakan definisi mencerminkan asumsi bahwa “kepemimpinan menyangkut sebuah proses mempengaruhi sosial dengan pengaruh yang disengaja digunakan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan dalam sebuah kelompok atau organisasi” (Yukl, 1998).

Banyak pelajaran mengenai kepemimpinan menunjukkan bahwa pemimpin bukanlah hanya mengenai sebuah jabatan atau posisi formal, melainkan juga posisi informal. Seseorang bisa saja memegang posisi sebagai ketua umum dalam suatu organisasi, namun bisa jadi pemimpin yang sebenarnya bukanlah ketua umum tersebut, namun orang lain yang lebih “dipandang” oleh para anggota organisasi tersebut. Seringkali pemimpin bukanlah mengenai suatu jabatan, namun mengenai pengakuan dari orang lain, dari para pengikutnya, dan hal ini terlihat dari pengaruh pemimpin tersebut atas pengikutnya.

Robert W. Terry mengatakan bahwa pengertian kepemimpinan tidak dapat dipersempit hanya kepada teknik, tindakan-tindakan cepat ataupun heroisme. Kepemimpinan harus menjadi pandangan hidup, menjadi keyakinan, sebagai suatu cara menjalani hidup. Dibutuhkan suatu komitmen seumur hidup agar dapat tumbuh untuk memenuhi kebutuhan manusia (Terry, 1993). Kepemimpinan bukanlah suatu hal yang dapat dipelajari hanya melalui pendidikan informal, namun juga harus dipelajari melalui pengalaman yang lama. Berdasarkan pengalaman, kita mengetahui bahwa terdapat suatu hal yang tidak dapat dipelajari melalui pendidikan formal, meskipun pendidikan tersebut mempelajari kepemimpinan. Hal tersebut yaitu “penilaian yang baik” (Terry, 1993). Pengalaman selama bertahun-tahunlah yang dapat membentuk seseorang sehingga dapat memberikan penilaian yang baik atas sesuatu hal. Berdasarkan penilaian yang baik tersebut, barulah seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang baik dan benar.

Sejarah juga memperlihatkan bahwa sebagian dari para pemimpin besar yang menyejarah memiliki kompetensi kepemimpinan tersebut sejak lahir. Sejarah telah mencatat nama-nama seperti Muhammad SAW, Jenghis Khan, Napoleon Bonaparte, Alexander Agung, Julius Caesar dan lain sebagainya. Terlepas kontroversi yang dibawa Jenghis Khan, karena kebengisannya, atau Julius Caesar, karena ambisi besarnya, kita harus mengakui bahwa mereka semua merupakan pemimpin yang memiliki kompetensi sejak dari lahir, kepemimpinan mereka tidak diragukan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka mengarahkan para pengikutnya. Sejarah mencatat para pemimpin tersebut memiliki pengikut yang berjumlah sangat besar, dan mereka mampu mengarahkan dan mengerahkan pengikut-pengikut mereka untuk mencapai apa yang diyakini sebagai tujuan bersama mereka. Hal ini mungkin sejalan dengan apa yang sekarang disebut sebagai *personal power*, yaitu kewibawaan seorang pemimpin yang menimbulkan kesadaran bawahan untuk menerima kewibawaannya karena dirasakan benar dan baik, sehingga bawahan merasa bersatu dengan atasan (*committed*) (Wahjosumidjo, 1987).

Praktek kepemimpinan adalah hal-hal yang dilakukan oleh seseorang ketika memimpin orang lain. Sedangkan praktek kepemimpinan teladan adalah apa yang dilakukan oleh orang ketika mereka berada pada kondisi terbaik mereka pada saat memimpin orang lain. Pengalaman-pengalaman inilah yang dipakai untuk menetapkan *standards of excellence* dari kepemimpinan mereka” (Kouzes & Posner, 2004)

Kouzes dan Posner meneliti tentang proses dinamis dari kepemimpinan dan menemukan bahwa pada saat melakukan hal-hal yang luar biasa dalam organisasi, pemimpin menggunakan lima praktek kepemimpinan teladan dan sepuluh komitmen, yaitu:

PRAKTEK KEPEMIMPINAN	KOMITMEN
Mencontohkan caranya (<i>Modelling the way</i>)	1. Temukan suara hati anda dengan memperjelas nilai-nilai pribadi anda 2. Beri contoh dengan menyelaraskan tindakan dengan nilai-nilai bersama
Menginspirasi visi bersama (<i>Inspiring a share vision</i>)	3. Lihat masa depan dengan membayangkan peluang-peluang yang menggairahkan dan luhur 4. Kumpulkan orang ke dalam visi bersama dengan memperlihatkan aspirasi bersama
Menantang proses (<i>Challenging the process</i>)	5. Cari peluang melalui pencarian cara-cara inovatif untuk berubah, tumbuh dan menjadi lebih baik 6. Lakukan eksperimen dan ambil resiko dengan terus menerus menghasilkan kemenangan-kemenangan kecil dan belajar dari kesalahan
Memungkinkan orang lain bertindak (<i>Enabling others to act</i>)	7. Pupuk kolaborasi dengan mempromosikan tujuan bersama dan membangun kepercayaan 8. Perkuat orang lain dengan membagi kekuasaan dan keleluasaan
Menyemangati jiwa (<i>Encouraging the heart</i>)	9. Akui kontribusi dengan menunjukkan penghargaan bagi

Universitas Indonesia

	<p>pencapaian individu</p> <p>10. Rayakan nilai-nilai dan kemenangan dengan menyemangati komunitas</p>
--	--

Lima Praktek Kepemimpinan Teladan dan Komitmen

Schmitz (2004) menemukan dalam penelitiannya hubungan yang signifikan antara lima praktek kepemimpinan di atas dengan empat kriteria kompetensi emosional, yaitu kesadaran pribadi, keterampilan sosial, kesadaran sosial dan manajemen diri.

Sedangkan Schullo (2003) meneliti bahwa praktek kepemimpinan “memungkinkan orang lain bertindak” adalah yang paling sering dilakukan dalam perilaku kepemimpinan diikuti dengan memberikan contoh, menyemangati, menantang proses dan memberikan inspirasi visi.

2.2. Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan ciri dari semua masyarakat, baik perubahan itu berlangsung cepat ataupun lambat, ataupun pada masyarakat pra sejarah ataupun masyarakat modern (Gillin & Gillin, 1942). Peneliti sendiri sependapat dengan pandangan bahwa perubahan itu adalah abadi dalam setiap masyarakat (M.J. Herskovits, 1945). Selama masih ada kehidupan sosial, perubahan tidak dapat dihindari. Rogers sendiri berpendapat bahwa perubahan sosial adalah suatu proses dimana terjadi perubahan pada struktur dan fungsi dari satu sistem sosial (Rogers, 1969). Diantara perubahan sosial tersebut yaitu perubahan institusi sosial dan stratifikasi sosial.

Institusi sosial dapat berubah karena terjadinya perubahan pada institusi lain atau karena terjadinya gerakan sosial. Stratifikasi sosial pun dapat berubah melalui mobilitas sosial (Sunarto, 2000). Beberapa teori perubahan sosial, seperti teori Karl Marx mengenai perubahan sistem feodal menjadi kapitalis dan kemudian sosialis, teori Max Weber mengenai munculnya kapitalisme dalam masyarakat feodal dan teori Emile Durkheim

Universitas Indonesia

mengenai perubahan solidaritas mekanik menjadi organik telah banyak membahas tentang tahapan – tahapan perubahan ini.

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, pada tulisan ini akan digunakan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Neil J. Smelser (www.uny.ac.id). Menurut Smelser terdapat empat faktor yang menentukan perubahan sosial, yaitu:

1. Keadaan sosial untuk berubah,
2. Dorongan untuk berubah,
3. Mobilisasi untuk berubah,
4. Pelaksanaan kontrol sosial.

Dalam memandang perubahan sosial, terdapat beberapa unsur penting teori perubahan sosial, yaitu:

- Berkaitan dengan jumlah populasi dan satu unsur sosial, seperti proporsi dalam golongan penduduk,
- Tingkat perilaku penduduk dalam jangka waktu tertentu,
- Struktur Sosial atau pola-pola interaksi antar individu,
- Pola-pola kebudayaan seperti nilai dalam masyarakat

2.3. Teori Sosialisasi Politik

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Sampai saat ini, peran tersebut masih sangat jarang dijalankan oleh partai-partai politik di Indonesia. satu dari sedikit partai yang menjalankan fungsi ini adalah PK Sejahtera. Melalui para kader pemudanya, PK Sejahtera memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dalam bentuk bagaimana politik itu seharusnya dijalankan. Dalam hal ini,

para pemuda tersebut menjalankan fungsi sosialisasi politik, yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap partisipasi politik masyarakat.

Sosialisasi politik selain dimaksudkan sebagai sebuah proses penyerapan nilai-nilai politik dari individu-individu dalam masyarakat juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan mewariskan nilai-nilai dan sikap-sikap politik kepada seluruh masyarakat.

Gabriel A. Almond menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik. Disamping itu ia juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik pada generasi berikutnya (Haryanto, 1982).

Berkaitan dengan proses sosialisasi politik tersebut Almond menyatakan pula bahwa terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, sosialisasi tersebut berjalan terus menerus selama hidup manusia. Kedua, bahwa sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan sosialisasi bersifat langsung adalah jika melibatkan komunikasi informal, nilai-nilai atau perasaan mengenai politik secara eksplisit, seperti yang didapat melalui pelajaran di sekolah. Sedangkan sosialisasi politik yang bersifat tidak langsung didapat dimasa kanak-kanak yang masih dalam taraf pembentukan sikap dan tindakan mereka.

Disamping itu Mary G. Kweit dan Robert W. Kweit menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses melalui mana individu belajar tentang politik yang pada akhirnya membentuk menjadi orientasi politik. selain itu bertujuan untuk menggalang stabilitas suatu sistem politik. dengan demikian proses sosialisasi politik membawa misi untuk membentuk orientasi politik demi terciptanya stabilitas (Kweit & Kweit, 1986).

Sejalan dengan konsep sosialisasi politik diatas maka Rush dan Althof berpendapat bahwa: sosialisasi politik adalah suatu proses dengan mana individu mampu mengenal sistem politiknya dan menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Rush & Althof, 2001).

Lebih lanjut Rush dan Althof mengemukakan bahwa sebuah proses sosialisasi politik akan melalui beberapa tahap, yaitu dari sejak awal masa kanak-kanak, remaja dan dewasa (Rush & Althof, 2001). Menurut mereka isi atau unsur-unsur yang disosialisasikan ini meliputi pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik. ketiga unsur ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya pengetahuan politik seseorang dapat mendahului pembentukan nilai-nilai dan sikap-sikap politik, begitu pula sebaliknya pengetahuan dapat mendukung suatu nilai khusus atau sikap setelah nilai dan sikap terbentuk. Sikap berkaitan erat dengan nilai-nilai, dimana kepercayaan-kepercayaan individu dapat memainkan peranan yang penting dalam penentuan reaksi terhadap rangsangan khusus, akan tetapi sikap-sikap tersebut dapat mendahului nilai-nilai. Juga mungkin akan terdapat proses umpan balik, dengan mana sikap-sikap atau lebih khusus lagi konsekuensi-konsekuensi dari sikap-sikap akan mempengaruhi nilai-nilai seseorang (Rush & Althof, 2001). Sikap-sikap politik sebagai unsur dari proses sosialisasi politik merupakan sikap-sikap politik seseorang dalam masyarakat politik atau sistem politik yang juga ditentukan oleh nilai-nilai politik yang diyakini kebenarannya oleh anggota-anggota masyarakat.

Atas dasar pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan politik, nilai-nilai politik dan sikap-sikap politik akan mempengaruhi perilaku seseorang atau individu dalam masyarakat. Sehingga perilaku-perilaku politik yang diperlihatkan oleh seseorang atau individu apabila dilakukan secara bersamaan dan dalam tujuan yang sama, maka akan menciptakan suatu gelombang gerakan yang berpengaruh terhadap eksisnya suatu pemerintahan atau sebuah sistem politik.

Lebih lanjut dapat dikemukakan disini bahwa diperlukan wadah atau sarana-sarana yang dapat menyalurkan atau agen tempat dimana seseorang memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap politik. Dennis Kavanagh mengatakan bahwa agen-agen atau sarana-sarana yang dimaksud meliputi beberapa unsur yaitu keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik (partai-partai politik, kelompok kepentingan), sejarah, pengalaman politik, pekerjaan dan usaha-usaha yang bersifat mendidik dari mereka yang sedang berkuasa juga adalah agen sosialisasi politik (Kavanagh, 1982).

Disamping itu menurut Almond, sebagaimana diuraikan oleh Mochtar Mas'ood dan Colin McAndrews agen-agen yang dapat menjadi sarana sosialisasi politik adalah keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa dan kontak-kontak politik langsung. Lebih lanjut dikatakan bahwa sarana-sarana, pengalaman-pengalaman dan pengaruh-pengaruh tersebut, yang semuanya membentuk sikap-sikap individu, selanjutnya menciptakan apa yang disebut "identifikasi politis" seseorang, yaitu suatu kombinasi dari beberapa perasaan dan sikap (Mas'ood & McAndrews, 1986). Hal ini dapat berlanjut pada, pertama, di dalam sistem politik terdapat sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan dasar seperti nasionalisme identifikasi etnik atau kelas, keterikatan ideologis dan perasaan fundamental akan hak-hak, keistimewaan dan kewajiban pribadi. Kedua, kurang terdapat komitmen emosional terhadap, dan pengetahuan tentang, lembaga-lembaga pemerintahan dan politik seperti pemilihan umum, struktur lembaga perwakilan, kekuasaan badan eksekutif, struktur badan pengadilan dan sistem hukum. Ketiga, lebih banyak terdapat pandangan-pandangan yang cepat berubah tentang peristiwa-peristiwa, kebijaksanaan politik, isu-isu politik, dan tokoh-tokoh yang sedang terkenal (Mas'ood & McAndrews, 1986).

Dalam konsep sosialisasi politik dikenal adanya agen-agen atau sarana-sarana sebagai wadah bagi berlangsungnya proses sosialisasi politik. agen-agen tersebut meliputi agen keluarga, agen sekolah, agen teman sebaya

(*peer group*), agen media massa, lembaga-lembaga politik, kontak-kontak politik langsung.

Tesis ini diantaranya mencoba melihat adanya pengaruh agen/sarana sosialisasi politik terhadap pengetahuan politik masyarakat. Adapun yang menjadi pilihan dari agen/sarana sosialisasi politik sebagaimana yang diuraikan diatas yang dianggap mempengaruhi masyarakat meliputi agen/sarana teman sebaya, dan kontak-kontak politik langsung.

Penjabaran dari agen sosialisasi politik “teman sebaya” adalah dimana kelompok-kelompok pertemanan, terutama dikalangan para pemuda, dimana mereka mendapatkan pandangan-pandangan mengenai politik dari teman-teman pergaulannya. Sosialisasi politik melalui teman sebaya ini dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung ataupun secara sadar maupun tidak sadar. Sosialisasi ini seringkali berlangsung dalam suasana yang santai, dalam nuansa pergaulan dan pertemanan sehari-hari. Dalam prakteknya, pergaulan dan pertemanan dengan teman sebaya ini seringkali merupakan salah satu sarana yang efektif dalam sosialisasi nilai-nilai apapun, tidak hanya politik.

Penjabaran dari sarana sosialisasi politik “kontak-kontak politik” adalah bahwa tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga atau sekolah, tetapi bila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh aparat keamanan, kelaparan tanpa ada yang menolong dan dipaksa masuk wajib militer, pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin dapat berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis-krisis politik luar negeri dan perang, dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan individu dan kelompok-kelompok, merupakan sarana politik yang dapat memiliki pengaruh cukup besar terhadap masyarakat atau obyek sosialisasi politik. melalui hal-hal tersebut, sosialisasi politik dapat dijalankan dengan cukup efektif.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap dan tepat dalam penelitian ini, diperlukan penelitian yang sistematis dengan metodologi yang sesuai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif¹ dengan menggunakan metode etnografi, yaitu metode penelitian yang mempelajari bagaimana perilaku sosial dapat dideskripsikan sebagaimana adanya (Moleong, 1990). Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh James Spradley, bahwa etnografi merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang berusaha untuk memahami secara mendalam, utuh dan menyeluruh obyek yang diteliti (Spradley, 1979). Dengan kata lain etnografis (yang disebut juga *anthropological field study approach*) merupakan penelitian dengan cara mendeskripsikan secara mendalam suatu fenomena budaya (Irawan, 2006). Penelitian ini berusaha untuk memahami sejauh apakah peran kepemimpinan pemuda Partai Keadilan Sejahtera dalam proses perubahan sosial politik di Indonesia dan mengapa mereka mampu memberikan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut.

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

3.1.1. Batasan Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh apakah peran kepemimpinan pemuda Partai Keadilan Sejahtera dalam proses perubahan sosial politik di Indonesia dan mengapa mereka mampu memberikan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut, dengan terlebih dahulu menjelaskan bentuk kepemimpinan pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik Indonesia, pandangan PK Sejahtera mengenai pemuda dan perubahan sosial politik itu

¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkenaan dengan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dengan bentuk simbolik seperti pertanyaan, tanggapan-tanggapan lisan, tanggapan non verbal dan grafik-grafik. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1990, hal. 63

sendiri serta pandangan PK Sejahtera mengenai konsep sosial politik masa depan Indonesia.

3.1.2. Jenis Data

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka data yang diperlukan terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Rincian dari data yang akan dikumpulkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan peneliti bertindak sebagai pengumpul data. Dalam hal ini data-data tersebut diperoleh melalui:

1. Mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia 1997-1999. Dalam hal ini narasumber selaku salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 1998 dan fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera.
2. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 1999-2000. Dalam hal ini narasumber selaku salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 1998 dan fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera.
3. Pendiri PK Sejahtera
4. Narasumber diskusi mengenai Partai Keadilan Sejahtera yang dihadiri langsung oleh peneliti.

Mantan ketua SM UI dan BEM UI dipilih sebagai responden wawancara karena melihat kepada latar belakang mereka berdua sebagai pelaku sejarah gerakan reformasi 1998.

Universitas Indonesia

Diharapkan melalui wawancara akan diperoleh informasi mengenai pandangan pemuda di dalam PK Sejahtera. Dari sini akan diperoleh pula informasi mengenai pandangan para pemuda terhadap PK Sejahtera sebagai partai yang konsisten melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud, tidak hanya perubahan yang biasa saja, namun perubahan ke arah yang baik yang sejalan dengan cita-cita reformasi. Akan digali pula mengenai posisi pemuda dalam gerakan perubahan PK Sejahtera.

Kedua responden dipilih karena sebagai aktivis pelaku gerakan reformasi 1998, tentunya keduanya memiliki visi atau pandangan mengenai perubahan yang diinginkan para mahasiswa dan pemuda melalui gerakan reformasi. Terkait dengan kenyataan keduanya kemudian memilih bergabung dengan PK Sejahtera, tentunya menimbulkan pertanyaan apakah cita-cita PK Sejahtera sejalan dengan cita-cita para pemuda dan mahasiswa.

Secara umum, pendiri PK Sejahtera berjumlah 50 orang, terdiri atas pemuda dan generasi yang lebih berumur. Setelah mempertimbangkan waktu yang sudah mulai menjelang masa kampanye, maka diputuskan untuk hanya mewawancarai salah satu pemuda pendiri PK Sejahtera. Untuk itu dipilihlah sosok yang relatif mudah untuk dihubungi dan diminta kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber.

Diharapkan dari wawancara ini akan didapat informasi mengenai konsep PK Sejahtera mengenai pemuda dan pemberdayaan pemuda itu sendiri dalam melakukan perubahan sosial politik terhadap masyarakat Indonesia. Setelah di dapat informasi mengenai konsep perubahan PK Sejahtera dan peran pemuda di dalamnya, baru dapat

Universitas Indonesia

ditentukan seperti apakah peran kepemimpinan pemuda PK Sejahtera dalam melakukan perubahan sosial politik di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui berbagai perpustakaan yang memiliki data-data yang dibutuhkan mengenai kepemimpinan pemuda, Partai Keadilan Sejahtera dan perubahan sosial politik Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengumpulan data melalui berbagai perpustakaan ini adalah untuk mendapatkan informasi dan tulisan-tulisan dari berbagai dokumen, buku, majalah, dan berbagai jurnal. Data juga akan didapatkan melalui berbagai situs internet yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan.

3.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk tentang situasi dan kondisi latar penulisan (Moleong, 1990). Adapun informan penelitian yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia 1997-1999, Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 1999-2000, Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera, dan beberapa narasumber lainnya yang berbicara di dalam Diskusi Terbatas dan Peluncuran Buku Platform PK Sejahtera, yang diselenggarakan pada 20 April 2008.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang dibutuhkan dapat terkumpul dengan baik, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara penting dilakukan dalam penelitian kualitatif, karena dapat mengungkap data secara lebih mendalam dari informan penelitian.

b. Studi Dokumentasi (*Data sekunder*)

Studi dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang didapatkan peneliti tidak secara langsung dari informan. Diantaranya terdapat dokumen-dokumen yang menunjukkan sejauh apa peran kepemimpinan para pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik Indonesia dan mengapa mereka mampu memberikan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit. Selain itu data juga diperoleh dalam bentuk buku-buku, jurnal, majalah serta situs-situs internet yang relevan dengan pembahasan (Arikunto, 1996).

3.4. Teknik Analisa Data

Penganalisaan data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yaitu dengan cara sebagai berikut: Langkah – langkah dalam penulisan tesis ini terbagi dalam beberapa tahapan:

Pertama; pengumpulan data: Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber yang telah diperoleh. Tahap ini dilakukan antara lain dengan mengumpulkan bahan – bahan tertulis atau pun tidak tertulis mengenai Partai Keadilan Sejahtera, misalnya dengan membeli atau memfoto kopi buku – buku, mengkliping pemberitaan media massa, dan memprint out situs – situs internet dan melakukan wawancara yang terkait dengan Partai Keadilan

Sejahtera dan kondisi sosial – politik Indonesia yang menjadi obyek penelitian.

Kedua; reduksi data, setelah semua baca yang diperoleh, dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya melakukan reduksi data. Unit-unit data yang berguna dapat diidentifikasi, dipisahkan dan dikelompokkan dan dikelompokkan kembali untuk di analisa serta membuang data yang tidak diperlukan.

Ketiga; pengolahan dan perumusan data: dari hasil pengumpulan data, penulis akan melakukan pengelompokan dan klasifikasi berdasarkan pokok permasalahan setiap bab. Selanjutnya data diolah secara sistematis dan kemudian dirumuskan dengan menggunakan pola pemantapan isi setiap data dan informasi yang telah diolah.

Keempat; penyajian data: setelah melalui proses pengumpulan, pengolahan dan perumusan data di atas, kemudian hasil yang di dapat disajikan dalam penulisan tesis secara sistematis. Dengan adanya penyajian data, dapat dipahami apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan lebih jauh dalam menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

Kelima; penarikan kesimpulan: setelah dilakukan keempat tahap di atas barulah kemudian data hasil penelitian dapat disimpulkan.

BAB 4

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PEMUDA

Sejarah PK Sejahtera tidak dapat dipisahkan dari para pemuda, terutama para pemuda aktivis kegiatan-kegiatan pembinaan yang disebut halaqah. Kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun 1980-an inilah yang kemudian menjelma menjadi Partai Keadilan dan bertransformasi menjadi PK Sejahtera pada 20 April 2002. Gerakan PK Sejahtera tidak dapat dipisahkan dari gerakan pemuda karena banyak aktivis pemuda yang kemudian aktif di dalam PK Sejahtera. Pemuda di dalam PK Sejahtera sendiri berjumlah binggga sekitar 60-70% dari seluruh anggotanya. Bab ini akan membahas mengenai sejarah PK Sejahtera, kondisi sosial politik yang melatarbelakanginya, pandangan PK Sejahtera terhadap pemuda, posisi pemuda di dalam PK Sejahtera dan peran pemuda di dalam PK Sejahtera.

4.1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

4.1.1. Peta Sosial Politik Indonesia Sebelum Berdirinya Partai Keadilan (Sejahtera)

Sejak kemerdekaannya, hingga didirikannya Partai Keadilan yang merupakan awal Partai Keadilan Sejahtera, Indonesia telah mengalami dua periode kepemimpinan, yaitu masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Masa kepemimpinan Presiden Soekarno, yang lebih dikenal sebagai masa Orde Lama, ditandai dengan usaha-usaha Soekarno dalam menyatukan berbagai komponen bangsa Indonesia yang berbeda-beda. Mungkin tidak terlalu berlebihan kalau masa ini disebut sebagai masa konsolidasi.

Sebagai bangsa yang baru berdiri, Soekarno berusaha menanamkan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, diantaranya dengan memunculkan musuh bersama. Masih lekat dalam ingatan ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, dimunculkanlah berbagai

jargon untuk mengobarkan semangat bangsa Indonesia, satu diantaranya yang paling terkenal adalah “Ganyang Malaysia”, yang diumumkan pada 27 Juli 1963 (id.wikipedia.org). Soekarno juga menjalankan berbagai proyek mercusuar untuk meningkatkan prestise bangsa, seperti pembuatan Monumen Nasional (Monas) (www.silaban.net, www.jakarta.go.id) yang menelan banyak biaya dan korban, pembangunan Masjid Istiqlal (www.masjidistiqlal.com), diadakannya GANEFO (Games of The New Emerging Forces) sebagai tandingan Olimpiade (www.rssf.com), dan lain sebagainya.

Kepiawaiannya dalam berorasi semakin menguatkan citra dirinya sebagai Presiden yang memiliki banyak pengaruh. Sebagai seorang pemimpin, saat itu ia merupakan pemimpin yang cukup disegani pemimpin-pemimpin negara lainnya, selain ia juga merupakan pemimpin yang memiliki pengaruh yang sangat besar pada rakyatnya. Namun, kebesarannya ternyata membuatnya lupa diri. Perasaan bahwa rakyatnya sangat mencintai dirinya, ditambah berbagai kekuasaan yang terpusat di tangannya, mendorongnya memproklamkan dirinya sebagai presiden seumur hidup (id.answers.yahoo.com). Keinginannya untuk menyatukan semua komponen bangsa, membuatnya dekat dengan berbagai kalangan dan golongan. Hal ini terlihat diantaranya pada rumusan kalimat sila-sila dalam Pancasila yang turut digubahnya (id.wikipedia.org). Pancasila disebut-sebut merupakan perwujudan dari tiga golongan besar saat itu, yaitu agamis, nasionalis dan komunis, yang mulai berkembang pada tahun 1940-an. Soekarno sendiri di akhir masa kepemimpinannya disebut memiliki kedekatan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia, yang kemudian menjadi salah satu sebab diturunkannya ia dari kursi kepemimpinan nasional Indonesia pada tahun 1966.

Salah satu keberhasilan yang telah dicapai Soekarno pada masa kepemimpinannya adalah diadakannya pemilu pada tanggal 29 September 1955 (Haris, 1999). Pemilu multi partai pertama ini

Universitas Indonesia

disebut-sebut sebagai pemilu yang paling demokratis pada saat itu karena pada saat itu terjadi kebebasan memilih dengan sebenarnya dan kompetisi yang *fair* diantara sesama peserta pemilu. Pemilu tersebut diikuti oleh 39 juta orang yang mewakili 91,5% jumlah penduduk saat itu (Ricklefs, 2005). Pemilu yang diikuti oleh 118 partai politik (www.transparansi.or.id) tersebut menghasilkan 257 orang anggota DPR pada putaran pertamanya dan 514 orang anggota Konstituante pada pemilu putaran keduanya (<http://203.130.201.130>).

Pada 30 September 1965 meletus pemberontakan PKI yang menewaskan banyak orang, termasuk 7 (tujuh) perwira tinggi Angkatan Darat (Setneg RI, 1994). Peristiwa ini kemudian membawa Indonesia ke babak baru perjalanannya sebagai bangsa. Soekarno yang sebelumnya telah memproklamirkan dirinya sebagai presiden seumur hidup, terpaksa diturunkan dari jabatannya, karena kedekatannya dengan PKI. Indonesia menyaksikan kebengisan anak bangsanya ketika sebagian dari mereka membantai sebagian yang lainnya. Sebagian masyarakat, terutama yang berasal dari NU memberantas para pengikut PKI. Saat itu Indonesia menyaksikan ratusan ribu pengikut PKI dibantai oleh pengikut NU, PNI dan organisasi sayap kanan lainnya (whitegun.wordpress.com)² yang merasa dendam keluarganya banyak yang menjadi korban keganasan PKI ketika melakukan *coup d'etat* pada Akhir September 1965.

Akibat dari *coup d'etat* yang gagal tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah-langkah untuk memberantas PKI dan seluruh ormasnya. Untuk itu, diterbitkanlah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang diemban oleh Kolonel Soeharto untuk memulihkan keamanan pasca pemberontakan Partai Komunis Indonesia (id.shvoong.com). Selanjutnya, Soeharto diangkat

² Jumlah korban anggota PKI yang dibunuh masih simpang siur, sebagian sumber menyebut angka 500.000 orang, sumber lainnya bahkan menyebut angka hingga 2-3 juta orang. Diduga setidaknya 1 juta orang menjadi korban pembunuhan saat itu dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan.

sebagai pejabat Presiden sejak 22 Februari 1967 (Luhulima, 2001). Sejak saat itu berakhir era kekuasaan Presiden Soekarno, yang digantikan oleh Soeharto. Masa kekuasaan Presiden Soekarno selanjutnya disebut sebagai masa Orde Lama, dan masa pemerintahan Presiden Soeharto disebut sebagai masa Orde Baru.

Sejak memerintahnya pada 1967, pemerintahan Soeharto menitikberatkan programnya pada pembangunan ekonomi dan segala infrastrukturnya. Kabinet yang dibentuknya kemudian disebut sebagai Kabinet Pembangunan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia menikmati berbagai kemudahan terutama dalam bidang ekonomi. Selama pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhitung cukup tinggi, sehingga Indonesia sempat dijuluki sebagai salah satu keajaiban Asia (indoprogress.blogspot.com). Hingga sekarang hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru masih dapat dilihat hingga sekarang, diantaranya ditandai dengan berbagai pembangunan fisik terutama di ibukota Jakarta. Di ibukota negara tersebut, dapat dilihat berbagai bangunan yang menjulang, jalan-jalan yang rata dan halus, dan berbagai pembangunan fisik lainnya.

Namun, sayangnya pembangunan fisik ekonomi tersebut tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang politik. Masyarakat Indonesia tidak mendapatkan pendidikan politik sebagaimana mestinya. Hak-hak politik masyarakat dikekang bahkan dikebiri. Masa pemerintahan rezim Orde Baru tidak mengenal kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan lain sebagainya. Berbagai aturan dibuat untuk memastikan masyarakat tidak dapat melawan rezim yang berkuasa. Saat itu masyarakat mengenal SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)³ bagi kalangan media massa, Undang-undang

³ Di masa Orde Baru, untuk media cetak seperti Koran, majalah, tabloid dan lain sebagainya, harus memiliki SIUPP sebagaimana lazimnya yang dimiliki majalah umum saat itu seperti Tempo. Untuk memiliki SIUPP di masa itu bukan hanya diperlukan kesabaran untuk mengurusnya, tetapi

Subversif (www.hamline.edu), bahkan pernah suatu saat diterbitkan SIM (Surat Izin Muballigh) bagi para muballigh, khatib dan lain sebagainya yang akan berceramah atau berkhotbah di berbagai acara keagamaan (Furkon, 2004).

Meskipun masyarakat menikmati berbagai pembangunan ekonomi, berbagai kemudahan dan lain sebagainya, pada saat yang bersamaan mereka dikekang secara politik. Banyak media massa yang mencoba lantang menyuarakan jeritan rakyat atas tindasan pemerintah, namun semua media massa tersebut terpaksa menjemput kematiannya karena SIUPP mereka dicabut, biasanya disebut dengan istilah “dibredel”. Salah satu media yang kasus pembredelannya menarik cukup banyak perhatian adalah pembredelan majalah Tempo pada tahun 1994 (Emmerson, 2001). Siapapun atau pihak manapun yang berani mengkritik pemerintah akan menghadapi berbagai ancaman. Surat Izin Muballigh yang mulai diberlakukan pada tahun 1984, setelah Tragedi Tanjung Priok, diterbitkan sebagai sarana mengontrol para khatib dan penceramah dari menyuarakan perlawanan atau kritik terhadap pemerintah. Para muballigh diwajibkan menyerahkan tulisan berisi ceramah atau khutbah yang akan mereka sampaikan di depan khalayak sebelum ceramah tersebut disampaikan. Siapapun yang berusaha menentang rezim Orde Baru akan dipenjarakan dengan tuduhan subversif. Kemudian banyak timbul korban, baik dipenjara, disiksa bahkan tidak sedikit yang terbunuh atau menghilang tanpa bekas. Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 1974⁴ dan peristiwa Tanjung Priok hanya sedikit dari contoh – contoh kejadian dimana pemerintah memberangus

juga diperlukan modal yang cukup besar untuk mendapatkannya. Jika tidak memiliki SIUPP maka penerbitan majalah sekurang-kurangnya harus memiliki SIT (Surat Izin Terbit) kalau untuk kalangan internal.

⁴ Peristiwa ini sebenarnya merupakan aksi yang ditujukan sebagai penolakan adanya investasi asing di Indonesia (terutama sekali dari pemerintah Jepang). Namun aksi ini kemudian menjadi peristiwa berdarah. Disinyalir aksi ini sengaja dikacaukan oleh pihak-pihak yang sengaja menghantam gerakan mahasiswa, dimana kekacauan tersebut merupakan bagian dari rekayasa militer yang bertujuan untuk membungkam gerakan mahasiswa.

Universitas Indonesia

kegiatan yang dianggap menentang atau dapat membahayakan pemerintah. Untuk dapat terus melanggengkan kekuasaannya, Soeharto menjalankan rekayasa politik yang melembaga, melalui diterbitkannya berbagai peraturan yang menunjangnya. Diantara bentuk – bentuk rekayasa tersebut adalah pembatasan jumlah partai politik dan dipertahankannya konsep massa mengambang, pengontrolan setiap agen politik termasuk kaum intelektual, kaum muda, mahasiswa dan media massa (Tahqiq, 2004).

Kondisi ini terus berlanjut. Rakyat semakin dibuat tidak memiliki pengetahuan mengenai politik. Pada saat yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia ternyata tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia secara luas. Rezim Orde baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto ternyata menerapkan kebijakan ekonomi yang diskriminatif. Bagian terbesar dari kue pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama orang-orang yang memiliki posisi dekat dengan kekuasaan dan pemerintahan, lebih khususnya yang memiliki kedekatan dengan Soeharto.

Untuk melegalkan praktek penyimpangan ini, dibuatlah berbagai peraturan yang menguntungkan Soeharto dan kroni-kroninya, terutama bagi keluarga besar Soeharto. Saat itu Indonesia mengenal BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) (www.antara.co.id), yang sebenarnya merupakan legalisasi monopoli perniagaan cengkeh, kebijakan mengenai mobil nasional Timor, yang dijalankan oleh Tommy Soeharto (www.hamline.edu), hingga didirikannya Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) oleh Tutut Soeharto pada 23 Januari 1991 (www.tpi.tv). Hingga pertengahan 1990-an, kebijakan-kebijakan di Indonesia diarahkan oleh kepentingan-kepentingan keluarga Soeharto (Bresnan, 2005). Selain itu, sebagian kebijakan ekonomi rezim Orde Baru juga dianggap hanya menguntungkan sebagian pihak tertentu, terutama warga negara Indonesia yang berlatar belakang keturunan Tionghoa.

Universitas Indonesia

Kondisi inilah kemudian yang menjadi salah satu latar belakang kehancuran dirinya. Ketika badai krisis ekonomi menerpa Indonesia, kebijakan-kebijakan tersebut membuat pemerintah kesulitan untuk mengatasi krisis tersebut. Akibatnya muncul tuntutan agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Ketika Soeharto akhirnya mundur dari jabatannya pun, tuntutan agar ia dan kroni-kroninya diperiksa atas kasus-kasus korupsi yang dilakukan tetap mengemuka. Sesungguhnya secara umum terdapat bukti-bukti terjadinya korupsi oleh institusi pada berbagai negara pada akhir abad ke-20, termasuk di Amerika Serikat, namun kasus korupsi Soeharto merupakan kasus tiada bandingnya, ia merupakan kepala negara dan jumlah harta kekayaan yang dikorupsinya terhitung monumental. Pada tahun 2004, lembaga Transparency International menempatkannya sebagai penggelap dana publik terbesar di dunia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Lembaga tersebut menyebutkan total dana yang digelapkannya sekitar 15 miliar hingga 35 miliar dollar AS (Bresnan, 2005).

Ketika gelombang krisis ekonomi menghantam Indonesia, Indonesia tidak mampu bangkit dari keterpurukan tersebut, salah satu penyebabnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih juga berpihak pada Soeharto dan para kroninya. Ketika negara-negara lainnya di Asia sudah mulai mampu mengatasi krisis ekonomi yang melanda negaranya, Indonesia masih juga terpuruk dalam krisis ekonomi tersebut. Bahkan Thailand sekalipun yang merupakan negara paling awal terkena krisis ekonomi sudah mampu mulai mengatasi krisis ekonomi yang menghantam negaranya, ditandai salah satunya dengan menguatkan nilai tukar Baht terhadap Dollar AS.

Hingga Januari 2008, ketika badai krisis ekonomi mencapai puncaknya, Indonesia belum juga mampu mengatasi krisis dan mengembalikan perekonomiannya. Sementara itu mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mulai bergerak

Universitas Indonesia

menuntut adanya perubahan, meskipun awalnya hanya di dalam kampus saja (Luhulima, 2001). Pergerakan ini mulanya dilatarbelakangi morat maritnya perekonomian Indonesia, melambung tingginya harga barang-barang, meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan menyempitnya kesempatan kerja kesempatan kerja (Luhulima, 2001). Aksi semakin menghebat ketika 11 Maret 1998 Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden untuk masa bakti ke tujuh. Apalagi kemudian di dalam Kabinet Pembangunan VII ada nama Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), anaknya, dan Mohamad "Bob" Hasan, kroninya (Luhulima, 2001). Mahasiswa terus menuntut adanya perubahan, yang kemudian dikenal dengan nama reformasi.

Soeharto kemudian sempat mengemukakan bahwa dirinya akan melakukan reformasi (Haris, 1999), namun janji tersebut tidak kunjung datang, langkah-langkah yang diambil Soeharto dipandang tidaklah cukup, hanya merupakan satu cara untuk menyelamatkan dirinya saja. Tuntutan mahasiswa jelas dan tegas: reformasi total di bidang politik dan ekonomi, ditandai dengan pengunduran diri Soeharto (Luhulima, 2001).

Setelah melalui jalan yang berliku, dan proses aksi-aksi demonstrasi maraton yang melelahkan hingga pendudukan komplek gedung MPR/DPR selama 5 hari (Bourdier et. al., 2003), akhirnya Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998, jam 09.06 pagi (Luhulima, 2001). Sejak saat itu dimulailah masa-masa awal Indonesia menuju proses demokratisasi. Ketika Soeharto mengundurkan diri, maka wakilnya Prof. B. J. Habibie diangkat menjadi Presiden berikutnya. Banyak pihak yang masih meragukan dirinya, baik dari segi kemampuannya memimpin, dan terutama dari segi kemampuannya untuk melanjutkan cita-cita reformasi, terkait dengan kenyataan dirinya merupakan salah satu hasil pembinaan Soeharto (Haris, 1999). Namun terlepas dari segala keraguan terhadap dirinya, ternyata ia cukup berhasil menjalankan sebagian amanat

Universitas Indonesia

reformasi, diantara keberhasilan kerjanya adalah menyelenggarakan pemilu pada bulan Juni tahun 1999 yang dinilai cukup jurdil (Bresnan, 2005).

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh berbagai komponen bangsa. Dibukanya keran politik keterbukaan dan kebebasan berpendapat, menimbulkan euforia di sebagian anak bangsa. Beramai-ramai mereka mendirikan berbagai partai politik, dengan berbagai motif masing-masing. Disinyalir sebagian dari mereka merupakan perpanjangan dari kekuasaan Orde Baru yang berusaha kembali meraih kekuasaan melalui bentuk yang baru, sebagian lainnya bertujuan mendapat keuntungan dengan diberikannya dana kampanye per partai politik yang cukup besar, meskipun tidak dinafikan masih terdapat bagian yang bertujuan mulia dengan idealisme yang mereka miliki.

Satu diantara partai-partai politik yang baru didirikan tersebut adalah Partai Keadilan. Partai ini didirikan oleh pemuda-pemuda yang berkeinginan memajukan Indonesia, menjadikan Indonesia kembali sebagai negara yang bermartabat, negara yang memiliki kehormatan baik di mata para warganya maupun di mata warga dunia. Hal ini dapat dicapai dengan cara memperbaiki kondisi sosial dan politik Indonesia yang mereka nilai sudah buruk. Sebagai sebuah partai yang masih baru, partai ini ternyata secara mengejutkan mampu meraih suara hingga 1,7% secara nasional (Furkon, 2004). Meskipun jumlah ini masih tidak mencukupi untuk mencapai batas *electoral threshold*⁵ sebanyak 3%, namun menurut banyak pengamat, jumlah ini merupakan capaian yang cukup mengejutkan bagi sebuah partai yang masih baru yang dimotori oleh pemuda-pemuda yang sebelumnya belum dikenal di kancah politik nasional. Dengan jumlah

⁵ Electoral Threshold merupakan jumlah minimal raihan suara nasional suatu partai untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya. Apabila jumlah ini tidak tercapai, maka partai yang bersangkutan harus membentuk partai baru atau berkoalisi dengan partai lainnya untuk mengikuti pemilu berikutnya.

capaian suara yang didapatnya, Partai Keadilan mampu menempatkan lebih dari 180 orang perwakilannya pada berbagai tingkat (DPR, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II) untuk masa bakti tahun 1999 – 2004.

Karena tidak melewati batas *electoral threshold*, maka para pemuda penggerak Partai Keadilan berinisiatif mendirikan sarana baru sebagai wadah perjuangan mereka melalui partai politik. Pada tahun 2002, diproklamkanlah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya Partai Keadilan menyatakan diri melebur ke dalam Partai Keadilan Sejahtera, dengan demikian resmilah Partai Keadilan Sejahtera menjadi kendaraan politik mereka yang selanjutnya. Sebagai partai yang baru berdiri, tentunya mereka menghadapi berbagai kendala, diantaranya koordinasi antar struktur di seluruh wilayah Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja para pengurus, anggaran dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak menyurutkan langkah mereka untuk terus berusaha dan berjuang melalui wadah yang mereka bentuk tersebut. Usaha mereka ternyata tidak sia-sia. Pada pemilihan umum tahun 2004 PK Sejahtera berhasil meraih simpati masyarakat Indonesia, sehingga berhasil meraih hingga sekitar 7% suara secara nasional (Edward, 2006). Raihan suara ini dinilai sebagian pengamat sebagai capaian yang sangat mengejutkan, mengingat berbagai faktor yang menempatkan PK Sejahtera sebagai partai yang hanya dipandang sebelah mata. Sebagian pengamat bahkan memprediksikan capaian suara PK Sejahtera pada tahun 2009 akan menurun dibandingkan dengan capaian suara pada tahun 2004.

4.1.2. Gerakan Tarbiyah: Cikal Bakal Partai Keadilan Sejahtera

Ketika Partai Keadilan Sejahtera diproklamkan, banyak pengamat yang tidak memandang sebelah mata kepada partai yang baru berdiri ini. Terlebih para penggerak partai ini merupakan

Universitas Indonesia

pemuda-pemuda yang sebelumnya tidak pernah terdengar kiprahnya di dunia perpolitikan nasional. Namun ketika pada pemilu mereka mampu meraih suara yang cukup signifikan sebagai sebuah partai baru, barulah mereka mulai memperhitungkan partai ini. Ketika pada tahun 2004 partai ini mampu meraih suara yang jauh lebih besar lagi, dengan menggunakan nama baru Partai Keadilan Sejahtera, bahkan partai-partai besar pemenang pemilu sebelumnya seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan lain sebagainya, mulai memperhitungkan partai ini sebagai saingan yang potensial.

Kemampuan partai ini dalam mengkonsolidasikan kekuatannya dalam waktu yang relatif singkat dinilai cukup mencengangkan. Sebagai partai pendatang baru dengan penggerak-penggerak yang juga merupakan wajah-wajah baru di dalam kancah perpolitikan nasional, partai ini mampu bergerak layaknya partai yang sudah memiliki pengalaman yang banyak dalam dunia perpolitikan nasional. Konsolidasi antar struktur pengurus tampaknya berjalan dengan baik, sehingga dengan cepat partai ini mampu membentuk kepengurusan hingga hampir 33 propinsi hanya dalam waktu yang singkat. Sebagai partai yang baru berdiri, sudah tentu kondisi keuangan PK ataupun PK Sejahtera tidaklah sama dengan partai-partai lainnya yang sudah besar.

Ketiadaan tokoh yang termasuk kategori tokoh nasional juga membuat partai ini tergolong cukup sulit untuk mendapat dukungan, baik dukungan suara ataupun dukungan dana, dari masyarakat. Namun demikian segala kekurangan ini tidaklah membuat partai ini berkecil hati, hal ini justru semakin memacu semangat mereka. Mereka meyakini bahwa perjuangan yang mereka lakukan melalui partai politik tersebut adalah merupakan bagian dari jihad. Itulah yang membuat mereka tetap bersemangat berjuang meski

dengan segala keterbatasan dan segala komentar yang merendahkan mereka.

Satu pertanyaan yang seringkali menghinggap para pengamat pada awal-awal berdirinya partai ini adalah bagaimana mereka dapat dengan cepat membentuk dan mengkonsolidasikan struktur-struktur dibawahnya. Kemunculan PK Sejahtera berawal dari apa yang disebut gerakan tarbiyah. Nama ini sebenarnya merupakan sebutan yang diberikan oleh orang-orang yang ada disekitar para aktivis gerakan tersebut, para aktivisnya sendiri tidak pernah menyebut diri mereka dengan sebutan apapun. Kemungkinan sebutan ini muncul karena para aktivisnya sering menyebut kegiatan pengajian atau ta'lim rutin pekanan mereka dengan istilah tarbiyah. Tarbiyah sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab yang berari pendidikan atau pembinaan.

Istilah tarbiyah yang berarti pendidikan atau pembinaan ini secara tersirat menunjukkan perhatian besar mereka terhadap unsur pendidikan, minimal pendidikan terhadap diri sendiri. Dalam doktrin pendidikan mereka, mereka menggunakan konsep lingkup pengaruh atau *sphere of influence* secara bertingkat. Pada tahap yang paling awal adalah pembentukan kepribadian yang islami yang bersifat individu, kemudian membentuk keluarga yang islami, selanjutnya membentuk masyarakat yang islami, membentuk negara/daerah yang islami, membentuk khilafah islamiyah dan kemudian pada puncak tertinggi adalah menjadi ustadz atau soko guru bagi alam semesta sebagaimana yang disifati Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu haditsnya.

Mereka meyakini bahwa satu tahap menuju tahap yang lainnya adalah sebuah tahapan yang saling menunjang, sehingga tahap berikutnya tidak akan dapat dicapai tanpa tahap sebelumnya telah dilalui. Pentingnya tarbiyah bagi mereka dapat dilihat pada salah satu

Universitas Indonesia

dari 7 karakter khusus Profil Kader PK Sejahtera 2009, yaitu murabbi produktif (Profil, 2005). Murabbi disini berarti Pembina, dalam tarbiyah tentunya. Doktrin yang didengungkan di dalam PK Sejahtera sendiri yaitu *inna al akh ash-shadiq, ayyakunu murabbiyyan*. Sesungguhnya seorang kader yang baik haruslah menjadi murabbi, atau memiliki binaan.

Asal muasal gerakan tarbiyah sebenarnya sendiri tidak terlalu jelas. Namun sebagian besar literatur menyebutkan bahwa gerakan ini bersumber dari ajaran-ajaran Al Ikhwanul Muslimun di Mesir yang didirikan oleh Imam Hasan Al Banna. Banyak pula yang mengkaitkan gerakan ini dengan kajian-kajian keislaman yang dibentuk oleh almarhum Muhammad Natsir.

Gerakan tarbiyah sebenarnya merupakan salah satu bentuk perkembangan eksistensi keagamaan di Indonesia pada masa dimana agama (Islam) dihambat oleh penguasa. Gerakan ini mulai tumbuh ketika Islam dan para aktivisnya menghadapi represifitas penguasa Orde Baru sebagai bagian dari usaha mereka melanggengkan kekuasaan. Menurut Kuntowijoyo, logika agama berbeda dengan logika kekuasaan. Apabila agama disumbat, maka ia akan merambah kemana-mana (Furkon, 2004).

Represifitas Orde Baru ternyata tidak bisa mematikan perkembangan Islam di kalangan muda Islam. Maka maraklah berbagai kajian Islam, yang tidak hanya terbatas di kampus – kampus atau sekolah – sekolah yang berdasarkan agama Islam saja, seperti UIN (IAIN), kampus dan sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah, kampus dan sekolah swasta dan lain sebagainya, tetapi juga di kampus – kampus dan sekolah – sekolah umum yang sering disebut sebagai kampus dan sekolah yang sekuler. Justru saat itu kajian – kajian keislaman sangat marak di kampus – kampus dan sekolah-sekolah tersebut. Sikap represif rezim yang berkuasa saat itu

tidak disikapi secara frontal, seperti sebagian rekan mereka yang bergabung dengan gerakan lainnya, namun dilawan melalui pembinaan diri (Machmudi, 2006). Menurut Joseph Stiglitz, Indonesia memerlukan agenda baru, diantaranya adalah *land reform* dan investasi yang lebih berkaitan dengan pendidikan (Rais, 2008). Dalam hal ini, para aktivis gerakan tarbiyah – yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan (Sejahtera) telah membuktikan bahwa mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah pendidikan, atau pembinaan dalam bahasa mereka.

4.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera

Sebagai organisasi politik yang hidup dan tumbuh di wilayah negara Republik Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera tentunya memiliki peran bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari kiprah para aktivisnya, yang tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga sampai ke mancanegara, terutama negara – negara Islam. Dalam perjalanannya, PK Sejahtera telah turut berperan dalam memajukan pendidikan nasional, pemberian bantuan dan relawan ke berbagai daerah yang membutuhkan, dukungan terhadap program pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan lain sebagainya. Pengiriman bantuan dan relawan ke daerah yang membutuhkan bahkan tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga ke mancanegara seperti Irak, Palestina, Afghanistan dan lain sebagainya.

Kemunculan PK Sejahtera sendiri merupakan respon terhadap perubahan – perubahan yang terjadi di Indonesia setelah bergulirnya reformasi. Peluang yang ada ditangkap oleh para aktivisnya dengan mendirikan partai yang mereka yakini dapat dijadikan kendaraan politik untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

Universitas Indonesia

Menurut H. Hilmi Aminuddin, ketua Majelis Syura PK Sejahtera, PK Sejahtera hadir untuk melayani seluruh komponen bangsa (Aminuddin, diskusi), tidak hanya bagi kelompok – kelompok tertentu. Karena PK Sejahtera meyakini posisi pemimpin adalah sebagai pelayan bagi rakyatnya (*khadimul ummah*).

Dalam perjalanannya kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Partai Keadilan Sejahtera, yaitu:

4.1.3.1. Faktor Politik

Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan PK Sejahtera adalah: a) Gerakan Reformasi. Era reformasi yang dianggap merupakan era keterbukaan, membuat banyak pihak kemudian mendirikan partai – partai yang sesuai dengan keinginan mereka. Peluang inilah yang juga diambil para aktivis partai tersebut, para aktivisnya sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk juga mendirikan partai politik. Menurut Dr. Sohibul Iman, sebelum menjadi partai para aktivisnya telah merumuskan pembentukan partai politik yang dapat dipakai untuk sarana mencapai tujuan yang diinginkannya. Para aktivisnya menyebut rumusan tersebut dengan istilah “visi 2010” (Iman, diskusi). Di dalam visi tersebut dijelaskan bahwa para aktivis gerakan tarbiyah baru akan membentuk partai politik pada tahun 2010. Namun perkembangan yang terjadi membuat mereka mempercepat pembentukan partai politik.

b) Kekuatan Massa. Meskipun massa terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok khas, berdasarkan pendidikan, penghasilan dan lain sebagainya, mahasiswa sebagai penopang utamanya masih mampu menggerakkan orang

Universitas Indonesia

untuk bersama-sama menuntut apa yang mereka inginkan. Sebagai golongan intelektual dan sering disebut sebagai *agent of change*, mahasiswa cukup mendapat posisi yang baik di mata masyarakat. Dengan mengusung isu-isu yang cukup populer dimata massa, PK Sejahtera mampu meraih banyak dukungan dalam melakukan berbagai aksi terhadap banyak pihak, misalnya aksi terhadap Kedubes Amerika Serikat dan lain sebagainya.

c) Kondisi partai-partai lainnya. Sebagian masyarakat sudah mulai apatis dan memandang semua partai adalah sama. Kondisi yang ada saat itu adalah rakyat sudah mulai muak hanya diberikan janji-janji oleh berbagai partai tanpa realisasi. Sementara partai – partai lainnya secara umum baru mulai melaksanakan program-programnya, terutama aksi-aksi sosial terbatas, menjelang pemilu, PK Sejahtera menjadikan program – program sosial tersebut sebagai bagian integral dari pengabdianya (Machmudi, 2006). PK Sejahtera membuktikan bahwa slogan partai dakwah yang diusungnya membedakan dirinya dengan partai-partai lainnya.

4.1.3.2. Faktor Sosial dan Ekonomi

PK Sejahtera diakui sebagai satu-satunya partai yang memiliki jaringan pelayanan sosial yang luas dan efektif, meski bukan satu-satunya partai yang memiliki jaringan pelayanan sosial. Sebagian besar partai lainnya pun turut memiliki jaringan pelayanan sosial, bahkan ada pula partai yang menyediakan kendaraan khusus yang berfungsi sebagai unit kesehatan, pengobatan dan lain sebagainya, namun pergerakannya tidaklah secepat yang dapat dilakukan PK Sejahtera. Diantara faktor – faktor sosial dan

ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan PK Sejahtera adalah:

a) Kesenjangan antara Pemerintah dan Masyarakat. Sebagai wakil rakyat, anggota dewan dari PK Sejahtera selalu siap mendengarkan dan menyampaikan masukan-masukan dari masyarakat. Hal ini terjadi saat sebagian besar anggota dewan hanya sibuk menumpuk kekayaan dan berusaha mengamankan posisi mereka pada pemilu berikutnya, para anggota dewan PK Sejahtera tetap berada pada posisi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. b) Polarisasi pemikiran. Masyarakat tengah dihadapkan pada berbagai pemikiran yang berkembang, mulai dari yang berhaluan kiri, moderat, berhaluan kanan, hingga yang ekstrim, baik kiri maupun kanan. Sebagai contoh, ada aliran yang berkeinginan mendirikan negara Islam, menghidupkan kembali komunisme, ada pula yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menjalankan kegiatannya, bahkan ada yang sampai menggunakan senjata pemusnah massa seperti bom untuk mencapai tujuannya. PK Sejahtera hadir sebagai alternatif pemikiran yang tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan apalagi sampai tingkat yang ekstrim. Meskipun mengusung Islam sebagai asas partai, PK Sejahtera cukup terbuka untuk menerima orang-orang dari berbagai golongan, bahkan ada pengurus PK Sejahtera di daerah Papua yang tidak beragama Islam. Prof. Azyumardi Azra menyebut PK Sejahtera sebagai Islam jalan tengah (Azra, diskusi), karena meskipun sejak awal telah menggunakan Islam sebagai azas secara terang-terangan, PK Sejahtera membuktikan dirinya bahwa mereka bukan kaum fundamentalis apalagi teroris, mereka hanya ingin

Universitas Indonesia

menegakkan nilai-nilai Islam yang universal di Indonesia tanpa terjebak retorika mengenai negara Islam Indonesia.

c) Keterpurukan ekonomi, yang merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia (Yudhoyono, 2007). Sebelum berbentuk partai, para aktivis gerakan tarbiyah yang kemudian mendirikan PK Sejahtera, telah lama bergerak di bidang sosial melalui berbagai yayasan yang mereka dirikan. Ketika PK dan kemudian PK Sejahtera didirikan, berbagai kegiatan sosial yang telah mereka laksanakan sebelumnya, mereka bawa ke dalam partai. PK Sejahtera kemudian dikenal sebagai partai yang sering mengadakan bantuan kepada masyarakat berupa sembako dan lain sebagainya.

d) Praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Indonesia sudah dikenal hingga mancanegara sebagai negara yang praktik KKN-nya sudah sangat massif dan melembaga. Namun demikian, para anggota dewan PK Sejahtera tetap berusaha konsisten dalam usaha pemberantasan KKN. Beberapa anggota dewan PK Sejahtera diketahui cukup berhasil dalam usaha ini, beberapa lainnya bahkan dikenal sebagai pihak yang membongkar adanya praktek KKN, seperti kasus uang *kadeudeuh* bagi para anggota dewan Bandung.⁶

e) Bencana Alam. Dengan adanya bagian khusus yang menangani bantuan bagi daerah yang terkenal bencana dalam, PK Sejahtera dikenal sebagai partai yang sangat responsif terhadap adanya bencana alam, bahu membahu

⁶ Kasus ini diungkap oleh Yudi Widiana, seorang anggota DPRD dari PK SEJAHTERA yang dalam masa kerjanya yang baru terhitung 6 bulan, membongkar kasus dana *kadeudeuh* ini senilai Rp. 250 juta per orang, atau total membebani dana APBD sebesar Rp. 25 miliar. Lihat Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah – Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, Harakatuna, Bandung, 2005, hal. 152-153

dengan masyarakat menyalurkan bantuan dan relawan bagi daerah – daerah yang terkena bencana alam. Sebuah penelitian memperlihatkan perolehan suara PK Sejahtera di daerah-daerah yang terkena bencana alam cukup tinggi.

Hasil riset Frontier yang dipublikasikan di www.detik.com pada 5 Juni 2003 memperlihatkan bahwa Partai Keadilan dinilai memiliki pemimpin yang tulus dan anti KKN (Yusuf, 2003). Meskipun hanya mampu menempatkan 7 orang anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999 – 2004, Partai Keadilan mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas yang tidak boleh diremehkan. Ketujuh orang anggota DPR dari Partai Keadilan tersebut dikenal sangat kritis dalam mensikapi kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun DPR sendiri yang dinilai tidak pro rakyat. Berbagai kebijakan yang dinilai hanya menghamburkan uang rakyat, meskipun ditujukan kepada anggota DPR RI sendiri mereka kritisi atau bahkan mereka tolak. Mashadi, salah seorang anggota DPR RI dari Partai Keadilan, bahkan dikenal sangat sederhana sehingga menolak jatah mobil yang seharusnya ia terima dan memilih tetap menggunakan skuter vespa tua miliknya sebagai kendaraan ke tempatnya bekerja di gedung DPR RI. Ia juga menolak pembagian jas anggota DPR RI miliknya karena ia nilai hanya merupakan pemborosan uang rakyat.

4.1.3.3. Faktor Kultural dan Pendidikan

Seperti telah disebutkan ada bagian awal bab ini, pendidikan merupakan bagian yang sangat penting, tidak hanya bagi negara namun juga bagi PK Sejahtera. Pendidikan, yang di PK Sejahtera disebut, pembinaan, mendapat porsi yang cukup besar di sisi PK Sejahtera,

Universitas Indonesia

sehingga mendapat perhatian yang besar. Setiap anggota harus mengikuti pola pembinaan yang diadakan oleh PK Sejahtera. Sedangkan untuk masyarakat umum, PK Sejahtera termasuk pihak yang gigih memperjuangkan agar anggaran pendidikan nasional mendapat porsi yang besar, cukup dan memadai. Kesemua ini dilakukan agar tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang terhitung rendah dapat ditingkatkan secara perlahan. Kondisi ini merupakan *bagian pertama* dari faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan PK Sejahtera dari bagian kultur dan pendidikan. PK Sejahtera senantiasa berkomitmen untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Yang kedua yaitu berkembangnya kelas menengah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi pada tahun 1980-an, telah mendorong tumbuhnya kelas menengah di Indonesia. Yang dimaksud kelas menengah disini yaitu kaum intelektual berpendidikan, eksekutif, kaum pekerja, professional dan lain sebagainya. Apabila pada umumnya kelas menengah di kota – kota besar di Indonesia lebih suka “mencari selamat” dan “cari aman” pada sekitar tahun 1998 (Winters, 1999), pada tahun – tahun setelah itu kelas menengah mulai ambil bagian pada perubahan yang terjadi di Indonesia. Hal ini mungkin dapat dipahami dalam konteks sebagian pelaku sejarah gerakan reformasi 1998 telah memasuki dunia kerja dan kemudian menularkan semangatnya kepada rekan-rekan kerjanya. Hal ini membangkitkan semangat sebagian kaum professional untuk ambil bagian dalam perubahan yang terjadi di Indonesia. Dalam transformasi sosial, kelas menengah sebenarnya memiliki peran yang sangat besar,

Universitas Indonesia

kehadiran kelas menengah yang kritis terhadap negara sangat dibutuhkan untuk mendorong terjadinya perubahan – perubahan dalam masyarakat (Prasetyantoko, 1999).

4.2. Konsep dan Gerakan Partai Keadilan Sejahtera

4.2.1. Dakwah Pergerakan Partai Keadilan Sejahtera

Sejak pertama di deklarasikan, Partai Keadilan Sejahtera telah memproklamkan dirinya tidak hanya sebagai partai politik semata, namun juga sebagai partai dakwah. PK Sejahtera menyatakan hal ini dengan ungkapan bahwa partai politik merupakan kendaraan bagi dakwah (Furkon, 2004). Pada awalnya hal ini membuat bingung banyak pihak karena terminologi partai dakwah belum pernah dikenal sebelumnya, ditambah dengan adanya ketakutan sebagian orang yang memandang terminologi dakwah erat dengan “fundamentalisme”, dan pelaksanaan hukum Islam yang menyeramkan.

Dalam perjalanannya kemudian, PK Sejahtera memperlihatkan bentuk sebenarnya dari apa yang dinyatakannya sebagai partai dakwah. Dakwah yang dimaksud oleh PK Sejahtera disini adalah penyebaran nilai-nilai Islam yang universal, terutama nilai keadilan dan kesejahteraan, bukan hanya dakwah demi mewujudkan suatu negara Islam. Bahkan dapat dikatakan PK Sejahtera sendiri tidak terlalu memusingkan mengenai negara Islam, karena substansi yang ingin dicapai adalah suatu negara dengan penerapan nilai-nilai Islam, tidak hanya sekedar label formal sebagai negara Islam saja. Hal ini dapat terlihat dari visi PK Sejahtera, yaitu terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. PK Sejahtera menjelaskan makna dakwah sebagai gerakan penyadaran dalam menyebarkan nilai-nilai kebajikan universal (Madani, 2008).

Dalam menjelaskan mengenai istilah masyarakat madani dalam visinya, PK Sejahtera menisbatkan masyarakat madani yang dimaksud dengan masyarakat di kota madinah pada zaman Rasulullah SAW, terutama setelah adanya Piagam Madinah. Menurut PK Sejahtera, masyarakat madinah saat itu dapat disebut sebagai masyarakat atau negara multietnis yang pertama. Di dalam kota tersebut hidup masyarakat muslim, masyarakat yahudi, dan lain sebagainya yang satu sama lain saling menghormati dan tidak menunjukkan sikap bermusuhan.

Sebelum adanya PK Sejahtera, para aktivis PK Sejahtera merupakan orang-orang yang juga aktif dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat keagamaan maupun sosial. Sebagian dari mereka bertugas sebagai pembina-pembina yang merekrut para pemuda dari berbagai latar belakang; mahasiswa, pelajar SMU, pemuda karang taruna, dan lain sebagainya. Mereka kemudian membentuk banyak kelompok kajian keagamaan yang tidak hanya mengkaji ajaran-ajaran Islam tetapi juga membicarakan permasalahan ummat di Indonesia. Kelompok-kelompok kajian inilah yang kemudian disebut Ihsan Tanjung sebagai SIE (*small islamic environment*) yang merupakan lingkaran sosial terkecil menuju pencapaian salah satu tujuan mereka. Kelompok kajian keislaman ini kemudian dikenal sebagai kelompok *tarbiyah* (yang berarti pendidikan), yang kemudian digunakan oleh orang-orang untuk menyebut kelompok ini.

Sebagian lainnya kemudian membentuk berbagai lembaga, LSM, yayasan dan lain sebagainya. Berbagai lembaga tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mengadakan berbagai kegiatan sosial, seperti pengobatan murah atau gratis, bazaar sembako, dan banyak lagi kegiatan sosial lainnya. Melalui berbagai bentuk organisasi inilah para pemuda tersebut bergerak melayani ummat.

Gelombang reformasi tahun 1998 yang membawa keterbukaan pada Indonesia turut dimanfaatkan oleh kelompok ini. Setelah melalui berbagai diskusi dan perdebatan, suatu survey yang dilakukan secara nasional kemudian menghasilkan keputusan untuk membentuk sebuah partai. Partai ini kemudian dinamakan Partai Keadilan, yang turut meramaikan dunia perpolitikan Indonesia. Apabila menurut Rodee tidak akan ada demokrasi yang efektif tanpa kompetisi partai politik (Rodee, 2000), Partai Keadilan menyambut angin segar reformasi untuk turut berkompetisi meraih kepercayaan masyarakat melalui suara yang diberikan. Sebuah usaha yang kemudian dilanjutkan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2000.

Mengingat pada Pemilu tahun 1999 terdapat banyak partai, yang sebagian diantaranya merupakan partai Islam atau yang berbasis massa Islam, dan terdapat pula beberapa partai yang diperkuat sebagian pemuda dan mantan mahasiswa yang juga terlibat dalam gerakan reformasi 1998, cukup mengherankan mengapa para aktivis pemuda tersebut memutuskan untuk membentuk partai sendiri, daripada bergabung dengan partai yang sudah ada, yang memiliki tokoh yang lebih dikenal masyarakat yang berarti dapat diperkirakan capaian suaranya pun akan cukup baik. Hal ini mungkin dapat dimengerti dengan cara melihat latar belakang pergerakan mereka. Mereka meyakini bahwa aktivitas yang mereka lakukan adalah bagian dari dakwah, cara mereka dalam menyeru masyarakat untuk kembali ke ajaran Islam yang fundamental (mendasar). Karena merupakan bagian dari dakwah, maka mereka meyakini aktivitas apapun, selama diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT, maka akan bernilai ibadah dan akan dicatat sebagai amal shalih. Termasuk di dalam berbagai aktivitas ini adalah aktivitas politik (Madani, 2008), karena mereka juga meyakini bahwa Islam berkaitan erat dengan politik, tidak dapat dipisahkan seperti anggapan sebagian masyarakat muslim lainnya.

Karena meyakini bahwa munculnya partai yang mereka dirikan adalah bagian dari keyakinan mereka bahwa partai merupakan alat dalam mengemban misi Islam yang universal (Machmudi, 2006), maka para aktivis PK Sejahtera terlihat sangat bersungguh – sungguh dalam beraktivitas. Dari pengamatan penulis, tidak jarang penulis mendapati aktivis yang membiayai sendiri aktivitasnya di dalam PK Sejahtera, misalnya ketika memasang berbagai spanduk, pamflet dan poster. Bahkan tidak jarang sebagian dari poster dan spanduk yang mereka pasang merupakan hasil dari uang yang mereka kumpulkan sendiri. Pendanaan di PK Sejahtera memang dikenal bersifat hampir swadaya penuh, hanya sebagian kecil yang merupakan dana yang disalurkan dari struktur di atasnya. Sumber pendanaan mereka biasanya didapat dari sumbangan kader, donatur dan infaq serta shadaqah yang mereka kumpulkan.

Sebagai partai yang diproklamirkan sebagai partai dakwah, kerja PK Sejahtera tidak hanya terbatas pada kerja politik saja. Itulah sebabnya gerak PK Sejahtera tidak hanya terbatas pada aktivitas politik yang biasanya hanya berlangsung dalam durasi 5 tahunan. Aktivitas PK Sejahtera tetap berlanjut bahkan meskipun waktu masih jauh dari masa pemilihan. Diantara aktivitas-aktivitas PK Sejahtera adalah bakti sosial, pelayanan kesehatan, silaturahmi dengan tokoh masyarakat, dan sambung rasa antara anggota legislatif PK Sejahtera dengan konstituen dari daerah pemilihannya, yang kesemuanya dilaksanakan secara berkala. Masing-masing kantor PK Sejahtera, mulai dari kantor daerah (tingkat kotamadya), kantor cabang (tingkat kecamatan), hingga kantor ranting (tingkat kelurahan) sebagian besar sudah mampu merancang program dan melaksanakannya secara mandiri baik dari segi SDM maupun keuangan. Ditinjau dari sudut keorganisasian, roda organisasi PK Sejahtera dinilai telah membentuk suatu, meminjam istilah Max Weber, sistem mekanik yang memungkinkannya bekerja secara efektif dalam menjalankan

Universitas Indonesia

program-programnya karena adanya *division of labour* (pembagian SDM/kerja) yang baik (Furkon, 2004).

Bentuk PK Sejahtera sebagai partai dakwah dapat dilihat dari doktrin perjuangannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ust. Hilmi Aminuddin, ketua Majelis Pertimbangan Pusat DPP PK Sejahtera, "*nahnu minhum, nahnu ma'ahum wa nahnu lahum*" (Aminuddin, diskusi), yang berarti "kita adalah bagian dari mereka (masyarakat), kita bersama mereka dan kita adalah untuk mereka". Dari slogan perjuangan ini dapat terlihat bahwa visi PK Sejahtera adalah melayani masyarakat (kita adalah untuk mereka), karena dakwah adalah merupakan bagian dari kewajiban muslim kepada muslim lainnya secara umum dan kepada manusia secara khusus. Bentuk inilah yang menjadikan PK Sejahtera sebuah partai yang unik dibandingkan partai-partai lainnya, suatu kombinasi agama dan nasionalisme dalam perpolitikan Indonesia. Pembinaan agama di tubuh PK Sejahtera menempati porsi utama dari kaderisasi PK Sejahtera, sehingga tidak heran sebagian besar kader PK Sejahtera memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang cukup baik. Bahkan keluasan pemikiran keagamaan PK Sejahtera dinilai menjadi salah satu pendorong reformasi politik, sosial maupun budaya di Indonesia (Machmudi, 2006).

4.2.2. Jalan Dakwah dan Keteguhan Hati dalam Pandangan Partai Keadilan Sejahtera

Para kader PK Sejahtera meyakini bahwa agar dakwah Islam dapat berkembang subur, tersebar dan mencapai keemasannya, maka diperlukan kader-kader yang dibina secara khusus, kader yang ikhlash, aktif, rela berkorban, selalu istiqamah dalam berbagai keadaan, tegar dalam menghadapi ujian, tribulasi, rayuan dan

intimidasi. Diperlukan pula kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan, serta mampu menyelesaikan berbagai tantangan.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* mengatakan bahwa orang yang hanya bicara tidak sama dengan orang yang beramal sedangkan orang yang beramal tidak sama dengan orang yang produktif dan bijaksana, yang dapat menghasilkan target paling mulia (Quthb, 2000). Hal ini dikemukakan karena untuk dapat berdakwah dengan baik, para da'i (pendakwah) harus mampu menstabilkan semangat dan emosinya. Jalan dakwah merupakan jalan yang sangat panjang, yang bagi orang dengan semangat dan emosi yang tidak stabil, dalam waktu yang sebentar saja dapat membuat mereka merasa bosan atau merasa tidak sanggup melanjutkan.

Para kader PK Sejahtera berkeyakinan bahwa jalan dakwah merupakan jalan yang sangat berat, penuh onak dan duri, penuh hambatan dan tantangan, penuh pihak-pihak yang tidak suka yang akan melakukan apa saja untuk memadamkan api dakwah tersebut. Allah SWT mensifati hal ini di dalam Al Qur'an dengan firman-Nya *"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan berbagai macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat (Al Baqarah, 214).* Ayat ini menunjukkan betapa beratnya ujian dalam berdakwah, bahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sempat bertanya kapan diturunkannya pertolongan Allah.

Dalam konteks kekinian, dalam bingkai dunia politik Indonesia, ujian dan cobaan tersebut tetap ada, termasuk di antaranya tantangan/sikap bermusuhan dari sebagian lawan atau kompetitor

Universitas Indonesia

dalam dunia perpolitikan. Selain tantangan yang bersifat umum terjadi di dalam dunia politik, para kader PK maupun PK Sejahtera terutama yang duduk di berbagai posisi di lembaga pemerintahan, baik eksekutif maupun yudikatif, juga seringkali menghadapi tantangan ketika menegakkan kebenaran di dalam lembaganya, terutama ketika kader PK Sejahtera menentang adanya praktek KKN.

Penentangan kader PK Sejahtera terhadap praktek kecurangan ini bukannya tanpa akibat, dalam beberapa kasus pembongkaran dan pencegahan korupsi, menyebabkan penculikan terhadap para politisi PK Sejahtera (Machmudi, 2006). Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah pembongkaran kasus dana *kadeudeuh* DPRD Jawa Barat yang dilakukan oleh Yudi Widiana, salah satu kader PK Sejahtera di DPRD Jawa Barat. Ketika membongkar kasus ini, Yudi Widiana baru menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat selama 6 bulan. Karena membongkar kasus ini, Yudi Widiana menghadapi banyak tentangan dan ancaman. Bahkan sampai sekarang jiwa Yudi Widiana masih terancam, namun ia menyatakan bahwa ia tidak takut terhadap berbagai ancaman yang datang, selama rakyat masih bersamanya (Waluyo, 2005).

Secara sosiologis, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep “role embracement”. Yaitu ungkapan keterikatan seseorang terhadap peranannya. *Role embracement* menunjukkan tingkat keterikatan pada peran sosial. sebagai kader PK Sejahtera, para kadernya merasakan bahwa mereka merupakan da’i-da’i yang bertugas mengajak rakyat Indonesia menuju spiritualitas Islam (Machmudi, 2006). Dengan peran ini, tidak heran kalau para kader PK Sejahtera tampak tidak gentar dalam membongkar berbagai kasus korupsi di berbagai tempat, meski harus menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Ketidagentaran ini datang dari kesadaran bahwa seluruh aktivitas mereka merupakan ibadah yang nantinya akan mendapat balasan dari Allah.

Universitas Indonesia

Akan halnya ujian atau cobaan yang berupa rayuan, mereka menjawab dengan menggunakan ayat ini, “*Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan oleh Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu*”(An Naml: 36). Jawaban ini menggambarkan kebulatan tekad mereka untuk tidak terjebak dengan bujuk rayu berupa materi dunia. Mereka meyakini bahwa materi dunia sangat tidak berarti dibandingkan balasan yang akan mereka terima dari Allah SWT. Demikian pula, materi dunia itu tidak akan menolong mereka dari siksa Allah SWT apabila mereka mengkhianati amanah yang diberikan.

4.2.3. Strategi Dakwah Partai Keadilan Sejahtera

Untuk mewujudkan visinya, PK Sejahtera kemudian menetapkan beberapa strategi yang diharapkan dapat menjadi sarana dalam mencapai visi tersebut. Sebagai partai dakwah, sejak awal PK Sejahtera sudah memosisikan dirinya tidak hanya bergerak di bidang politik, tetapi juga di berbagai bidang lainnya. Posisi ini diambil karena PK Sejahtera tidak hanya ingin mengubah Indonesia pada sisi politiknya saja, tetapi juga sisi-sisi lainnya, sehingga nilai-nilai Islam yang universal ditegakkan di Indonesia pada seluruh sisi yang ada. Secara umum PK Sejahtera menyatakan bahwa tujuan dari PK Sejahtera adalah melakukan transformasi bangsa pada bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Strategi yang diterapkan PK Sejahtera dalam transformasi bangsa tersebut yaitu gerakan kultural (strategi mobilitas horizontal) dan gerakan struktural (strategi mobilitas vertikal), yang disebut sebagai *grand strategy* transformasi bangsa (Madani, 2008). Gerakan kultural (strategi mobilisasi horizontal) dilakukan melalui penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk

menggalakkan peran serta masyarakat dalam mentransformasi diri sendiri. Dalam gerakan kultural ini, maka kader secara individual maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, yayasan/ormas dan berbagai lembaga/organisasi lainnya, melakukan pelayanan, penyuluhan dan perbaikan masyarakat secara *bottom-up*. Kader PK Sejahtera akan bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, kependudukan, kewanitaan, kemiskinan dan sebagainya. Karenanya, dibutuhkan dan harus ditumbuhkan kader-kader yang profesional dalam berbagai bidang kehidupan untuk dapat bergerak bersama masyarakat.

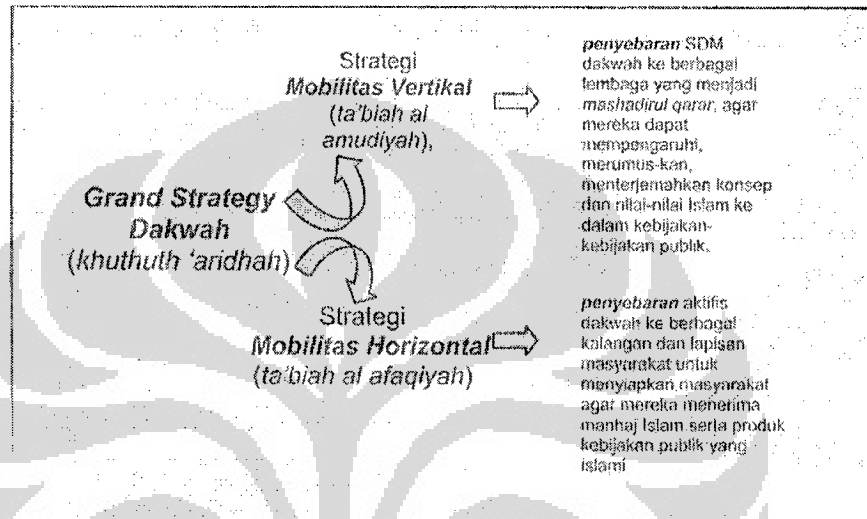
Sedangkan gerakan struktural (strategi mobilitas vertikal) adalah penyebaran kader ke dalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dan sektor-sektor lain dalam kerangka *melayani, membangun dan memimpin bangsa*, melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader. Tujuannya adalah untuk berkontribusi dalam membangun sistem, membuat kebijakan publik, regulasi dan perundangan yang secara struktural dan *top-down* digunakan sebagai pedoman dalam rangka transformasi masyarakat. Gerakan struktural ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa.

Grand Strategy transformasi bangsa yang diusung PK Sejahtera ini tidak lain dari kombinasi antara gerakan kultural dan struktural, kombinasi antara perubahan yang bersifat *bottom-up* dengan *top-down* yang merupakan ciri khas PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah. *Grand strategy* transformasi bangsa PK Sejahtera ini adalah suatu gerakan yang menyeluruh dalam berbagai sektor kehidupan (sektor publik, sektor swasta dan sektor ketiga) yang bertumpu pada kader dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi, dengan kekuatan integritas moral-religi dan kualitas-profesional. PK

Universitas Indonesia

Sejahtera sebagai Partai Dakwah berupaya mengoptimalkan kader dalam berbagai disiplin ilmu untuk berkembang dan berfungsi mendukung dan memperkuat gerakan kultural dan struktural transformasi bangsa (Madani, 2008).

Skema dibawah ini menggambarkan *Grand Strategy* yang dijalankan oleh PK Sejahtera.



Grand Strategy PK Sejahtera

Grand Strategy PK Sejahtera mencakup transformasi segala bidang, terutama tiga bidang utama, yaitu politik, ekonomi dan sosial-budaya. Transformasi tersebut dilakukan melalui penetrasi ke seluruh lapisan masyarakat, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal para kader melakukan pendekatan ke seluruh masyarakat dan secara vertikal melakukan pendekatan melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Transformasi dilakukan utamanya dengan cara mengubah cara pandang dan cara hidup seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, secara umum, salah satu strategi PK Sejahtera adalah melakukan internalisasi doktrin-doktrin Islam yang dimanifestasikan dalam kekuatan moral dan kepribadian sosial

(Machmudi, 2006). Dengan menginternalisasikan doktrin-doktrin Islam, maka doktrin-doktrin Islam tersebut akan menjadi pegangan hidup dan bahkan cara hidup. Pada akhirnya doktrin Islam tersebut akan menjadi kekuatan moral dan kepribadian sosial yang mengarahkan Indonesia kepada perubahan menjadi Indonesia yang lebih baik.

Kekuatan moral dan kepribadian sosial ini telah dicontohkan oleh kader-kader PK Sejahtera melalui berbagai cara dan pada berbagai kesempatan. Para kader PK Sejahtera juga telah menunjukkan kepeloporannya dalam mengatasi berbagai bencana alam di seluruh Indonesia bahkan hingga mancanegara, misalnya pada bencana banjir di Jakarta, tsunami Aceh, gempa-gempa di berbagai daerah di Indonesia, gempa di Pakistan dan lain sebagainya, kepeloporannya yang sama yang ditunjukkan ketika mereka menjalankan aksi kemanusiaan dalam berbagai krisis kemanusiaan, seperti di Aceh, Maluku, Afghanistan, Palestina, Irak dan lain sebagainya (Yusuf, 2003).

4.3. Prinsip Politik Partai Keadilan Sejahtera

Menurut Donald K. Emmerson, sejarah politik modern Indonesia dapat disederhanakan menjadi suatu pergulatan berkepanjangan untuk meraih kontrol atas negara dan dengan demikian untuk mendapatkan dasar utama untuk membentuk identitas bangsa. Untuk itu, ketika dirasa perlu, aktor-aktor elit telah membuat langkah-langkah mendadak untuk menahan gerakan lawan politiknya. Sebagian tindakan pencegahan ini berakibat buruk, menampakkan tanda-tanda menjauh dari hukum yang berlaku (Emmerson, 2001). Pendapat ini didasarkan pada praktik politik yang ada di Indonesia selama masa pemerintahan Soeharto, dimana praktik politik yang dijalankan hampir menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Selama tiga dekade dunia perpolitikan di Indonesia di dominasi oleh praktik politik seperti yang

digambarkan Emmerson tersebut, sehingga praktik politik semacam inilah yang tertanam di dalam pikiran masyarakat Indonesia.

Sejarah mulai berubah ketika pada tahun 1998 Soeharto tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaannya dan dipaksa mundur oleh kekuatan mahasiswa yang bersatu dengan kekuatan rakyat dan militer. Masa reformasi, demikian masa ini disebut, membawa banyak sekali perubahan pada kehidupan bangsa Indonesia, terutama pada kehidupan politiknya. Masa reformasi membuat praktik-praktik kecurangan yang lazim terjadi pada masa-masa sebelumnya terpankas hebat, meski tidak habis sama sekali. Berbagai bentuk pengawasan, baik oleh lembaga yang dibentuk khusus untuk itu maupun oleh lembaga independen, membuat para pelaku praktik kecurangan tidak lagi dapat bergerak bebas.

Pada masa inilah PK dan PK Sejahtera dilahirkan. Berlatar belakang para pemuda aktivis pembinaan kajian Islam, PK Sejahtera menunjukkan ciri-ciri sebagai partai yang berbeda dibanding partai-partai politik lainnya. Dengan beridentitaskan sebagai partai dakwah, PK Sejahtera tampil ke depan dengan gaya politik yang santun dan menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk di dalamnya korupsi dan kolusi yang sebelumnya lazim terjadi. Menurut PK Sejahtera, untuk mewujudkan perilaku berpolitik yang santun dan sesuai dengan perintah Allah, maka harus menggunakan etika sebagai acuan moral berpolitik (Madani, 2008).

Etikalah yang akan menjadi pengarah pergerakan perilaku politik, termasuk di dalamnya arah reformasi. Sebagian orang berpendapat reformasi sudah *kebablasan* karena mengagungkan kebebasan tanpa batas dan pada akhirnya mengarah pada anarki. Lebih jauh, pengamat melihat bahwa reformasi sulit untuk diterapkan bukan karena kebebasan yang dibawanya, tetapi karena sebagian pemikiran dan orang rezim orde baru masih berada di dalam lingkaran kekuasaan. Reformasi aparat dan birokrasi akan semakin sulit dilakukan apabila mereka telah membentuk sistem dan jaringan mereka sendiri, yang pastinya akan menolak datangnya perubahan (Eschborn et. al.,

2004). Untuk itulah diperlukan suatu perubahan yang terencana dengan baik dan harus dijalankan dengan konsekwen.

PK Sejahtera meyakini untuk melakukan transformasi secara menyeluruh, terlebih dahulu harus dilakukan perubahan terhadap moral atau etika politik pelakunya. Apabila moral atau etika pelakunya telah diubah, maka dapat dipastikan transformasi yang diharapkan akan dapat terwujud. Perbaikan moral atau etika pelakunya, dan juga masyarakat secara umum, dapat terwujud dengan diterapkannya nilai-nilai Islam dan dakwah dalam perilaku politik bangsa. PK Sejahtera menyatakan dirinya berdiri di garda terdepan dalam transformasi nilai-nilai dakwah dalam fungsi partai politik (Furkon, 2004). Ketika nilai-nilai dakwah telah tertransformasikan dalam fungsi partai politik, maka partai politik tersebut akan menggunakan nilai-nilai Islami dalam perilaku politiknya. Adapun pilar-pilar politik Islam yaitu:

- a. Lebih mengedepankan dan mengutamakan pelayanan daripada pendekatan kekuasaan
- b. Tanggung jawab bersama dalam mengelola negara
- c. Kebebasan yang bertanggung jawab
- d. Keadilan dan kesederajatan tanpa ada diskriminasi
- e. Keadilan yang merata
- f. Kemerdekaan yang terbimbing
- g. Hukum dan UU yang menjadi panglima

Pada saat sebagian masyarakat berpendapat bahwa agama sebaiknya dipisahkan dari politik, PK Sejahtera tanpa ragu-ragu menggunakan Islam sebagai azas partainya. PK Sejahtera berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sangat dekat mengasosiasikan dirinya dengan politik (Madani, 2008), sehingga perilaku politik yang paling baik adalah perilaku politik yang berlandaskan Islam. Sementara itu, terwujudnya salah

satu tujuan utama politik Islam yaitu terciptanya keadilan politik, sangat ditentukan oleh wujudnya kesatuan tersebut dalam konsep dan sistem politik serta aplikasinya. Hal itu menuntut adanya kekuasaan yang efektif, tanpa kekuasaan yang efektif dari negara, hukum dan agama dapat berada dalam bahaya Madani, 2008).

4.3.1. Konsepsi Politik Partai Keadilan Sejahtera

Untung Wahono, Kepala Biro Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS mengatakan bahwa inti dari politik adalah pengendalian (Wahono, diskusi). Dalam hal ini adalah pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan sebagaimana yang digariskan Allah. Tujuan dari politik dalam Islam adalah mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

PK Sejahtera berkeyakinan bahwa untuk mewujudkan keadilan politik maka politik keadilan mesti ditegakkan oleh pemerintah yang bersih dan baik dalam seluruh aspek kehidupan. Keadilan politik hanya mungkin diwujudkan apabila para pemegang kekuasaan dan rakyatnya berkomitmen terhadap penerapan hukum – hukum Allah, baik yang ada dalam wahyuNya atau yang ada dalam sunnatullah (Madani, 2008). Berangkat dari pemikiran ini, PK Sejahtera mengambil langkah – langkah untuk mewujudkan keadilan politik melalui politik keadilan tersebut. PK Sejahtera berpandangan bahwa untuk tegaknya politik keadilan tersebut harus dilakukan transformasi yang meliputi tiga bidang utama; politik, ekonomi dan sosial – budaya.

Menurut Dr Sri Mulyani, inti dari transformasi adalah reformasi birokrasi (Mulyani, diskusi). Birokrasi dikembalikan pada definisinya semula seperti yang dikemukakan Max Weber

(en.wikipedia.org), dimana sebagian cirinya adalah adanya pemisahan kepentingan pribadi dan kerja, serta adanya supervisi untuk mengontrol kerja secara hirarkis sehingga penyimpangan dapat diminimalisir.

PK Sejahtera berpendapat bahwa untuk menjaga agar fungsi birokrasi berjalan dengan sebenarnya, maka harus dijaga oleh nilai-nilai moral. Sebagaimana yang dikatakan oleh Vladimir Putin, *“We should govern by common sense, but, common sense should be based on moral principles”*.⁷ Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam, maka nilai-nilai moral yang paling cocok adalah nilai-nilai moral Islam yang universal, sehingga secara umum dapat dikatakan kerja PK Sejahtera sebenarnya mentransformasikan nilai-nilai Islam kedalam kehidupan bernegara yang plural (Azra, diskusi).

Dalam literatur politik Islam klasik, disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah, bahwa pelaksanaan hukum Islam tidak mungkin dapat dilepaskan dari kekuasaan politik, oleh karena itu implementasi hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa kekuasaan dan otoritas politik (termasuk di dalamnya penegakan keadilan dan pembelaan terhadap kelompok-kelompok marjinal) (Furkon, 2004). Hal inilah yang mendasari pemikiran para kader PK Sejahtera untuk membentuk sebuah partai sebagai wadah perjuangan mereka didalam dunia politik.

Dari sisi ini dapat dipahami maksud kalimat Dr. Hidayat Nur Wahid, bahwa bersandingnya dakwah dan kekuasaan bukan suatu hal yang aneh (Wahid, diskusi). Orientasi mereka memasuki dunia politik, bukanlah hanya mengejar kekuasaan. Kekuasaan bagi mereka hanyalah sebagai alat pelaksanaan hukum Islam. Namun perlu digaris bawahi disini bahwa yang dimaksud pelaksanaan hukum Islam bagi PK Sejahtera bukanlah dalam bentuk pelaksanaan syariah dan hudud

⁷ Sebagaimana dikutip Wahfiudin, dalam wawancara di acara Khazanah

(hukum pembalasan dalam Islam), namun penegakkan nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

Dalam platformnya, PK Sejahtera menyebutkan bahwa platform politik nasional PK Sejahtera yaitu memelopori reformasi bidang politik, birokrasi, peradilan dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi (Madani, 2008). Meski memproklamkan dirinya sebagai partai dakwah, sejatinya PK Sejahtera tetaplah merupakan partai politik yang bagian dari tugasnya adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu PK Sejahtera tetap berkomitmen pada tujuan sebagai partai politik, yaitu penguatan demokrasi yang pada akhirnya akan berujung pada konsolidasi demokrasi. Menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra, apabila berbicara mengenai konsolidasi demokrasi, berarti berbicara mengenai *civil society*. Cita-cita PK Sejahtera dapat disebut sebagai *Islamic based civil society* (Azra, diskusi).

4.3.2. Aktivitas Politik Partai Keadilan Sejahtera

Penyebutan aktivitas politik disini bukan sebagai pemisahan antara aktivitas politik dengan aktivitas lainnya. Karena PK Sejahtera memproklamkan dirinya sebagai partai dakwah, adalah penting karenanya membahas aktivitas PK Sejahtera yang sarat dengan muatan 'politis', meskipun PK Sejahtera meyakini seluruh aktivitasnya merupakan bagian dari dakwah.

Sebagai partai politik, sudah tentu kegiatan utama PK Sejahtera adalah berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun eksekutif (pilkada). Bagi PK Sejahtera, pemilu merupakan jalan tembus (*short cut*) untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan di tengah bangsa ini (Yusuf, 2003). Secara umum

krisis kepemimpinan dapat diatasi dengan melakukan pembinaan sehingga kemudian muncul pemimpin-pemimpin baru dengan kapasitas yang baik dan memiliki nilai moral yang tinggi. Pemilu adalah jalan tembus menempatkan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki kapasitas dan nilai moral, tanpa harus memakan waktu lama membina pemimpin yang sudah ada, yang tentunya akan lebih sulit.

Cornelis Lay menyatakan bahwa masalah rata-rata negara yang terpaksa harus melalui proses transisi adalah problema ketiadaan legitimasi dan kepercayaan publik atas institusi, aturan main dan mekanisme yang dibangun. Berdasarkan pengalaman, kedua krisis ini, krisis legitimasi dan krisis kepercayaan, dapat diakhiri dengan diselenggarakannya pemilu, dengan syarat pemilu tersebut dilangsung secara jujur, adil dan jauh dari kekerasan (Lay, 2006). Hal ini sejalan dengan apa yang diyakini oleh PK Sejahtera.

Dalam platform perjuangan yang disusunnya, PK Sejahtera telah menetapkan misi utama perjuangan politiknya adalah transformasi Indonesia dalam tiga bidang strategis; politik, ekonomi dan sosial-budaya, yang dirumuskan dalam tiga kata jargon utamanya; adil, sejahtera dan bermartabat (Iman, diskusi). Dalam melaksanakan transformasi tersebut, diingatkan bahwa gagasan partai mengenai transformasi masyarakat harus sesuai dengan bahasa dan kadar masyarakat yang akan ditransformasikan (Iman, diskusi). Sehingga masyarakat dapat lebih mengerti dan menerima gagasan tersebut, dan pada akhirnya terjadi transformasi yang diharapkan.

Menurut Ust. Hilmi Aminuddin, ketua MPP DPP PK Sejahtera, transformasi Indonesia telah mulai berjalan, hal ini terlihat misalnya dari demokratisasi politik yang sudah mulai terarah, meski masih perlu adanya pertumbuhan dan pendewasaan. Dalam rumusan Islam, pertumbuhan dan pendewasaan ini disebut sebagai orang yang *shabbarin syakuur*, orang yang bersabar dan beryukur (Aminuddin,

Universitas Indonesia

2006). Terutama sekali terkait dengan hasil pilkada-pilkada yang digelar di berbagai daerah, yang sebagian diantaranya ternyata bermasalah.

Hasil lainnya dari transformasi yang dicita-citakan oleh PK Sejahtera adalah penanaman nilai-nilai Islam yang universal yang senantiasa digaungkannya. Sebagai partai dakwah, PK Sejahtera berkeyakinan bahwa nilai-nilai Islam harus tertanam di dalam diri setiap anggota masyarakat, terutama para pemimpinnya yang duduk di berbagai lembaga pemerintahan. Hal ini akan menciptakan pribadi-pribadi yang baik dan senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan tercela seperti korupsi dan lain sebagainya.

Hal inilah yang dinamakan Paradigma Baru Politik Islam, yaitu keniscayaan Islam sebagai ideologi alternatif, bukan hanya sekadar agama yang mengatur kehidupan di akhirat kelak, melainkan juga sumber ajaran yang harus diyakini kebenarannya di dalam menyelamatkan umat manusia di dunia. Dengan merujuk kepada ajaran Islam, dan menjalankannya secara *kaffah*, niscaya segala macam bentuk kemungkaran, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan korupsi, kolusi dan nepotisme akan dapat diakhiri (Maulani, 2003).

Seorang pengamat Indonesia menyatakan bahwa kebangkitan Islam di Indonesia terutama berhubungan dengan kualitas, bukan kuantitas, dimana terjadi penguatan substansi secara internal, bukannya hanya pada semakin banyaknya yang berpindah agama ke Islam. secara jumlah, agama Kristenlah yang jumlahnya berkembang sangat pesat di Indonesia selama kurun waktu 1971-2001 (Emmerson, 2005). Perlu diingat bahwa pembinaan-pembinaan yang dilakukan PK Sejahtera pada hakikatnya adalah proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan obyek dakwahnya. Hal ini sudah mulai menampakkan hasil, dimana terlihat adanya peningkatan

Universitas Indonesia

pengejawantahan Islam dalam kehidupan muslimin Indonesia, baik pada area publik maupun pribadi. Analisa lebih lanjut menyatakan bahwa apabila Indonesia tetap demokratis, identitas nasionalnya dapat menjadi lebih Islami (Emmerson, 2005), meski tidak terjebak pada bentuk negara Islam.

Sebagai partai politik yang mengusung Islam sebagai dasarnya dan memproklamkan diri sebagai partai dakwah, PK Sejahtera sering menghadapi tuduhan sebagai kelompok yang eksklusif. Tuduhan eksklusifitas ini sudah melekat sejak masa gerakan tarbiyah belum bertransformasi menjadi partai politik. Sebagai partai politik yang bergerak di tengah masyarakat Indonesia yang plural, PK Sejahtera menghadapi tantangan untuk menjawab tuduhan tersebut. Menurut Dr Hidayat Nur Wahid, PK Sejahtera tidaklah eksklusif, yang dibuktikan dengan melakukan koalisi dengan berbagai partai di berbagai daerah ketika meramaikan pilkada. Ketika melakukan koalisi, PK Sejahtera mengajukan suatu kontrak politik dengan pihak rekannya sehingga tidak terjebak pada eksklusifitas negatif maupun inklusifitas tanpa makna (Wahid, diskusi).

Selain agar tidak terjebak pada eksklusifitas negatif maupun inklusifitas tanpa makna, kontrak politik juga berguna untuk menjaga agar tindakan PK Sejahtera tetap sejalan dengan misi yang dicitacitakannya meski berkoalisi dengan pihak lainnya. Dalam kontrak politik yang dibuat, diantaranya menyatakan bahwa pihak rekannya bersedia mengusung nilai-nilai Islam yang diperjuangkan PK Sejahtera.

Untuk semakin mengokohkan gerak perjuangannya dan memperkuat citra di hadapan masyarakat, PK Sejahtera kemudian menyusun platform kebijakan pembangunan yang berisi cita-cita dan arah masa depan Indonesia yang diidamkan PK Sejahtera. Menurut Dr Sri Mulyani, penyusunan platform merupakan suatu hal yang jarang

Universitas Indonesia

dilakukan oleh sebuah partai politik, sehingga hal ini harus diapresiasi. Pada pemilu 1999, tidak ada satu partai pun yang mempersiapkan platform kebijakan lokal. Kemungkinan hal ini karena pemilu Juni 1999 diselenggarakan kurang dari dua bulan setelah diundangkannya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, sehingga partai-partai politik tidak mempunyai waktu menyusun platform tersebut (ADB, 2004). Kenyataan hari ini memperlihatkan, hampir sepuluh tahun sejak dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999, baru PK Sejahtera yang menyusun platform kebijakan pembangunan. Paling tidak, baru PK Sejahtera yang mengumumkan platformnya secara terbuka.

Sebagai partai politik, dan partai pendukung pemerintah, PK Sejahtera juga berkewajiban menjadi 'corong' menyuarakan kepentingan masyarakat. Apalagi kenyataan memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia masih tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan publiknya. Dua masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah penegakan hukum yang masih payah dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Padahal komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian dan persepsi bersama mengenai masa depan Indonesia (Eschborn et. al., 2004). Di sisi inilah PK Sejahtera harus hadir dan menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah.

4.4. Pemuda, Pemimpin dan Kepemimpinan Pemuda dalam Partai Keadilan Sejahtera

4.4.1. Pemuda: *Core Business* Partai Keadilan Sejahtera

Jauh sebelum Partai Keadilan ataupun Partai Keadilan Sejahtera dideklarasikan, sebenarnya sudah terdapat entitas pemuda yang memiliki kepedulian besar terhadap pembinaan sumber daya

manusia dan pembangunan moral Indonesia. Entitas ini bergerak “dibawah tanah” dan membentuk komunitas-komunitas yang, seperti efek bola salju, terus membesar. Kepedulian mereka terhadap pembinaan moral bangsa terlihat dari empat prinsip kerja pembinaan yang mereka lakukan, yaitu menyadarkan, mencontohkan, menyeru dan membentuk kepribadian (Madani, 2008).

Cara kerja pembinaan yang mereka lakukan yaitu pertama dengan menyadarkan obyek dakwahnya mengenai eksistensi mereka, mengenai peran penting mereka, mengenai posisi mereka di mata bangsa dan agama. Hal ini dilakukan agar mereka menyadari bahwa mereka memiliki potensi yang besar dan agama dan negara menunggu mereka menggunakan potensi-potensi tersebut bagi kejayaan agama dan negara. Untuk dapat lebih menggugah obyek dakwah yang mereka tuju, mereka menggunakan prinsip keteladanan. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT di dalam Al Quran, agar dalam berdakwah menggunakan hikmah dan orang yang mengajak harus menjadi orang yang pertama yang melaksanakan ajakannya, maka mereka menjadi contoh-contoh bagi para obyek dakwah mereka. Bentuk ajakan dengan keteladanan seperti ini ternyata mampu memberikan kesan yang cukup dalam pada obyek-obyek dakwah mereka.

Sesudah mereka menyadarkan dan mencontohkan, mereka kemudian menyeru obyek dakwah mereka untuk bergabung bersama di dalam barisan mereka. Melalui cara ini cukup banyak orang yang dapat direkrut oleh mereka. Barulah kemudian mereka membentuk kepribadian-kepribadian sebagaimana yang diharapkan, orang-orang dengan kepribadian seperti yang mereka istilahkan sebagai *generasi rabbani*. Generasi rabbani merupakan generasi yang memiliki karakter ketuhanan yang kuat, memiliki gerak langkah yang disesuaikan dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan rasul-Nya.

Gerak langkah mereka saat itu sedikit terbatas, namun terdapat benang merah yang menghubungkan tempat-tempat dimana mereka merekrut obyek dakwah mereka: obyek-obyek dakwah mereka merupakan pemuda-pemuda dari berbagai kalangan yang memiliki kepedulian terhadap agama dan bangsa ini. Perekrutan terutama diarahkan kepada para pelajar, para mahasiswa, dan para pemuda dari berbagai latar belakang, karena mereka memahami benar potensi besar yang dimiliki oleh tiap pemuda. Kaum muda menempati posisi vital yang menentukan arah perubahan bangsa. Dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lainnya, terlihat bagaimana peran pemuda cukup sentral sebagai inisiator dan penggerak revolusi sosial (Madani, 2008).

Syaikh Asy Syahid Hasan Al Banna, pendiri jamaah Ikhwanul Muslimin di Mesir, menyatakan bahwa sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan, pemuda merupakan rahasia kekuatannya. Dalam setiap pemikiran, pemuda adalah pengibar panji-panjinya (Al Banna, 2005). Jepang mengenal pemuda Meiji, kaisar yang menggerakkan restorasi Jepang hingga dalam waktu yang relatif singkat Jepang dapat menjadi negara yang sangat kuat. Idenya untuk memadukan teknologi modern dengan nilai-nilai luhur budaya Jepang terbukti kemudian menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan Jepang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kenyataan-kenyataan inilah yang menjadi alasan mengapa PK Sejahtera sangat memperhatikan para pemuda dan menjadi mereka obyek dakwah utamanya.

Pada awalnya, dapat dikatakan bahwa para pendukung PK Sejahtera sebagian besar berawal dari pemuda-pemuda yang tergabung di dalam Rohis ataupun LDK/LDS (Lembaga Dakwah Kampus/Lembaga Dakwah Sekolah). Namun seiring berjalannya waktu, basis dukungan PK Sejahtera di kalangan pemuda semakin meluas, tidak hanya pada pemuda-pemuda dengan latar belakang

Universitas Indonesia

religijs-agamis, namun juga pemuda dari berbagai latar belakang. Saat ini basis dukungan PK Sejahtera selain berasal dari Rohis dan LDK/LDS juga berasal dari BEM, KAMMI, pemuda lingkungan, pelajar/mahasiswa umum dan lain sebagainya (Firdaus, wawancara).

Dalam melakukan perekrutan, PK Sejahtera menggunakan “ilmu marketing” terapan, yaitu dengan adanya segmentasi, targeting, positioning dan seterusnya. Sarana perekrutan misalnya dengan pendekatan kepada anggota-anggota majelis taklim, mendirikan berbagai klub, perkumpulan bela diri (seperti Thifan Po Khan), kepanduan, kursus serta berbagai kegiatan seni budaya (seperti teater, nasyid dan lain-lain) (Firdaus, wawancara). Dalam melakukan perekrutan dan pengkaderan, PK Sejahtera menggunakan pendekatan yang berbeda-beda kepada obyek dengan kultur yang berbeda-beda pula, PK Sejahtera tidak mengenal cara yang kaku dalam melakukan pengkaderan.

Salah satu target utama pengkaderan PK Sejahtera adalah para mahasiswa. Hal ini kemudian memunculkan tudingan sebagian orang mengenai politisasi mahasiswa. Menurut PK Sejahtera sejak tahun 60-70an, bahkan sejak awal kemerdekaan, mahasiswa Indonesia sudah berpolitik, dalam artian memiliki afiliasi dengan partai politik. Dahulu, Indonesia mengenai GMNI yang berafiliasi dengan PNI, CGMI yang berafiliasi dengan PKI, dan lain sebagainya. PK Sejahtera memandang permintaan agar mahasiswa hanya belajar dan melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya sebagai mata rantai yang hilang dalam sejarah dunia kemahasiswaan Indonesia (Pratama, wawancara).

Meskipun demikian, PK Sejahtera menganggap berkecimpungnya mahasiswa dalam dunia politik tetap harus memiliki koridor, yaitu (Firdaus, wawancara)

1. Dalam melakukan kegiatan jangan sampai memorduakan kegiatan akademis, apalagi sampai berakibat prestasi belajar (Indeks Prestasi) menurun atau jatuh.
2. Tidak menggunakan kekerasan atau anarki.
3. Tidak menjalankan kegiatan terbuka untuk mengajak orang untuk memilih partai politik tertentu di dalam kampus

4.4.2. **Posisi Pemuda dalam Gerakan dan Aktivitas Partai Keadilan Sejahtera**

Sejak dimulainya ‘gerakan tarbiyah’ pada sekitar awal tahun 1980-an, para pemudalah yang menjadi fokus pembinaan yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat pada pola rekrutmen yang mereka lakukan. Rekrutmen dilakukan dengan menggunakan pola bola salju. Setiap orang bertanggung jawab untuk merekrut kelompok binaan yang tiap kelompok terdiri atas sekitar 8-10 orang. Hal ini diyakini merupakan pengejawantahan perintah Allah untuk berdakwah, sehingga masing-masing orang memiliki kewajiban yang sama untuk perekrutan.

Target perekrutan terutama difokuskan kepada para pemuda, baik yang berada pada sekolah menengah atas, kampus ataupun pemuda-pemuda lainnya, baik yang berada di LSM, yayasan ataupun lembaga-lembaga lainnya. Para aktivis gerakan tarbiyah, yang kemudian bertransformasi menjadi PK (Sejahtera), menyadari bahwa pemuda merupakan salah satu sumber daya utama bangsa. Sebagai salah satu sumber daya utama bangsa, pemuda mampu mengerjakan hal-hal luar biasa termasuk sebagai faktor perubahan yang fundamental. Di tangan pemuda terletak nasib umat dan dalam keberaniannya terletak hidup bangsa.

Dalam platformnya, PK Sejahtera menyatakan platformnya mengenai kepeloporan pemuda dalam kalimat membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya dan mempersiapkan sebagai calon pemimpin bangsa.⁸ PK Sejahtera memandang pemuda sebagai calon pemimpin bangsa yang harus dipersiapkan untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan negeri ini. Sebagai calon pemimpin bangsa, pemuda tidak bisa hanya dibiarkan saja untuk mengembangkan kompetensinya masing-masing, potensi para pemuda tersebut harus pula dikembangkan

Selain sebagai calon pemimpin bangsa, PK Sejahtera juga memandang pemuda sebagai *anasir at taghyir, agent of change* (agen perubah). Pemuda sebagai agen perubah merupakan pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral (Madani, 2008). Di tangan pemuda adalah letak masa depan bangsa ini. Apakah bangsa ini akan mengalami masa kegemilangan ataukah kehancuran, di tangan pemuda adalah masa depan itu berada. Apakah masalah sosial di negeri ini akan menghilang dan moral bangsa semakin tinggi dan membaik, atau sebaliknya, masalah sosial semakin memburuk dan moral bangsa semakin terpuruk, di tangan para pemuda pulalah arah bangsa ini berada.

4.4.3. Gerak Pemuda Partai Keadilan Sejahtera

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa PK Sejahtera merupakan transformasi dari gerakan tarbiyah yang dalam perekrutannya menitikberatkan pada pemuda, baik yang berasal dari kampus, sekolah, LSM ataupun organisasi-organisasi lainnya. Ketika keran keterbukaan dimulai pada tahun 1998, gerakan ini turut pula menggunakan momentum yang sama untuk mendirikan sebuah partai

⁸ Madani, hal. 19-20

sebagai sarana perjuangan politik mereka. Maka pada tahun 1999, dideklarasikanlah Partai Keadilan yang basis dukungannya berasal terutama dari para pelajar dan mahasiswa. Ini terlihat misalnya dari wajah-wajah yang hadir saat deklarasi partai tersebut di lapangan masjid Al Azhar Jakarta Selatan pada tahun 1999. Wajah-wajah yang hadir didominasi oleh wajah-wajah muda yang kalau ditaksir rata-rata usianya berkisar antara 20-30 tahunan.

Menjelang kejatuhan rezim Soeharto, muncul satu organisasi mahasiswa yang kemudian turut aktif, bahkan menjadi salah satu garda terdepan, dalam demonstrasi-demonstrasi menuntut reformasi, organisasi itu bernama KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Sudah bukan rahasia kalau kelahiran dan kepengurusan KAMMI sebagian besar digawangi oleh para aktivis gerakan tarbiyah. Karenanya, tidaklah mengherankan kalau kemudian banyak aktivis KAMMI yang menjadi pengurus PK (Sejahtera) ketika partai tersebut didirikan. Termasuk di dalam aktivis KAMMI yang bergabung dengan PK Sejahtera adalah Fahri Hamzah, mantan Ketua Umum dan salah satu pendiri KAMMI, yang sekarang duduk di bangku DPR RI sebagai utusan PK Sejahtera.

Meski demikian, KAMMI tetaplah bukan organisasi *underbow* PK Sejahtera. Meski secara kultural KAMMI memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan PK (Sejahtera), secara struktural organisasi KAMMI tetap tidak memiliki hubungan apapun dengan PK Sejahtera (Furkon, 2004). Dalam berbagai kegiatan dan aksi yang dilakukannya, KAMMI tidak pernah mengatasnamakan PK Sejahtera ataupun sebaliknya, dan sepanjang pengamatan penulis, PK Sejahtera dan KAMMI belum pernah mengadakan demonstrasi bersama. Masing-masing menjalankan kegiatannya masing-masing, bahkan meski agenda yang diusungnya sama.

Namun demikian, penulis tetap menyoroti dimensi kultural emosional keduanya yang berhubungan cukup erat. Ini artinya, keduanya memiliki pandangan dan pemikiran yang relatif sama. Bahkan sebagian bentuk kegiatannya pun relatif sama, misalnya bakti sosial, pengobatan gratis, dan lain-lain.

Adanya hubungan kultural emosional KAMMI dengan PK Sejahtera menunjukkan adanya pergeseran basis massa partai Islam. Selama ini basis massa partai Islam identik dengan daerah pesantren dan pedesaan dimana dimensi agama relatif masih dipegang kuat oleh penghuninya. Sementara pada kasus PK Sejahtera yang terang-terangan memproklamkan diri menggunakan Islam sebagai asasnya, basis massa yang dimiliki berada pada kisaran pemuda yang berasal dari masyarakat perkotaan dan dunia kampus yang merupakan cermin dari masyarakat modern (Maulani, 2003).

Menurut hemat penulis, basis massa yang dimiliki PK Sejahtera menunjukkan gaya pemikiran mereka yang lebih modern dan maju. Meskipun menggunakan agama sebagai asasnya, tampak bahwa PK Sejahtera memiliki pemikiran yang lebih modern dibandingkan partai-partai Islam ataupun partai berbasis massa Islam lainnya, yang bergaya lebih konservatif. Dari segi prakteknya pun, PK Sejahtera memperlihatkan gaya yang berbeda. Praktek politiknya tidak hanya terbatas pada praktek partai politik umumnya yang baru bergerak menjelang pemilu lima tahunan, namun PK Sejahtera bergerak secara terus menerus dan berkesinambungan.

Para kader PK Sejahtera meyakini bahwa setiap aktivitas mereka merupakan ibadah dan dalam rangka berdakwah, menyeru kepada Allah. Bahkan politikpun merupakan bagian dari dakwah, sehingga dapat bernilai ibadah. Untuk itu para kader PK Sejahtera meyakini bahwa praktek politik yang Islami yang mereka lakukan, dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat, sehingga fungsi

pendidikan politik yang seyogianya dijalankan partai politik dapat berjalan bahkan melalui kegiatan sehari-hari. Karena menurut mereka agama tidak dapat dipisahkan dari politik, sehingga praktek kehidupan mereka sehari-hari juga merupakan bagian dari praktek politik mereka.

Secara khusus, pendidikan politik ini juga mereka lakukan melalui metode *direct selling*, yang intinya adalah gerakan silaturahmi, membuka wilayah-wilayah baru dan kader baru secara proaktif baik melalui jalur silaturahmi tingkat keluarga besar maupun silaturahmi kepada para tetangga dan individu-individu (Edward, 2006). Bahkan walaupun orang yang didatangi tidak menyambut baik ajakan mereka, mereka tetap berpendapat bahwa itu adalah bagian dari pendidikan politik, karena mereka sudah menyampaikan cara mereka berpolitik, dan bagi mereka hal itu juga tetap bernilai ibadah.

Menurut Antlov, masyarakat harus dipolitisasi dengan menggunakan bentuk “politik rendah” dalam kehidupan sehari-harinya. Indonesia harus mulai membangun kembali kehidupan politiknya dan institusi-institusi dasarnya. Politik harus dibangun dari bawah, karena disinilah diaman terdapat kekuatan sosial yang paling padat, dimana terjadi rekrutmen politik dan pembangunan konstituen, dimana orang dapat menterjemahkan kebijakan nasional menjadi program lokal, dan dimana isu-isu lokal menjadi ideologi nasional (Spinall & Fealy, 2003). Dari sisi ini, dapat dipahami bahwa praktek yang dilakukan para kader PK Sejahtera merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dalam bentuk politik rendah. Hal inilah yang sangat jarang dilakukan, kalau tidak mau dikatakan tidak pernah dilakukan, oleh partai-partai lainnya.

Sebagai partai baru, PK Sejahtera ingin membawa suasana baru lewat kader-kader maupun jurkamnya (juru kampanye). Mungkin mereka banyak belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana jurkan

parpol bukan menggunakan kampanye sebagai media pembelajaran politik rakyat, tetapi hanya untuk mengumbar janji-janji dan slogan-slogan yang notabene pepesan kosong. Untuk itu PK Sejahtera menyiapkan jurkam yang umumnya para calon anggota legislatif (caleg) – pada pemilu 2004 – dimana jurkam tersebut terdiri atas 92% kader muda berusia dibawah 40 tahun, sisanya berusia diatas 50 tahun (Edward, 2006).

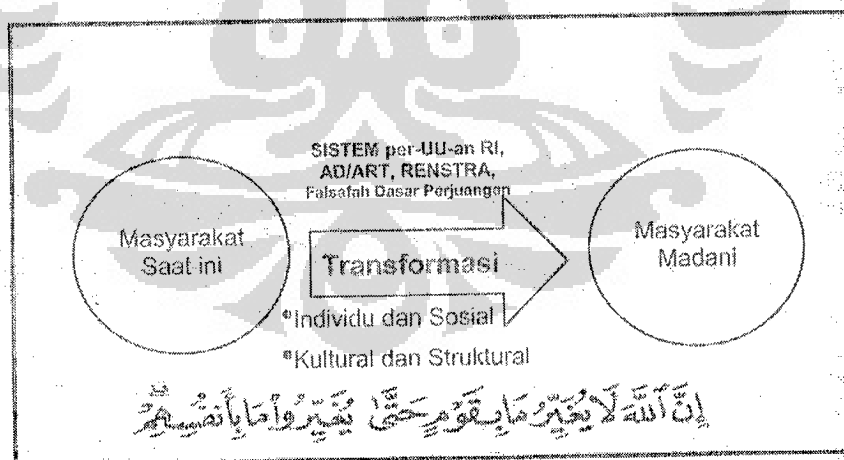
Praktek politik para pemuda kader PK Sejahtera ternyata cukup memikat masyarakat. Di tengah gegap gempita kampanye partai-partai lainnya yang umumnya banyak memberikan janji dan baru mendekat kepada rakyat setelah lima tahun, masyarakat melihat adanya alternatif pilihan yang lebih menjanjikan. Para kadernya sibuk dengan kepedulian sosial nyata, dengan begitu mereka berhasil menarik simpati kaum muda terpelajar yang idealisme masih tinggi. Sehingga sebagian masyarakat mulai berpaling ke sebuah partai yang pada Pemilu 1999 tak lulus ET dan terpaksa mengganti nama untuk dapat mengikuti pemilu 2004 (Karman, 2004). Kepada PK Sejahtera dan kader-kader mudanya mereka mulai menggantungkan harapan, harapan akan perubahan Indonesia yang lebih baik. Sastrawan terkemuka, Ajip Rosidi menyatakan bahwa ia pernah menulis surat kepada teman-temannya, bahwa ia menyukai Partai Keadilan (Sejahtera) – walaupun ia tidak mengenal salah satu pengurusnya – karena dari berita-berita yang ia baca. Menurut Ajip Rosidi dalam rencana partainya mereka ingin mengedepankan moralitas bangsa daripada memperebutkan kekuasaan (15 Tokoh, 2004).

BAB 5

PEMUDA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PERUBAHAN SOSIAL – POLITIK DI INDONESIA

5.1. Mengenai Partai Keadilan Sejahtera dan Perubahan Sosial – Politik di Indonesia

Dalam piagam deklarasinya, disebutkan bahwa pendirian PK merupakan respon terhadap perubahan sosial yang terjadi di awal reformasi (Furkon, 2004). Para pendiri PK Sejahtera menangkap potensi yang besar untuk melakukan perubahan dalam era reformasi yang menjelang. Ketika masih berwujud gerakan tarbiyah, para aktivisnya merupakan orang-orang yang bergerak melakukan perubahan melalui berbagai pembinaan yang mereka lakukan. Mereka meyakini bahwa dengan membina masyarakat, terutama pemuda, maka diharapkan dalam jangka waktu sekitar 15-20 tahun kedepan akan terjadi perubahan yang cukup mendasar di Indonesia terutama sekali dari segi pemikiran dan nilai-nilai moral yang dipegang teguh.



Hakikat Dakwah

Bagan diatas memperlihatkan hakikat perubahan yang dilakukan oleh PK Sejahtera. Mereka meyakini bahwa dakwah yang mereka lakukan

pada hakikatnya merupakan usaha untuk mentransformasi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang mereka idamkan.

Konsep yang mereka usung dalam perubahan tersebut yaitu pembinaan pribadi untuk kemudian mengubah *minhaj* atau pola pikir. Perubahan yang mereka lakukan merupakan perubahan yang bersifat gradual, tahapan-tahapan dari perubahan tersebut yaitu *binaa al syakhsiyyah al islamiyyah, binaa ul usrah, binaa ul mujtama'*, *daulah islamiyyah, khilafah islamiyyah* dan *ustadziyatul 'alam*. Pembinaan yang mereka lakukan merupakan tahapan-tahapan yaitu; membina kepribadian islamiyah, membina keluarga, membina masyarakat, negara Islam, kekhilafahan islam dan pada akhirnya menjadi soko guru bagi alam semesta. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebenarnya sejak awal kerja besar para aktivis gerakan tarbiyah, yang kemudian bertransformasi menjadi PK Sejahtera, adalah melakukan perubahan pada masyarakat Indonesia, terutama pada bidang sosial.

Misi utama PK Sejahtera adalah melakukan transformasi pada tiga bidang strategis, yang pada intinya adalah melakukan transformasi pada institusi masyarakat. Menurut PK Sejahtera, institusi sosial yang adil akan mempengaruhi struktur dasar masyarakat yang di dalamnya terkandung berbagai posisi sosial dan cita-cita kedepannya (Madani, 2008). Dari sini dapat dipahami bahwa letak perubahan yang diinginkan PK Sejahtera sebenarnya terletak pada institusi masyarakat itu sendiri. Dengan perubahan atas institusi sosial dan politik masyarakat, maka seluruh masyarakat mau tidak mau akan mengikuti arah perubahan tersebut. Dalam hal ini, PK Sejahtera menginginkan institusi sosial masyarakat berubah ke arah yang islami, dalam artian menerapkan nilai-nilai Islam yang universal.

Menurut Bourdier, masalah-masalah yang terdapat dalam pemerintahan Orde Baru adalah (Bourdier (eds.), 2003):

- o Perekonomian tumbuh dengan baik, tapi masalah kemiskinan dan pengangguran tetap ada

Universitas Indonesia

- Korupsi tetap bercokol dan memburuk setiap tahun
- Proses demokratisasi tidak memadai

Meskipun Orde Baru itu sendiri telah tumbang, namun warisan pemerintahannya ternyata masih bercokol. Masalah kemiskinan, pengangguran dan korupsi masih merupakan masalah yang krusial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Praktis, dapat dikatakan bahwa hanya proses demokratisasi yang sudah berjalan cukup baik. Proses demokratisasi ini dimulai sejak era pemerintahan Prof. Dr. BJ Habibie (1999-2000), ditandai dengan pemilu multi partai yang dinilai berlangsung cukup demokratis, pada tahun 1999. Menurut Huntington, demokratisasi harus dibangun melalui cara – cara yang demokratis, dengan ciri-ciri (Furkon, 2004):

- Berlakunya sistem pemilu yang jujur
- Hidupnya oposisi
- Tidak terjadi kekerasan dalam penyampaian artikulasi politik

Inilah yang sedang terjadi pada dunia perpolitikan Indonesia, proses transisi menuju negara yang demokratis.

Warisan pemerintahan orde baru masih dapat bercokol karena birokrasi pemerintahan itu sendiri belum banyak berubah. Proses atau alur dalam tata pemerintahan masih mengikuti gaya pemerintahan orde baru, dengan berbagai alur yang rumit dan “uang administrasi” yang tetap harus disediakan untuk memperlancar urusan di berbagai lembaga pemerintahan. Selama berpuluh tahun, bahkan sejak bangsa ini berdiri, birokrasi tidak pernah diletakkan sebagai alat pembangunan, bukan penyedia layanan, penyedia lisensi dan penyerap sumber daya masyarakat semata (Hisyam, 2005). Meskipun setelah reformasi telah banyak dilakukan perubahan, namun secara umum praktek tata kelola pemerintahan masih belum jauh berubah.

Sebagai bagian dari solusi yang ditawarkan PK Sejahtera untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran Indonesia, PK

Universitas Indonesia

Sejahtera menyatakan bahwa prinsip persamaan harus dijadikan tiang pancang struktur sosial Indonesia (Madani, 2008). Masalah kemiskinan pada hakekatnya timbul karena tidak adanya persamaan atau kesetaraan di antara masyarakat Indonesia. Kesenjangan pendapatan antara pimpinan dan bawahan terlalu besar menjadikan jurang sosial semakin dalam. Untuk itulah PK Sejahtera mengajukan penerapan nilai-nilai Islam yang universal sebagai jalan keluar permasalahan yang dihadapi Indonesia, seperti prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan.

5.2. Metode Perubahan Partai Keadilan Sejahtera

Vladimir Putin, salah seorang mantan pemimpin Rusia, pernah mengatakan, *'we should govern by common sense, but, common sense should be based on moral principles'* (Wahfiudin, 2008). Bahkan pemimpin negeri komunis sekalipun mengatakan bahwa dalam memerintah harus menggunakan prinsip-prinsip moral. Prinsip-prinsip moral tersebut diperlukan untuk menjaga perilaku agar tidak keluar dari rel etika. Menurut Dr. Greg Fealy, PK Sejahtera menjadikan moralitas dalam kehidupan publik sebagai program utama politik. PK Sejahtera relatif (walaupun tidak seluruhnya) bebas dari "money politics" dan secara keras menerapkan aturan anti korupsi (Machmudi, 2006). Hal ini termasuk ke dalam faktor keberhasilan PK Sejahtera dalam melakukan transformasi masyarakat. Melalui contoh atau keteladanan yang ditunjukkan para kader PK Sejahtera, banyak masyarakat yang kemudian terpicat dengan aksi-aksi para kader PK Sejahtera dan kemudian memilih bergabung dengannya.

Apabila disebutkan bahwa ukuran sejati kepemimpinan adalah pengaruh (Maxwell, 2001), maka kenyataan memperlihatkan kepemimpinan para kader PK Sejahtera mulai mendapatkan tempatnya di tengah masyarakat. Terlepas dari adanya tuduhan-tuduhan bahwa PK Sejahtera merupakan kelompok yang eksklusif, anti maulid atau tuduhan lainnya, banyak kader PK Sejahtera yang mulai menempati posisi-posisi di tengah masyarakat, baik

Universitas Indonesia

posisi formal maupun non formal, seperti ketua RT, ketua RW, pemuka agama, dan posisi-posisi lainnya. Tujuan dari mobilitas horizontal ini jelas, untuk semakin memperluas area penyebaran pola pemikiran yang mereka bawa, mereka menyebutnya '*nasrul fikrah*'.

Menurut Dr. Sohibul Iman, salah satu tokoh PK Sejahtera, gagasan partai mengenai transformasi masyarakat harus sesuai dengan bahasa dan kadar masyarakat yang akan ditransformasikan (Sohibul Iman, diskusi). Kata-kata ini mengandung pengertian bahwa dalam melakukan transformasi, PK Sejahtera tidak pernah memaksakan pemikirannya untuk harus diterima oleh obyek dakwahnya. Bahkan PK Sejahtera memahami untuk melakukan transformasi, harus disesuaikan dengan bahasa obyek transformasi tersebut. Penyesuaian ini sangat diperlukan agar obyek yang akan ditransformasikan mampu memahami segala sesuatunya mengenai transformasi yang diajukan oleh PK Sejahtera.

Ide PK Sejahtera dalam melakukan transformasi tidaklah berlebihan. Prof Dr. Jimly Ashidiqy berpendapat bahwa institusi negara dan masyarakat Indonesia memang harus ditata kembali (Jimly Ashidiqy, diskusi). Sebegitu jauh, dari sekian banyak partai politik yang ada di Indonesia, baru PK Sejahtera yang mengajukan konsepnya dalam melakukan transformasi atau penataan kembali institusi negara dan masyarakat Indonesia. konsep tersebut dituangkan dalam Platform Kebijakan Pembangunan yang disusun oleh DPP PK Sejahtera. Dr. Sri Mulyani sendiri menyambut baik usaha PK Sejahtera menyusun platform kebijakan pembangunannya dan memandang usaha penyusunan platform tersebut sebagai hal yang jarang terjadi bagi sebuah partai politik, karena hal ini merupakan suatu proses ilmiah rasional bagi partai politik (Sri Mulyani, diskusi).

Sejak awal pendirian PK Sejahtera dimaksudkan sebagai sebuah respon terhadap perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia saat itu (Furkon, 2004). Oleh karena itu dalam perkembangannya kemudian,

PK Sejahtera tetap menitikberatkan perhatiannya pada perubahan sosial di dalam masyarakat Indonesia. Bahkan misi besar PK Sejahtera pun diarahkan kepada transformasi Indonesia pada tiga bidang strategis; yaitu politik, ekonomi dan sosial-budaya. Transformasi pada bidang politik untuk mewujudkan Indonesia yang adil, transformasi pada bidang ekonomi untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan pada bidang sosial-budaya untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat (Sphibul Iman, diskusi).

Sebagai partai dakwah, PK Sejahtera banyak mempraktekkan ajaran-ajaran Islam dalam praktek politiknya, diantaranya dalam melakukan transformasi tersebut, ataupun dalam menyebarkan pemikirannya. PK Sejahtera meyakini bahwa keteladanan atau kepeloporan adalah jauh lebih penting daripada sekedar kata-kata. Peribahasa '*action speaks louder than a thousand words*' atau sebuah tindakan lebih berarti daripada seribu kata-kata tampaknya cocok dilekatkan pada diri para kader PK Sejahtera. Dalam melakukan transformasi pada masyarakat Indonesia, mereka memilih metode keteladanan. Sebelum mengajak masyarakat melakukan sesuatu, mereka telah terlebih dahulu melakukannya.

Keikutsertaan PK Sejahtera dalam proses demokratisasi ternyata menyumbangkan sebuah kultur baru dalam hal berpolitik dan berkampanye. Citra diri PK pada tahun 1999 terkait erat dengan fatwa kebijakan etika berkampanye, yaitu massif, tertib dan aman (Furkon, 2004). Dalam berbagai aksi kampanye maupun demonstrasi yang diselenggarakan PK Sejahtera, terlihat kesantunan yang mereka tunjukkan. Proses demonstrasi yang mereka gelar berlangsung damai, santun namun tetap kritis terhadap objek yang diprotes. Bahkan Gubernur DKI Jakarta (saat itu) Sutiyoso sempat berkelakar bahwa aksi demonstrasi PK Sejahtera layak dijadikan percontohan obyek wisata politik di Ibu Kota (Edward, 2006). Tidaklah heran ketika PK Sejahtera menyerukan agar para partai politik menyelenggarakan kampanye damai dan santun, tidak ada yang mencemooh seruan ini, ataupun ketika para kader PK Sejahtera mengajak masyarakat untuk hidup bersih, masyarakat dapat melihat langsung betapa dalam berdemonstrasi sekalipun para kader PK

Universitas Indonesia

Sejahtera tetap menjaga kebersihan tempat-tempat yang digunakan dan dilalui ketika berdemonstrasi.

Penelitian mengenai gaya kepemimpinan memperlihatkan bahwa perubahan kepemimpinan tidak secara kuat mempengaruhi kinerja organisasi,¹⁴⁰ karena kinerja lebih terkait pada budaya organisasi tersebut. Untuk itu, selain melakukan upaya-upaya perubahan melalui berbagai institusi pemerintahan, para kader PK Sejahtera tetap berupaya melakukan perubahan dengan menggunakan pola yang telah lama mereka gunakan. Konsep pendekatan pribadi ini mereka sebut '*da'wah fardhy*', yaitu bentuk dakwah yang dilakukan dengan pendekatan secara orang per orang dengan obyek dakwah yang dituju.

Perubahan yang dituju pun bukan hanya perubahan pada perilaku politik, lebih jauh lagi para kader PK Sejahtera bermaksud mengubah pola pikir masyarakat secara mendasar. Masyarakat diarahkan untuk kemudian mengambil nilai-nilai Islam sebagai nilai-nilai dasar kehidupan. Inilah yang disebut paradigm baru politik Islam, yaitu pemikiran/paradigma bahwa keniscayaan Islam sebagai ideologi alternatif, bukan hanya sekadar agama yang mengatur kehidupan di akhirat kelak, melainkan juga sumber ajaran yang harus diyakini kebenarannya di dalam menyelamatkan umat manusia di dunia. Dengan merujuk kepada ajaran Islam, dan menjalankannya secara *kaffah*, niscaya segala macam bentuk kemungkaran, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan korupsi, kolusi dan nepotisme akan dapat diakhiri.¹⁴¹

Ditinjau dari teori yang diajukan Neil Smelser, dapat dikatakan bahwa keadaan sosial yang ada sudah memadai untuk dilakukan perubahan sosial. Para kader PK Sejahtera kemudian memberikan dorongan dan mobilisasi kepada masyarakat Indonesia untuk berubah, dan melalui peran para kader PK Sejahtera yang berada di berbagai institusi pemerintahan,

¹⁴⁰ Nahavandi, hal. 18

¹⁴¹ Indria Samego, dalam Z. A. Maulani, hal. 144

mereka menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap perubahan yang sedang dilakukan tersebut. Yang perlu digaris bawahi adalah adanya faktor tambahan yang terlihat pada diri para kader PK Sejahtera. Faktor tersebut yaitu konsistensi, keteladanan dan persistensi atau kegigihan.

5.3. Partai Keadilan Sejahtera dan Kepemimpinan Pemuda

5.3.1. Partai Keadilan Sejahtera Memandang Kepemimpinan Indonesia

PK Sejahtera memandang bahwa saat ini tidak bisa lagi berharap banyak pada golongan tua, yang saat ini mendominasi negara. Golongan tua yang saat ini masih banyak memegang peran di dalam pemerintahan, masih merupakan hasil dari rezim yang lama sehingga kultur yang telah terbangun selama puluhan tahun tidak dapat dengan serta merta berubah begitu saja. Misalnya saja, untuk menghilangkan (KKN/Korupsi Kolusi dan Nepotisme), tidak dapat mengandalkan orang lama karena nuansa KKN yang selama ini telah terbangun sedikit banyak akan tetap mewarnai dunia sosial dan politik Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan orang-orang baru yang tidak pernah terkooptasi oleh rezim yang lama agar dapat menjadi penggerak perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam melakukan perubahan terhadap negara tersebut, PK Sejahtera menyadari bahwa perubahan harus dilakukan dengan mengubah struktur yang ada. Jalan yang paling cepat untuk mengubah struktur adalah dengan membentuk kultur baru di kalangan pemuda. Kalangan pemuda dibidik sebagai sasaran perubahan struktur tersebut karena PK Sejahtera meyakini bahwa hanya pemuda yang bisa mengubah kultur yang ada. Daya kritis dan daya militansi yang mereka miliki akan dapat menjadikan mereka motor-motor perubahan di tempat masing-masing.

Dalam mempersiapkan para pemuda sebagai agen-agen pengubah, PK Sejahtera terus melakukan berbagai kegiatan sebagai bagian dari usaha pembekalan terhadap para pemuda tersebut. Berbeda dengan sebagian besar partai politik lainnya yang baru mulai bergerak menjelang pemilihan umum, PK Sejahtera menjalankan berbagai kegiatannya dalam lingkup kegiatan mingguan atau bahkan harian. Mereka meyakini bahwa pembinaan/pendidikan bagi para kader maupun masyarakat tidak bisa hanya kegiatan yang rentang waktunya terlalu panjang, per tahun atau bahkan per lima tahun. Pendidikan harus terus berjalan dan tertata secara sistematis.

Melalui berbagai kegiatan, para kader PK Sejahtera terus dikembangkan dan dibina. PK Sejahtera meyakini bahwa sumber daya manusia yang ada, baik di internal partai, maupun masyarakat secara umum, harus diberikan pembinaan atau pendidikan. Diantara kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PK Sejahtera yaitu pembinaan ruhiyah (rohani), politik, keilmuan, kegiatan ekonomi, bakti sosial, bantuan korban bencana alam, senam, bahkan hingga demonstrasi dengan berbagai isu yang aktual.

Sumber daya-sumber daya manusia yang ada harus terus dibina dan digerakkan, kalau tidak digerakkan maka sumber-sumber daya tersebut akan hilang. Kalau sumber-sumber daya tersebut terus digerakkan, maka mereka akan semakin baik, secara kuantitas semakin bertambah dan secara kualitas akan semakin kaya dengan pengalaman karena mereka akan matang ditempa oleh kesulitan dan pengalaman lapangan.

Menurut PK Sejahtera, saat ini masalah Indonesia yang paling besar sebenarnya adalah masalah kepemimpinan. Sistem yang ada di Indonesia, terutama sistem pendidikan, secara umum belum dirancang untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan Indonesia. Berbicara mengenai kaderisasi kepemimpinan di Indonesia, mak

Universitas Indonesia

sebenarnya institusi yang paling siap dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan adalah militer. Kaderisasi kepemimpinan di militer telah dipersiapkan dari paling bawah, melalui tahap-tahap yang juga telah dipersiapkan dan terencana dengan baik. Sementara pada saat yang bersamaan pada kaum sipil di Indonesia, tidak terjadi kaderisasi kepemimpinan. Yang terjadi adalah terbentuknya oligarki, kekuasaan hanya berputar di orang yang sama. Partai politik sendiri yang seharusnya salah satu fungsi adalah melakukan kaderisasi politik, ternyata tidak melakukan apapun. Kader pemuda yang sebenarnya banyak terdapat di Indonesia, tidak pernah dianggap sebagai sumber kepemimpinan.

Untuk itulah kemudian PK Sejahtera merasa perlu melakukan pembinaan/pendidikan terutama kepada para pemuda yang memiliki potensi yang sangat besar. Pembinaan atau pendidikan tersebut sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum PK Sejahtera ataupun PK berdiri. Dikatakan bahwa sebenarnya PK (Sejahtera) sebenarnya hanya merupakan wajah formal dari gerakan mereka. Jauh sebelumnya, gerakan tersebut mewujud dalam gerakan perbaikan individu, dalam bentuk tarbiyah, pendidikan Islam, halaqah-halaqah dan lain sebagainya. Tidak heran kemudian PK Sejahtera disebut sebagai salah satu gerakan Islam arus baru. Disebut demikian karena meskipun berwujud partai politik, sebenarnya PK Sejahtera tidak melulu beraktivitas politik, arus utama kegiatannya adalah melakukan kegiatan pensucian diri, sehingga nantinya para kader PK Sejahtera dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan inilah yang menjadi modal dasar para kader ketika menjalankan peran mereka sebagai agen pengubah.

5.3.2. Kepemimpinan Pemuda dalam Partai Keadilan Sejahtera

Secara umum, konsep pemuda dalam PK Sejahtera dirumuskan dalam tiga hal;

1. Pemuda merupakan tiang sebuah negara.
2. Pemuda merupakan rahasia kejayaan sekaligus kelemahan sebuah kaum/bangsa.
3. Pemuda merupakan kekuatan pengubah.

PK Sejahtera menyadari benar bahwa apabila dikelola dengan baik, para pemuda Indonesia tersebut akan dapat membawa Indonesia mencapai kejayaannya. Sebagai tiang negara, di pundak para pemudalah terletak jatuh banggunya negara tersebut. Pemuda sekaligus pula merupakan unsur yang sangat menentukan bagi sebuah negara dalam meraih kejayaan ataupun terpuruk ke kehancuran. Untuk melihat itu semua, lihatlah para pemuda negara tersebut. Apabila para pemudanya memiliki elan vital yang prima, potensi yang terasah, tekad yang membaja maka bisa dipastikan negara tersebut akan meraih kejayaannya. Namun apabila para pemuda suatu negara mengalami keterlenaan, bersifat egois dan tidak mau bersusah payah dan terkungkung oleh kemalasan, maka bisa dipastikan negara tersebut sedang menuju ke kehancurannya.

Dari seluruh hal tersebutlah kemudian dikenali konsep pemuda yang ketiga, pemuda sebagai kekuatan pengubah. Dari keseluruhan potensi yang ada, bisa dikatakan potensi yang ketiga ini merupakan potensi yang paling penting. Suatu negara yang sedang menuju kehancuran sekalipun akan dapat bangkit dan kemudian mencapai kejayaannya apabila para pemudanya menyadari kekuatan yang mereka miliki, mengetahui bahwa di pundak merekalah tertumpu harapan perbaikan dan bertekad membawa negaranya menuju masa kegemilangannya.

Pemuda memiliki posisi yang sangat penting dalam gerakan PK Sejahtera. Bahkan bisa dikatakan pergerakan PK Sejahtera itu sendiri ditentukan oleh para pemuda. Sebagian besar pemimpin di dalam tubuh PK Sejahtera terdiri atas pemuda-pemuda berusia 35-40 tahun, 60-70 persen anggotanya pun terdiri atas para pemuda. Peran pemuda di dalam tubuh PK Sejahtera terutama sekali menganalisa dan merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh PK Sejahtera, dan menyokong manajemen organisasi. Dengan kata lain, para pemuda adalah yang menggerakkan PK Sejahtera.

Untuk Pemilu 2009 mendatang, PK Sejahtera mengklaim bahwa 90% calon anggota legislatif (caleg)nya terdiri atas pemuda berusia 30-40 tahun. Ketika partai lainnya baru bisa berjanji atau menargetkan untuk memberikan jumlah mayoritas calegnya bagi pemuda, PK Sejahtera telah membuktikannya dengan disusunya daftar caleg mereka (Harian Sindo, 10 Mei 2008).

Secara umum peran di dalam PK Sejahtera terbagi atas dua bagian, yaitu para tokoh yang berusia lebih tua yang terutama duduk di Majelis Syura dan Dewan Syariah dan para pemuda yang menjalankan roda organisasi. Mereka yang duduk di Majelis Syura dan Dewan Syariah, umumnya merupakan tokoh-tokoh yang berusia diatas 40 tahun, dengan latar belakang pendidikan syariah (hukum) Islam sehingga seringkali mereka dipanggil “ustadz”. Tugas mereka adalah menjaga agar dalam menjalankan berbagai kegiatannya, PK Sejahtera tetap dalam koridor syariah Islam. Sedangkan para pemuda yang menjadi pengurus, menjalankan roda organisasi sehari-hari, termasuk di dalamnya yang diberikan amanah untuk duduk di berbagai posisi di dalam lembaga eksekutif dan legislatif negara.

Posisi pemuda yang penting di dalam PK Sejahtera juga terlihat pada obyek pengkaderan anggotanya. Sebagian besar sasaran yang dituju dalam kegiatan pengkaderan yang dilakukan oleh PK

Universitas Indonesia

Sejahtera merupakan pemuda yang berasal dari berbagai latar belakang sosial budaya dan pendidikan. Pada awalnya, bahkan sejak sebelum menjadi partai, sasaran utama perekrutan diarahkan kepada para pelajar, mahasiswa dan pemuda dan remaja yang aktif di lingkungan masjid dan mushalla. Pada perkembangannya kemudian, pengkaderan melalui berbagai kegiatan pembinaan ini terus meluas, berbagai organisasi menjadi sasaran pembinaannya, seperti Rohis (Rohani Islam) berbagai sekolah, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), LDK (Lembaga Dakwah Kampus), UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dan lain sebagainya.

Para mahasiswa menjadi salah satu obyek pengkaderan PK Sejahtera. PK Sejahtera memberikan perhatian yang cukup besar terhadap para mahasiswa karena potensi besar yang mereka miliki. Dengan kapasitas keilmuan, semangat yang besar, tenaga yang melimpah yang mereka miliki, para mahasiswa memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi penggerak perubahan di Indonesia menuju kondisi yang lebih baik. Hal itulah yang kemudian terjadi pada tahun 1998. Gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa berhasil mendesak pemerintahan yang lama, yang dinilai telah bobrok, untuk melakukan perubahan yang sangat radikal di dalam sistemnya. Perubahan yang pertama yaitu dengan mundurnya pemimpin nasional saat itu. Namun kondisi saat itu yang serba cepat, membuat gerakan 1998 tidak sempat menyiapkan kepemimpinan baru, yang dapat memastikan agenda reformasi dapat terus berjalan.

Pemimpin nasional berikutnya, meski sudah jauh lebih baik, masih belum dapat dikatakan menjalankan agenda-agenda reformasi dengan baik dan konsisten. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa para aktivis gerakan Islam arus baru tersebut memutuskan untuk mendirikan sebuah partai. Partai tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk tetap dapat berkontribusi dalam

Universitas Indonesia

perubahan sosial politik Indonesia menuju keadaan yang lebih baik sebagaimana yang mereka cita-citakan.

5.4. Pemuda Partai Keadilan Sejahtera dan Perubahan Sosial Politik Indonesia

Dalam melakukan transformasi terhadap masyarakat, PK Sejahtera memandang perlunya melakukan penetrasi terhadap lembaga-lembaga negara yang ada (Pratama, wawancara). Tidak seperti sebagian gerakan Islam lainnya, yang memandang keterlibatan di dalam pemerintahan sebagai sesuatu yang terlarang, PK Sejahtera justru melihatnya sebagai suatu sarana untuk meraih tujuannya, yaitu penyebaran nilai-nilai Islam yang universal dan pada akhirnya membentuk apa yang mereka sebut sebagai masyarakat madani.

Usaha transformasi yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia harus melalui dua bagian besar, yaitu melalui lembaga-lembaga negara dan kepada masyarakat secara langsung. Transformasi melalui lembaga-lembaga negara diperlukan untuk membentuk landasan legal formal transformasi tersebut. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, penegakan Islam memerlukan kekuasaan. Kekuasaan tersebut berfungsi sebagai pemberi landasan hukum dalam implementasi nilai-nilai Islam tersebut. Apabila tidak terdapat landasan hukum ini, dikhawatirkan usaha transformasi tersebut dapat terkendala, bahkan bukan tidak mungkin dapat dikategorikan usaha makar.

Namun demikian, PK Sejahtera juga meyakini bahwa perjuangan Islam memiliki tahapan-tahapan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW (Bachtiar, wawancara). Perjuangan dalam melakukan perubahan terhadap masyarakat, tidak serta merta menguasai negara. Apabila SDM yang ada tidak siap untuk menerima perubahan tersebut, maka besar kemungkinan akan timbul penolakan. Hal ini tidak diinginkan PK Sejahtera dalam perjuangannya melakukan transformasi terhadap masyarakat Indonesia.

Universitas Indonesia

Untuk itu para aktivis pemuda tersebut memutuskan untuk mendirikan partai, yang kemudian dikenal dengan nama PK Sejahtera, sebagai sarana mereka untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga negara dan berjuang di dalamnya. Saat ini sudah banyak pemuda PK Sejahtera yang duduk pada berbagai jabatan, baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif di berbagai daerah. PK Sejahtera sendiri telah berhasil menempatkan sekitar 1112 orang kadernya, yang sebagian besar terdiri atas pemuda, di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain itu PK Sejahtera juga berusaha untuk memasuki ranah lembaga eksekutif dengan mengikuti berbagai pilkada (pemilihan kepala daerah langsung) yang digelar di berbagai daerah.

Selain melakukan usaha transformasi melalui kader-kadernya yang duduk di berbagai lembaga negara, PK Sejahtera juga melakukan usaha transformasi dengan pendekatan langsung kepada masyarakat. Para kader PK Sejahtera yang mayoritas berusia muda merupakan sumber tenaga yang sangat berharga dalam usaha transformasi masyarakat Indonesia ini. Sebagai kaum muda, mereka bagaikan memiliki energi yang tak terbatas ketika menjalankan tugas-tugas dakwah yang dibebankan kepada mereka.

Banyak kisah yang menceritakan peran dan kepemimpinan para pemuda kader PK Sejahtera di berbagai bidang masyarakat. Salah satu contoh peran ini misalnya yaitu advokasi-advokasi yang diberikan oleh kader atau lembaga milik PK Sejahtera dalam berbagai kasus yang dihadapi masyarakat. Muara dari seluruh kerja besar PK Sejahtera adalah apa yang mereka sebut sebagai Masyarakat Madani (Salim, wawancara).

Masyarakat Madani dalam persepsi PK Sejahtera yaitu masyarakat yang memiliki karakteristik seperti masyarakat pada negara Madinah pada zaman Rasulullah SAW, yaitu negara yang mengakui pluralitas. Meskipun negara madinah merupakan negara yang berbasiskan nilai-nilai Islam, namun prinsip pluralitas yang dijunjungnya membuat para penduduk non Islam tetap

Universitas Indonesia

dapat hidup tenang dan damai, keberadaannya tidak hanya diakui tetapi juga dilindungi, bahkan hak-haknya pun tetap diakui. Masyarakat dengan karakteristik seperti inilah yang diidamkan PK Sejahtera dapat terwujud di Indonesia.

Menurut PK Sejahtera, diantara cara untuk membentuk masyarakat madani tersebut yaitu dengan cara membentuk pribadi-pribadi yang lebih baik, bertakwa dan memiliki profesionalisme yang lebih baik, serta secara bersama-sama mewujudkan nilai-nilai Islam yang universal. Ketika ini sudah terwujud, maka akan tercipta Indonesia yang lebih baik dan bertakwa (Bachtiar, wawancara).

Dalam usaha-usaha transformasi masyarakat Indonesia tersebut, para kader PK Sejahtera telah berhasil mencapai beberapa hal. Sebagai pemuda-pemuda dengan idealisme yang relatif masaih tinggi, mereka cenderung tidak mau mengikuti cara-cara lama dalam berpolitik yang ditunjukkan oleh para pendahulu mereka. Mereka menawarkan *genre* baru dalam berdakwah dan berpolitik di Indonesia. Figur-figur mereka yang sebagian besar masih konsisten tidak melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan memperlihatkan praktek hidup yang sederhana, membawa nuansa baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Bahkan dapat dikatakan praktek berpolitik mereka bagikan menjadi arus baru dalam dunia politik Indonesia. tidak sedikit yang kemudian mulai mencontoh cara-cara berpolitik yang mereka lakukan.

Meskipun demikian, tetap terdapat perbedaan yang besar, terutama dari motivasi pergerakan mereka. Apabila sebagian besar politisi masih bertujuan demi mendapatkan suara, para pemuda akivis PK Sejahtera mendasarkan gerakan mereka atas ideologi Islam yang mereka anut. Mereka meyakini bahwa praktek politik sebagaimana yang mereka lakukan merupakan ajaran Islam dan perintah Allah.

Sementara itu, energi besar yang dimiliki para pemuda tersebut membuat mereka mulai meluaskan sayap dakwahnya ke berbagai bidang

Universitas Indonesia

lainnya. Apabila sebelumnya bidang garapan dakwah mereka relatif terfokus pada Rohis, LDK/LDS dan berbagai pemuda berlatar belakang religius-agamis lainnya, kini bidang garapan mereka meluas. Tidak hanya pemuda-pemuda berlatar belakang religius, mereka juga melakukan pendekatan kepada pemuda-pemuda lingkungan, pemuda-pemuda berlatar belakang seni budaya, pemuda-pemuda putus sekolah yang memiliki tempat-tempat tertentu untuk berkumpul dan bahkan pemuda-pemuda dari kalangan pencinta musik keras seperti *under ground*, *grunge* dan lain sebagainya yang kerap dipandang sebagai kelompok pemuda marjinal (Pratama, wawancara).

Dari pendekatan-pendekatan yang disebutkan diatas, para pemuda kader PK Sejahtera telah berhasil merekrut banyak pemuda tersebut untuk kemudian digabungkan dalam kelompok-kelompok kajian keIslaman. Transformasi yang mereka lakukan kemudian mewujudkan dalam sosok-sosok pemuda dengan berbagai latar belakang, bermacam-macam tampilan, namun memiliki pemahaman Islam yang cukup baik. Mereka mampu mengapresiasi Islam sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing, seperti seniman, pemusik, atau bahkan kelompok-kelompok hobi seperti pecinta alam dan bela diri.

Para pemuda dari berbagai latar belakang ini kemudian turut pula bergabung dalam barisan panjang PK Sejahtera. Karakteristik pemuda yang mereka punyai tetap merupakan asset besar yang sangat berguna bagi PK Sejahtera. Sebagai pemuda, mereka memiliki daya kritis yang luas biasa, yang dilatar belakangi oleh idealisme yang mereka miliki. Kekritisian yang mereka miliki merupakan salah satu faktor penting dalam pergerakan PK Sejahtera (Bachtiar, wawancara).

Diantara faktor yang harus dimiliki untuk dapat meraih keberhasilan dalam melakukan transformasi masyarakat Indonesia menurut PK Sejahtera adalah kader yang mau mengikuti instruksi dari pemimpinnya. Namun PK Sejahtera melihat bahwa kemauan kader untuk mengikuti instruksi dari pemimpinnya harus dilandasi oleh pemahaman. Kader tidak

boleh hanya menurut kepada pemimpin, namun kader tetap harus kritis dan memiliki pemahaman. Dengan adanya daya kritis dan pemahaman yang baik ini, partai akan tetap berada pada koridornya (Salim, wawancara). Ini merupakan prinsip *check and balances*, dari prinsip ini akan lahir kekonsistenan, *ke-istiqamahan*. Para pemuda yang bergabung di dalam PK Sejahtera merupakan pemuda-pemuda yang tetap memiliki daya kritisnya. Bahkan suara mereka sangat menentukan dalam berbagai tindakan atau keputusan yang diambil partai.

Faktor yang kedua yang harus dimiliki untuk meraih kesuksesan dalam usaha mentransformasi masyarakat yaitu terus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Selama para kader terus bergerak dalam bentuk kerja-kerja nyata berbasis harian ataupun mingguan, dan melakukannya bersama-sama masyarakat, PK Sejahtera akan terus semakin mendekati tujuan akhirnya yaitu mentransformasi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat madani. Untuk itu PK Sejahtera tidak bisa hanya bekerja demi kepentingan partai dan baru bekerja dalam interval lima tahunan menjelang pemilu. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu kaderisasi dan rekrutmen harus tetap berjalan, agar kebutuhan SDM tetap dapat terpenuhi.

Seluruh kerja besar tersebut membutuhkan tidak hanya daya pikir yang prima, namun juga kekuatan fisik yang optimal. Kedua faktor tersebut berpadu dalam diri para pemuda. Itulah mengapa PK Sejahtera menitikberatkan sasaran kegiatan-kegiatan dakwahnya kepada para pemuda Indonesia.

5.4.1. Energi Perubahan Pemuda Partai Keadilan Sejahtera

Melihat pada berbagai kegiatan PK Sejahtera yang tidak hanya sebatas menjelang pemilu atau pilkada saja, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan darimana asal energi sebesar itu, baik energi dalam artian finansial maupun dalam artian sumber daya

lainnya. Apalagi kemudian didapat informasi bahwa PK Sejahtera tidak pernah membayar kadernya untuk bekerja, para kader PK Sejahtera bergerak karena adanya kesadaran dan pemahaman (Bachtiar, wawancara).

Konsep ini mungkin sedikit sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia, apalagi bagi sebagian besar entitas politik Indonesia yang terbiasa melihat gerak para punggawa politik bermotifkan dukungan finansial. Terlebih lagi kegiatan PK Sejahtera tersebut bukan hanya menjelang pemilu ataupun pilkada saja, tetapi berbilang minggu bahkan harian.

Di satu sisi mungkin hal ini dapat dipahami dari segi dukungan pemuda sebagai basis terkuat kader PK Sejahtera. Dengan pemuda sebagai bahan bakar utamanya, PK Sejahtera mendapatkan energi yang cukup besar untuk menjalankan berbagai kegiatannya. Pemuda dengan segenap potensinya menjadi dukungan bahan bakar yang luar biasa bagi PK Sejahtera.

PK Sejahtera memahami bahwa semua organisasi, baik organisasi sosial, organisasi ekonomi, dan tidak terkecuali organisasi politik, harus memiliki elan vital yang membuat kader memiliki daya tahan yang tinggi. Daya tahan tersebut merupakan daya militansi yang kuat untuk mewujudkan cita-citanya (Salim, wawancara). Pada kasus PK Sejahtera elan vital tersebut di dapat dari ideologi Islam yang mereka gunakan.

PK Sejahtera memandang bahwa penggunaan ideologi yang benar akan menjadi satu visi bersama bagi setiap kader, para kader akan termotivasi untuk terus bergerak dan pada saat yang bersamaan ideologi tersebut menjadi batasan yang jelas untuk mengambil tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan dalam menjalankan roda organisasi. Ideologi yang benar tersebut akan menjadi pagar pembatas

antara yang benar dan yang salah dalam berdakwah (Bachtiar, wawancara).

Salah satu energi terbesar yang dimiliki oleh para pemuda PK Sejahtera dalam menjalankan berbagai kegiatan partai yang bagai tiada habisnya, adalah keyakinan bahwa kemenangan yang hakiki akan mereka dapatkan di akhirat. Keyakinan ini membuat mereka memiliki daya tahan yang sangat tinggi dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan kegiatan partai yang melelahkan (Pratama, wawancara). Kemenangan yang mungkin mereka raih di dunia, hanyalah merupakan pelengkap kemenangan yang akan mereka terima di akhirat. Keyakinan ini dapat tertanam di dalam diri mereka melalui transformasi ideologi ke dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Menurut PK Sejahtera, transformasi ideologi menjadi kehidupan sehari-hari secara konsisten dalam gerakan partai politik akan dapat sangat menentukan maju atau tidaknya partai tersebut. Ketika ideologi yang dianut suatu organisasi ataupun partai politik sudah tertransformasi menjadi kegiatan dan pemikiran sehari-hari, maka para kadernya akan memiliki sumber energi untuk bergerak yang tiada habisnya. Sumber energi yang berasal dari ideologi tersebut akan mendorong setiap kader untuk terus bergerak dan pada akhirnya organisasi tersebut akan maju karena setiap kadernya memiliki dorongan yang besar untuk terus bergerak dan berbuat untuk organisasinya.

PK Sejahtera sudah membuktikan dengan adanya ideologi sebagai penjaga gerak organisasi, maka siapapun yang menjadi pemimpin atau pengurusnya, partai/organisasi tetap akan maju dan bergerak. Hal ini penting, karena saat ini sebagian besar partai mendasarkan kekuatannya pada figur pemimpinnya. Kebanyakan partai di Indonesia tergantung pada kharisma kepemimpinan yang dimilikinya. Padahal, sebagai organisasi yang diharapkan akan hidup

Universitas Indonesia

sangat lama, kharisma pemimpinnya tidak akan mampu bertahan cukup lama untuk selalu menghidupi partai tersebut. Pada akhirnya pemimpinnya akan mencapai batas usianya dan digantikan pemimpin yang baru.

Para pemuda kader PK Sejahtera memahami benar hal ini. Mereka tidak pernah memilih PK Sejahtera karena tokoh yang ada di dalamnya, namun mereka memilihnya karena mereka meyakini apa yang diperjuangkan PK Sejahtera sejalan dengan keyakinan mereka dan apa yang mereka perjuangkan selama ini. Rama Pratama, mantan ketua BEM UI 1997-1999 yang juga merupakan salah satu aktivis utama gerakan reformasi 1998, menyatakan bahwa ia memilih bergabung dengan PK Sejahtera karena melihat partai ini memiliki visi yang sejalan dengan cita-cita reformasi yang ia perjuangkan pada tahun 1998. Bergabungnya ia dengan PK Sejahtera merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap publik sebagai salah satu penggerak gerakan reformasi. Ia meyakini bahwa dengan bergabung dengan PK Sejahtera ia dapat terus berusaha mengawal cita-cita reformasi melalui PK Sejahtera, dan cita-cita inilah yang harus ia pertanggungjawabkan kepada publik.

PK Sejahtera sendiri memposisikan para pemuda yang tergabung di dalamnya sebagai para pengawal pergerakannya. Sebagai sosok-sosok dengan idealisme yang tinggi, para pemuda tersebut dapat terus mengawal PK Sejahtera untuk tetap berjalan pada relnya, untuk tetap konsisten memperjuangkan cita-cita awalnya, sesuai dengan ideologinya. Para pemuda tersebut yang senantiasa menguatkan PK Sejahtera untuk tidak memperlakukan ideologi sebagai barang dagangan yang mudah dipertukarkan demi kepentingan sesaat. Meskipun harus melakukan koalisi dengan berbagai pihak, PK Sejahtera berusaha untuk tetap konsisten dengan berkoalisi hanya dengan pihak-pihak yang setuju dan mau bersama memperjuangkan visi yang sama.

Universitas Indonesia

Bagi para pemuda PK Sejahtera, ideologi merupakan bahan bakar perjuangan, daya tahan perubahan dan daya militan yang tidak kunjung padam. Keyakinan inilah yang senantiasa mereka pegang teguh dalam menapaki hari-hari panjang berusaha melakukan perubahan pada masyarakat Indonesia, mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi suatu masyarakat madani.

5.4.2. Peran Sosial Politik Pemuda Partai Keadilan Sejahtera pada Gerakan Reformasi 1998 dan Setelahnnya

Gerakan reformasi 1998 bermula dari kekecewaan masyarakat, terutama mahasiswa, terhadap pemerintahan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dalam menjalankan pemerintahannya. Pola yang diterapkan pemerintahan tersebut yaitu penindakan tegas, bahkan cenderung represif, terhadap berbagai pemikiran atau gerakan yang dipandang dapat mengancam posisinya sebagai kepala negara.

Pemicu dimulainya gerakan reformasi adalah gelombang badai krisis ekonomi yang melanda Asia, yang bermula pada tahun 1997. Dimulai dengan jatuhnya nilai tukar Baht Thailand terhadap Dollar Amerika Serikat, kemudian bagaikan efek domino, kejatuhan Baht diikuti oleh kejatuhan mata-mata uang lainnya di Asia. Di tengah kesulitan karena krisis ekonomi, Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden untuk yang ketujuh kalinya pada tahun 1998. Segera mahasiswa bergerak melakukan unjuk rasa menuntut adanya reformasi, yang intinya adalah penggantian tampuk kepemimpinan nasional.

Menurut Anas Urbaningrum, pemicu konflik (kerusuhan) yang terjadi pada bulan Mei 1998, terjadi karena pembusukan politik yang akut sebagai akibat akumulasi kekecewaan dalam diri

masyarakat (Urbaningrum, 1999). Pembusukan politik terjadi karena selama tiga dekade rezim orde baru di bawah pimpinan Soeharto menekan segala bentuk ekspresi politik yang dapat mengancam kelangsungan rezim tersebut. Meskipun pembangunan ekonomi dinilai cukup tinggi, namun pendidikan politik dinafikan, sehingga masyarakat menjadi buta akan politik. Bahkan politik seakan menjadi pembicaraan yang tabu saat itu.

Pendirian PK (Sejahtera) sendiri sebenarnya merupakan bagian dari respon terhadap perubahan sosial yang terjadi di awal reformasi. Para pendiri PK (Sejahtera) melihat adanya potensi yang besar untuk turut berperan aktif dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia. Meskipun sebelumnya para aktivis PK Sejahtera sebenarnya memang telah bergelut dalam bidang pembinaan dan perubahan masyarakat, mereka melihat melalui partai, potensi pembinaan dan perubahan yang mereka idamkan dan lakukan selama ini akan lebih besar lagi.

Gerakan perbaikan masyarakat yang sebelumnya hanya dilakukan melalui pembinaan-pembinaan dalam kelompok-kelompok kecil, bergerak dari kampus ke kampus, kampung ke kampung, sekolah ke sekolah, dan berbagai lembaga lainnya, mulai membesar. Ibarat bola salju, *snowballing effect* gerakan tarbiyah dari hari ke hari terus membesar, salah satu puncak kesuksesannya adalah ketika secara diametral menentang rezim Soeharto, dan bersama gerakan nasional lainnya, ikut secara aktif turun ke jalan hingga jatuhnya rezim yang berkuasa selama 32 tahun itu. Setelah sukses menjadi gerakan dakwah kampus dan di masyarakat, gerakan tarbiyah mencoba berkiprah di kancah politik. Akhirnya lahirlah PK pada 9 Agustus 1998, yang kemudian berasimiliasi menjadi PK Sejahtera pada 20 April 2002 (Edward, 2006).

Diantara elemen-elemen mahasiswa dan masyarakat yang melakukan unjuk rasa pada gerakan menuntut reformasi tahun 1998, tercatat nama KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) atau SM (Senat Mahasiswa) berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan berbagai elemen lainnya. Sebagian dari aktivis BEM dan KAMMI ini kemudian bergabung dengan Partai Keadilan (Sejahtera), dan ada yang kemudian menjadi anggota legislatif utusan PK Sejahtera.

Kiprah para kader PK Sejahtera pada gerakan reformasi 1998 tidak dapat dilepaskan dari kiprah para aktivis BEM berbagai kampus di tanah air dan KAMMI. Meskipun secara struktural organisasi KAMMI tidak memiliki hubungan apapun dengan PK ataupun PK Sejahtera, secara kultural KAMMI memiliki hubungan yang emosional yang sangat kuat dengan PK dan PK Sejahtera (Furkon, 2004). Selain bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan KAMMI dan PK Sejahtera relatif sama, jenis pergerakannya pun relatif sama. Sebagian analisa mengatakan bahwa salah satu rahasia kekuatan PK Sejahtera dalam mengkoordinasikan strukturnya sehingga dalam waktu singkat dapat menjangkau hampir seluruh Indonesia, adalah jaringan KAMMI yang juga kuat. Jaringan KAMMI diketahui tersebar di seluruh Indonesia. Secara pemikiran, KAMMI memiliki basis kultur yang religius dan selama 20 tahun terus mengalami penguatan visi keagamaan, intelektual dan politik (Furkon, 2004). Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh para kader PK Sejahtera. Bisa jadi jaringan KAMMI ini pula yang membuat PK Sejahtera mampu membentuk jaringan luar negeri hingga di 17 negara ketika memasuki pemilu 2004. Yang menarik, dari 17 daerah pemilihan di luar negeri dimana PK Sejahtera ikut disana pada pemilu 2004, PK Sejahtera mampu meraih suara mayoritas di 14 negara (Edward, 2006).

Pemilu 2004 sendiri memiliki dua arti strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu (Kementerian Polkam, 2003):

- o Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses publik yang demokratis dan dapat diandalkan
- o Membentuk pemerintah dengan legitimasi rakyat yang kuat

Pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 partai tersebut, dapat dikatakan sebagai pemilu yang cukup demokratis. Figur-figur yang memasuki kursi DPR RI, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II didominasi oleh wajah-wajah segar. Wajah yang baru memasuki gedung dewan, yang di pundak merekalah harapan rakyat Indonesia digantungkan, termasuk di dalamnya, 1112 orang anggota dewan PK Sejahtera di berbagai tingkatan.

Meski jumlah perwakilan PK Sejahtera hanya 45 orang dari total 500 orang anggota DPR, namun mereka sukses menempatkan salah satu kader terbaiknya sebagai ketua MPR RI, ialah Dr. Hidayat Nur Wahid. Yang kini telah menjadi salah satu tokoh nasional yang sangat diperhitungkan di dalam percaturan politik nasional, bahkan internasional.

Sejak awal didirikannya, para pemuda PK Sejahtera terus menunjukkan peran mereka dalam berbagai bidang di tengah masyarakat Indonesia. Banyak gerakan mereka yang kemudian dapat dijadikan contoh oleh organisasi-organisasi atau partai-partai lainnya. Yang terakhir adalah ketika para pemuda kader PK Sejahtera membentuk Lembaga Keuangan Mikro bernama Baitul Maal Sejahtera. Bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri, LMK ini diharapkan dapat menjadi salah solusi untuk memutuskan rantai kemiskinan di tengah masyarakat Indonesia. (Investor Daily, 18 Juni 2006). Bahkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono turut memuji

program Aksi Tanggap Pangan yang dijalankan para pemuda PK Sejahtera sebagai salah satu langkah konkrit guna mengatasi kemiskinan (Indopos, 6 Mei 2008).

Di bidang politik, para pemuda PK Sejahtera telah memberikan contoh agar pengurus partai politik, terutama ketua umumnya, yang menjabat pada jabatan publik (eksekutif) agar mengundurkan diri dari jabatannya di partai. Untuk pemilu 2009, melalui perwakilan salah satu pemudanya di DPR, PK Sejahtera mengusulkan agar hal tersebut dimasukkan dalam RUU mengenai Pemilu dan Partai Politik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Rektor UI, Prof. Gumilar Rusliwa Somantri agar para elit politik bisa lebih bersikap dewasa sebagai negarawan sehingga tidak dipengaruhi kepentingan-kepentingan politik (Media Indonesia, 6 Maret 2008).

Menurut Sapto Waluyo, para pemuda PK Sejahtera dapat menjadi contoh betapa partai politik dapat membangun basis sosial baru dan menawarkan wawasan budaya alternatif (Harian Sindo, 7 Mei 2008). Sedangkan Indra J. Piliang menyatakan bahwa PK Sejahtera adalah partai politik yang berhasil membawa perubahan tanpa menghilangkan jatidirinya serta tidak larut dalam perubahan. Bukti kinerjanya terlihat dengan banyaknya kalangan muda kader PK Sejahtera yang masuk dalam jabatan teras internal partai (Rakyat Merdeka, 21 Mei 2008).

Sedangkan Indria Samego menyebutkan bahwa PK Sejahtera adalah partai yang berhasil memunculkan figur-figur muda, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan perubahan. Emha Ainun Nadjib sendiri melihat PK Sejahtera dan para pemudanya berhasil membawa perubahan luar biasa dalam dinamika kehidupan berdemokrasi di Indonesia (Rakyat Merdeka, 21 Mei 2008).

Dalam banyak langkah politik yang diambilnya, terlihat bagaimana para pemuda PK Sejahtera melakukan pendidikan politik pada masyarakat mengenai bagaimana berpolitik yang baik dan santun. Proses pendidikan politik yang dilakukan para pemuda tersebut sebenarnya merujuk pada sosialisasi politik. Menurut Almod, sosialisasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik.

Dalam kasus sosialisasi politik yang dilakukan para pemuda PK Sejahtera, bukan hanya terbata pada bagaimana seharusnya anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik, tetapi juga bagaimana para politikus berperilaku politik yang baik dan santun. Hal ini terlihat misalnya ketika kader PK Sejahtera meminta agar para politikus konsisten, jangan sampai orientasi kepentingan pragmatis jauh lebih berkuasa di DPR daripada rasionalitas dan moral politik (Indopos, 4 Maret 2008).

Sebagai pemuda, terlihat bahwa obyek sosialisasi politik yang dilakukan para kader PK Sejahtera relatif lebih terfokus pada sesama pemuda. Mungkin hal ini karena pemuda memiliki pertemanan yang relatif lebih kuat dibanding generasi yang lebih berumur. Selain itu, proses transfer nilai-nilai diantara pemuda relatif lebih cepat dan lebih kuat apabila berlangsung di dalam lingkungan pergaulan. Secara umum, *peer group* di kalangan pemuda merupakan lingkungan yang efektif dalam melakukan transfer nilai-nilai, baik nilai-nilai baik maupun nilai-nilai buruk. Hal ini yang ditangkap oleh para pemuda PK Sejahtera. Misalnya dengan program pembinaan kepada para pemuda lingkungan yang saat ini sedang gencar mereka lakukan, atau kepada para pemuda dari kalangan *underground* yang kerap terpinggirkan.

Baik secara sadar maupun tidak sadar, para pemuda tersebut sebenarnya telah menjadi agen sosialisasi politik sebagai teman sebaya. Dalam melakukan sosialisasi politik, agen teman sebaya dapat melakukannya baik secara sadar maupun tidak sadar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seringkali proses sosialisasi politik yang dilakukan para pemuda PK Sejahtera berlangsung dalam suasana yang cair dan santai. Dalam suasana pergaulan yang berlangsung santai tersebutlah para pemuda tersebut melakukan fungsinya sebagai agen sosialisasi politik. Sebagai contoh, ketika para pemuda PK Sejahtera mengadakan acara pentas seni musik bagi para pemuda *underground*, pada saat yang bersamaan terjadi proses transfer nilai-nilai politik di dalamnya, baik itu melalui petugas MC, selebaran yang dibagikan, spanduk yang dipasang atau bahkan melalui obrolan ringan diantara mereka dengan peserta.

Pada saat yang bersamaan, mereka juga menjadi agen kontak-kontak politik langsung. Agen kontak politik langsung sebenarnya merupakan fungsi sebenarnya dari partai politik, yaitu melakukan sosialisasi politik melalui pendidikan politik yang dilakukannya kepada masyarakat. Pendidikan atau sosialisasi politik oleh partai politik ini tidak harus melulu berupa pelatihan atau orientasi pendidikan partai. Sosialisasi oleh partai politik ini bisa melalui berbagai bentuk, seperti misalnya yang dilakukan oleh para pemuda PK Sejahtera berupa pemberian bantuan, bakti sosial, penanggulangan bencana, dan lain sebagainya. Banyak dari bentuk sosialisasi politik yang dilakukan para pemuda kader PK Sejahtera merupakan terobosan yang sebelumnya tidak dikenal di dunia politik Indonesia.

Dari sisi inilah dapat dikatakan para pemuda PK Sejahtera telah memainkan peran kepemimpinannya dalam melakukan perubahan sosial dan politik, diantaranya sosialisasi politik, kepada masyarakat Indonesia umumnya, dan pada dunia perpolitikan

Universitas Indonesia

Indonesia khususnya. Para pemuda tersebut secara tidak sadar sebenarnya telah melakukan apa yang disebut Kouzes & Posner sebagai lima praktek kepemimpinan teladan.

Para pemuda tersebut meyakini bahwa dalam melakukan perubahan, mereka harus menjalankannya terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Salah satu perintah Allah SWT di dalam Al Qur'an yaitu agar berdakwah dengan memberikan contoh yang baik. Inilah salah satu ayat yang dijadikan pegangan para pemuda PK Sejahtera, bahwa sebelum mengajak masyarakat untuk berubah, maka terlebih dahulu mereka harus sudah melakukan perubahan tersebut. Hal ini sejalan dengan praktek kepemimpinan "Moncontohkan Cara" (*Modelling the Way*).

Baru-baru ini PK Sejahtera meluncurkan bukunya "Memperjuangkan Masyarakat Madani", yang berisi Platform PK Sejahtera untuk pembangunan Indonesia serta Falsafah Dasar perjuangan PK Sejahtera. Dari segi praktek kepemimpinan, hal ini merupakan praktek "Menginspirasi Visi Bersama" (*Inspiring a Shared Vision*). Melalui platform tersebut, para pemuda PK Sejahtera ingin mengajak masyarakat Indonesia menatap masa depan dan membayangkan masa depan yang ingin mereka bentuk dan capai. Dengan adanya visi yang dituju, maka masyarakat akan relatif lebih mudah untuk diajak melakukan perubahan.

Menurut Umar Salim, gerakan PK Sejahtera sudah berbeda dengan pada masa awal didirikannya Partai Keadilan. Saat itu partai masih relatif tertutup dan perekrutan hanya dilakukan untuk merekrut orang menjadi kader. Namun saat ini PK Sejahtera sudah jauh lebih terbuka, dengan menerima anggota dari berbagai kalangan dan, melalui evaluasi, menyadari bahwa sebagai partai politik mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan gerak seperti zaman sebelum dibentuknya partai tersebut. Pada sisi ini, para pemuda PK Sejahtera

Universitas Indonesia

melakukan praktek kepemimpinan “Menantang Proses” (*Challenging the Process*). Melalui proses evaluasi mereka terus melakukan upaya perbaikan dan tidak mau berhenti hanya pada satu cara tertentu. Mereka meyakini bahwa dalam melakukan perubahan terhadap masyarakat, harus terus dicari upaya kreatif sehingga masyarakat tidak cepat jenuh karena proses perubahan membutuhkan waktu yang relatif panjang.

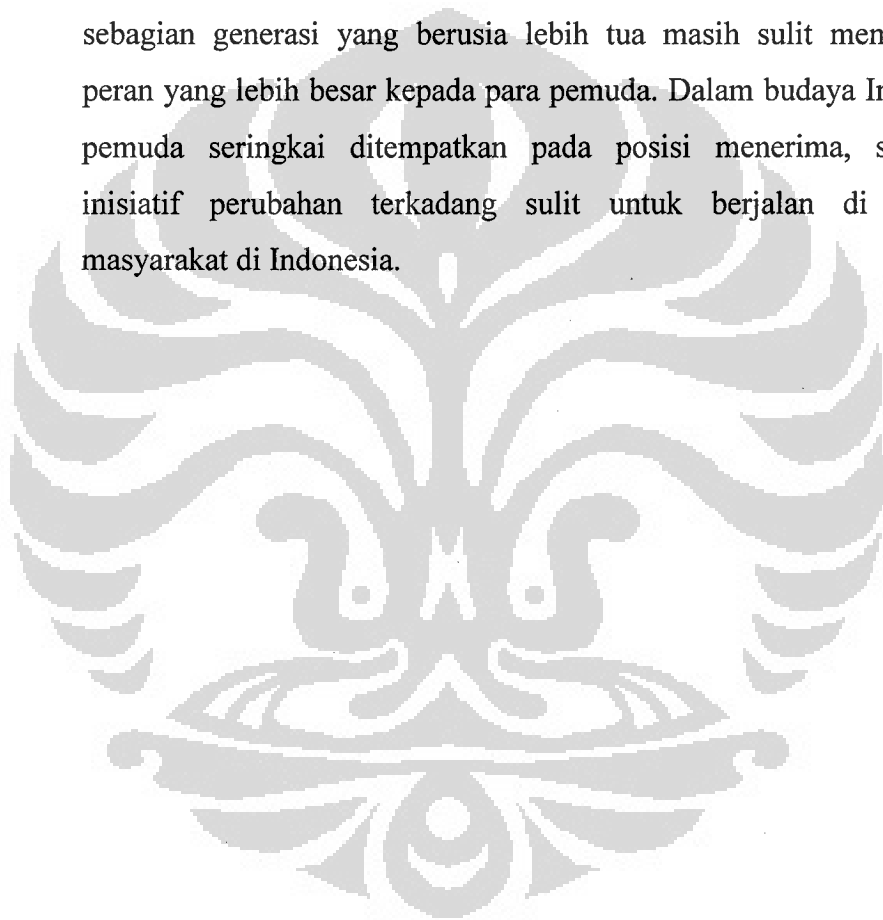
Dari segi praktek kepemimpinan “Memungkinkan Orang Lain untuk bertindak” (*Enabling Others to Act*), para pemuda PK Sejahtera melakukannya dengan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bergerak melakukan perubahan. Salah satu contohnya adalah ketika PK Sejahtera memprakarsai aksi solidaritas sejuta ummat untuk Palestina. Para pemuda PK Sejahtera mampu mengajak berbagai elemen masyarakat, tidak hanya muslim tetapi juga non muslim, untuk sama-sama peduli terhadap masalah kemanusiaan di Palestina. Dalam aksi tersebut, para pemuda PK Sejahtera relatif mampu menularkan cara-cara yang biasa mereka lakukan dalam aksi-aksi internal mereka, misalnya menjaga kebersihan, memberi jalan bagi kendaraan yang akan mempergunakan jalan, menjaga keamanan bersama dan lain sebagainya.

Para pemuda kader PK Sejahtera merupakan figur-figur yang tidak malu mengakui kesalahannya dan sebaliknya sangat mengapresiasi suatu prestasi. Dalam rangka hari guru tahun 2007, PK Sejahtera memberikan penghargaan dan berbagai hadiah mulai dari kendaraan bermotor hingga umrah bagi para guru yang dianggap berdedikasi dan berprestasi dari seluruh Indonesia. Dalam dunia kepemimpinan, hal ini termasuk ke dalam praktek “Menyemangati Jiwa” (*Encouraging the Heart*), yang merupakan salah satu kunci pemimpin yang dicintai oleh pengikutnya. Melalui praktek ini pula, banyak pemimpin yang kemudian memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mengajak pengikutnya melakukan berbagai perubahan

Universitas Indonesia

dalam kehidupan mereka, bahkan perubahan yang fundamental sekalipun.

Usia muda memang dapat menjadi kelebihan tersendiri, terutama dalam melakukan perubahan kepada masyarakat. Namun dalam konteks ke-Indonesiaan, usia muda ternyata juga memiliki kelemahan. Budaya Indonesia yang relatif masih bertipe patron-client, membuat para pemuda PK Sejahtera kadang tidak dapat tampil maksimal di tengah masyarakat. Salah satu sebab utamanya karena sebagian generasi yang berusia lebih tua masih sulit memberikan peran yang lebih besar kepada para pemuda. Dalam budaya Indonesia pemuda seringkali ditempatkan pada posisi menerima, sehingga inisiatif perubahan terkadang sulit untuk berjalan di banyak masyarakat di Indonesia.



BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan diatas didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, konsep pemuda dalam PK Sejahtera dirumuskan dalam tiga hal;
 - 1) Pemuda merupakan tiang sebuah negara.
 - 2) Pemuda merupakan rahasia kejayaan sekaligus kelemahan sebuah kaum/bangsa.
 - 3) Pemuda merupakan kekuatan pengubah.

Dalam platformnya, PK Sejahtera menyatakan bahwa platformnya mengenai kepeloporan pemuda yaitu, membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya dan mempersiapkan sebagai calon pemimpin bangsa. PK Sejahtera memandang pemuda sebagai calon pemimpin bangsa yang harus dipersiapkan untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan negeri ini.

PK Sejahtera menyadari benar bahwa apabila dikelola dengan baik, para pemuda Indonesia tersebut akan dapat membawa Indonesia mencapai kejayaannya. Sebagai tiang negara, di pundak para pemudalah terletak jatuh bangunnya negara tersebut. Pemuda sekaligus pula merupakan unsur yang sangat menentukan bagi sebuah negara dalam meraih kejayaan ataupun terpuruk ke kehancuran. Apabila para pemudanya memiliki elan vital yang prima, potensi yang terasah, tekad yang membaja maka bisa

dipastikan negara tersebut akan meraih kejayaannya. Namun apabila para pemuda suatu negara mengalami keterlenaan, bersifat egois dan tidak mau bersusah payah dan terkungkung oleh kemalasan, maka bisa dipastikan negara tersebut sedang menuju ke kehancurannya.

2. Mereka meyakini bahwa dakwah yang mereka lakukan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mentransformasi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang mereka idamkan. Konsep yang mereka usung dalam perubahan tersebut yaitu pembinaan pribadi untuk kemudian mengubah *minhaj* atau pola pikir. Perubahan yang mereka lakukan merupakan perubahan yang bersifat gradual, tahapan-tahapan dari perubahan tersebut yaitu *binaa al syakhsiyyah al islamiyyah, binaa ul usrah, binaa ul mujtama', daulah islamiyyah, khilafah islamiyyah* dan *ustadziyatul 'alam*.

Pembinaan yang mereka lakukan merupakan tahapan-tahapan yaitu; membina kepribadian islamiyah, membina keluarga, membina masyarakat, negara Islam, kekhilafahan islam dan pada akhirnya menjadi soko guru bagi alam semesta. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebenarnya sejak awal kerja besar para aktivis gerakan tarbiyah, yang kemudian bertransformasi menjadi PK Sejahtera, adalah melakukan perubahan pada masyarakat Indonesia, terutama pada bidang sosial.

Praktek politik para pemuda PK Sejahtera dalam proses demokratisasi ternyata menyumbangkan sebuah kultur baru dalam hal berpolitik dan berkampanye. Citra diri mereka (yang kemudian berusaha mereka pertahankan) pada tahun 1999 terkait erat dengan fatwa kebijakan etika berkampanye, yaitu massif, tertib dan aman.

Misi utama PK Sejahtera adalah melakukan transformasi pada tiga bidang strategis, yang pada intinya adalah melakukan transformasi pada institusi masyarakat. Menurut PK Sejahtera, institusi sosial yang adil akan mempengaruhi struktur dasar

Universitas Indonesia

masyarakat yang di dalamnya terkandung berbagai posisi sosial dan cita-cita kedepannya. Dari sini dapat dipahami bahwa letak perubahan yang diinginkan PK Sejahtera sebenarnya terletak pada institusi masyarakat itu sendiri. Dengan perubahan atas institusi sosial dan politik masyarakat, maka seluruh masyarakat mau tidak mau akan mengikuti arah perubahan tersebut. Dalam hal ini, PK Sejahtera menginginkan institusi sosial masyarakat berubah ke arah yang islami, dalam artian menerapkan nilai-nilai Islam yang universal.

3. Melalui pengamatan, dapat dilihat bahwa selain prasyarat perubahan sosial yang diajukan Neil Smelser, terdapat karakteristik lainnya dari PK Sejahtera yang membuatnya memiliki peran yang cukup signifikan dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia. Prasyarat perubahan atau transformasi *ala* PK Sejahtera yaitu;
 - a. Keistiqamahan (kekonsistenan)
 - b. Keteladanan atau kepeloporan
 - c. *Persistence* (kegigihan)

Kekonsistenan, keteladanan dan kegigihan yang telah ditunjukkan para kader PK Sejahtera pada hakikatnya merupakan ajaran Islam, yang menyuruh pengikutnya untuk berdakwah dan bersiap menghadapi berbagai cobaan dalam dakwah tersebut.

Ketiga prasyarat perubahan tersebut sangat mungkin didapat melalui para kadernya yang didominasi oleh pemuda. Dengan energi yang besar dan semangat yang membara, ketiga prasyarat tersebut akan dengan mudah dicapai. Lain halnya dengan generasi yang lebih tua, meskipun memiliki semangat yang relatif sama besarnya, namun kekuatan fisik dan pikiran mereka tidak lagi dapat dipergunakan secara maksimal untuk menghadirkan perubahan yang utuh, yang pastinya membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Universitas Indonesia

4. Meskipun peran kepemimpinan pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik Indonesia cukup besar namun belum dapat dikatakan maksimal. Dalam konteks sosial politik Indonesia, para pemuda PK Sejahtera menjadi ikon gerakan politik baru dengan gaya berpolitik yang diluar kelaziman. Terutama sekali hal ini bersumber dari ideologi yang mereka pergunakan dalam berpolitik, yaitu ideologi Islam. Ketidakmaksimalan peran para pemuda ini dalam melakukan perubahan sosial politik di Indonesia, terutama karena struktur sosial masyarakat Indonesia yang masih sangat mementingkan figur. Sebagai pemuda dengan pengalaman yang dapat dikatakan masih sedikit, sebagian pemuda kader PK Sejahtera ini belum mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Masyarakat belum memandang sebelah mata terhadap para agen pengubah ini.

6.2. Rekomendasi

- 1) Fenomena perkembangan PK Sejahtera seyogianya diletakkan dalam konteks kondisi sosial politik Indonesia saat itu yang belum stabil. Selain itu, perkembangan PK Sejahtera juga harus dikaitkan dengan gerakan moral pendidikan 'gerakan tarbiyah' yang telah bergerak sejak tahun 1980-an. Dengan demikian dapat dipahami misi transformasi masyarakat PK Sejahtera sebagai kelanjutan dari gerakan moral pendidikan tersebut.
- 2) Menurut Cornelis Lay (2006), pengalaman banyak negara membuktikan, pemilihan umum sepanjang dapat berlangsung secara jujur dan adil serta jauh dari kekerasan dapat menjadi obat mujarab untuk menyudahi kedua krisis: krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. Adalah bagian dari tugas PK Sejahtera dan juga partai-partai lainnya, sebagai bagian dari entitas politik di Indonesia, untuk menjalankan praktek politik yang santun dan bermartabat, sehingga masyarakat kembali dapat sepenuhnya memberikan kepercayaan

Universitas Indonesia

pada para wakil rakyatnya. Sejauh ini, praktek politik yang diperlihatkan sebagian besar partai masih jauh dari praktek yang jujur dan adil, bahkan masih cukup sering menunjukkan penggunaan kekerasan dalam usaha mencapai atau memperjuangkan tujuannya.

- 3) Langkah PK Sejahtera yang membuka dirinya dengan menyebarkan platform perjuangan dan falsafah dasar perjuangannya, patut dicontoh oleh partai-partai lainnya, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai arah dari masing-masing partai. Sebagian ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik muncul karena ketidakjelasan agenda dan program partai politik bagi bangsa dan negara ini. Menurut Danial S. Lev, dibutuhkan sebuah revolusi moral untuk memperbaiki situasi yang ada, namun hal ini mungkin sulit dicapai, karena kenyataan memperlihatkan adanya keengganan sebagian orang untuk berpolitik, meskipun sebenarnya memiliki kemampuan (Eschborn (eds.), 2004). Adalah tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga mereka tergugah untuk berpartisipasi, meski dalam bentuk paling kecil.
- 4) Masalah terbesar Indonesia saat ini adalah penegakan hukum yang payah dan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Padahal komunikasi yang baik sangat krusial untuk menciptakan pemahaman dan persepsi bersama mengenai Indonesia di masa depan. Sayangnya pemerintah kita sekarang masih belum mampu berkomunikasi dengan baik pada rakyatnya (Eschborn (eds.), 2004). Sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah, adalah bagian dari tugas PK Sejahtera untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga kekecewaan masyarakat, baik terhadap pemerintah maupun partai, dapat diminimalisir. Bagaimanapun juga, senjata yang paling efektif dari partai politik adalah suara, yang dapat memberikan dukungan atau tekanan kepada pemerintah.

- 5) Sebagai generasi yang lebih muda, para pemuda kader PK Sejahtera harus dapat memformulasikan pendekatan yang tepat agar lebih mudah diterima di kalangan yang lebih tua. Meskipun secara umum dikenal sebagai golongan yang santun terhadap generasi yang lebih tua, para pemuda kader PK Sejahtera harus tetap berusaha untuk mendapatkan tempat di tengah masyarakat dengan budaya patron yang kuat seperti masyarakat Indonesia. Mereka harus mampu menunjukkan bahwa kepada masyarakat bahwa usia mereka bukanlah hambatan untuk menunjukkan kemampuan mereka baik dari segi pemikiran maupun mental.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan, Dr., *Sirah Nabawiyah – Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW*, terjemahan, Robbani Press, Jakarta, 1999
- Alfonso, Rudy & Rudolf Hauter, *Four Years of regional Autonomy: Successes and Problems*, dalam Norbert Eschborn, Sabrina Hackle, Joyce Holmes Richardson (eds.), *Indonesia Today – Problems & Perspectives: Politics and Society Five Years into Reformasi*, Konrad-Adenauer-Stiftung, Jakarta, Desember 2004
- Almond, Gabriel A., dalam Haryanto, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 1982
- Antlov, Hans, *Not Enough Politics! Power, Participation and the New Democratic Polity in Indonesia*, dalam Edward Aspinall & Greg Fealy (eds.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Banna, Hasan Al, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Buku 1*, terjemahan, Era Intermedia, Surakarta, 2005
- Bourdier, David dan Vedi R. Hadiz (eds.), *Indonesia Politics and Society, A Reader*, Routledge Curzon, London, 2003
- Bresnan, John, *Economic Recovery and Reform*, dalam John Bresnan (ed.), *Indonesia: The Great Transition*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Oxford, USA, 2005
- Byrnes, Robert F., *Perubahan dalam Sistem Politik Soviet*, dalam Roy. C. Macridis, *Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan*, Penerbit Airlangga, Jakarta 1992

- Departemen Kaderisasi DPP Partai Keadilan Sejahtera, *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera 2009*, Harakatuna, Bandung, 2005
- Edward, Djony, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*, Syaamil, Bandung, 2006
- Emmerson, Donald K., *Krismon dan Lengser: Kemelut tahun 1997-98*, dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Emmerson, Donald K., *What is Indonesia?*, dalam John Bresnan (ed.), *Indonesia: The Great Transition*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Oxford, USA, 2005
- Furkon, Aay Muhammad, *PK SEJAHTERA: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Penerbit Teraju, Jakarta, 2004
- Ganie-Rochman, Meuthia, *Birokrasi untuk Kemakmuran dan Keadilan*, dalam Usamah Hisyam (ed.), *Perubahan Untuk Rakyat – Seputar Korupsi, Gaji PNS dan Rakyat Kecil*, Dharmapena Publishing, Jakarta, Agustus 2005
- Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1994
- Gobel, Ruddy, *Public Communications and Democratization in Indonesia*, dalam Norbert Eschborn, Sabrina Hackle, Joyce Holmes Richardson (eds.), *Indonesia Today – Problems & Perspectives: Politics and Society Five Years into Reformasi*, Konrad-Adenauer-Stiftung, Jakarta, Desember 2004
- Hadiwinata, Bob S., *Stirring from Beyond the Borders: International Actors and Democratization in Indonesia*, dalam Norbert Eschborn, Sabrina Hackle, Joyce Holmes Richardson (eds.), *Indonesia Today – Problems*

- & Perspectives: Politics and Society Five Years into Reformasi*, Konrad-Adenauer-Stiftung, Jakarta, Desember 2004
- Hakim, Masykur, *Sikap Muslim Indonesia di Awal Orde Baru*, dalam Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, Kencana, Jakarta, 2004
- Haris, Syamsuddin, *Reformasi Setengah Hati*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999
- Samego, Indria, *Peta Politik Islam Pasca Tragedi Bali*, dalam Z. A. Maulani, dkk, *Islam dan Terorisme – Dari Minyak hingga Hegemoni Amerika*, UCY Press, Yogyakarta, 2003
- Irawan, Prasetya, Dr., M.Sc, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Agustus, 2006
- Kavanagh, Dennis, *Kebudayaan Politik*, terjemahan, PT Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia, *Pembangunan Bidang Politik*, Jakarta, 2003
- Kouzes, James M., and Barry Z. Posner, *Tantangan Kepemimpinan*, Edisi Ketiga, terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004
- Kusumahadi, Meth dan Michael Hollander, *Non Governmental Organizations After “Reformasi” – A Power Factor in Indonesia?*, dalam Norbert Eschborn, Sabrina Hackle, Joyce Holmes Richardson (eds.), *Indonesia Today – Problems and Practices: Politics and Society Five Years into Reformasi*, Konrad-Adenauer-Stiftung, Jakarta, Desember, 2004
- Kweit, Mary G., and Robert W. Kweit, *Konsep dan Metode Analisa Politik*, terjemahan, PT Binas Aksara, Jakarta, 1986
- Laporan Penilaian Tata Pemerintahan Negara – Indonesia* (terj.), Asian Development Bank, Jakarta, 2004

- Lay, Cornelis, *Involusi Politik – Esei-esei Transisi Indonesia*, Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006
- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Luhulima, James, *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto*, Penerbit Kompas, Jakarta, Mei 2001
- Machmudi, Yon, *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Harkatuna, Bandung, 2006
- Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, Jakarta, Maret 2008
- Mas'oed, Mochtar dan Colin McAndrews, *Perbandingan Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997
- Maxwell, John C., *21 Hukum Kepemimpinan Sejati*, terjemahan, Interaksara, Jakarta, 2001
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1990
- Nahavandi, Afsaneh, *The Art and Science Of Leadership*, second edition, Prentice Hall, New Jersey, 2000
- Poloma, Margaret, M., *Sosiologi Kontemporer*, terjemahan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Prasetyantoko, *Kaum Profesional Menentang Rezim Otoriter – Sketsa tentang Kelas Menengah Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 1999
- Rais, Mohammad Amien, *Agenda-Mendesak Bangsa – Selamatkan Indonesia!*, PPSK Press, Yogyakarta, 2008
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, November 2005,

- Rodee, Carlton Clymer, *Pengantar Ilmu Politik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Rosidi, Ajip, dalam *15 Tokoh Bicara PK Sejahtera*, Penerbit Saksi, 2003
- Runciman, W.G., *Social Science and Political Theory*, London, 1965
- Rush, Michael and Phillip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*, terjemahan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Rush, Michael dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. 10, Mei 2003
- Saidi, Ridwan, *Dinamika Kepemimpinan Islam Dalam Era Orde baru*, dalam M. Amien Rais (ed.), *Islam di Indonesia – Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, April 1996
- Sayyid Quthb, *Fii Zhilalil Qur'an – Di Bawah Naungan Al Quran*, Juz V, Gema Insani Press, 2000
- Siahaan, Maruarar, *Rule of Law or Role of Law? What is happening to the Legal Reform Process in Indonesia?*, dalam Norbert Eschborn, Sabrina Hackle, Joyce Holmes Richardson (eds.), *Indonesia Today – Problems & Perspectives: Politics and Society Five Years into Reformasi*, Konrad-Adenauer-Stiftung, Jakarta, Desember 2004
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Politik di Indonesia*, dalam Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Spradley, James, *The Ethnographic Interview*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1979
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi 2, Jakarta, 2000
- Terry, Robert W., *Authentic Leadership: Courage in Action*, Jossey-Bass, San Francisco, 1993

- Urbaningrum, Anas, *Ranjau-ranjau Reformasi – Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Juni 1999
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Waluyo, Sapto, *Kebangkitan Politik Dakwah – Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, Harakatuna, Bandung, 2005
- Winters, Jeffrey A., *Dosa-dosa Politik Orde Baru*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Maret 1999
- Yudhoyono, Susilo Bambang, Presiden, *Pidato Awal Tahun*, Jakarta, 31 Januari 2007
- Yukl, Gary A., *Kepemimpinan dalam Organisasi*, terjemahan, Prenhallindo, Jakarta, 1998
- Yusuf, Almuzzammil, *Isu Besar Dakwah dalam Pemilu 2009*, Syaamil, Bandung, 2003
- Harian Investor Daily, "PKS DKI Prakarsai Pembentukan LKM", 18 Juni 2008
- Survei Partai Politik, *Punggawa Politik pun Sulit Tentukan Pilihan*, dalam KOMPAS, 19 April 2008
- Harian Rakyat Merdeka, "Partai Keadilan Sejahtera Ingin Indonesia Bangkit", 21 Mei 2008
- Harian Seputar Indonesia, "Parpol Pasang Caleg Muda", 10 Mei 2008
- Waluyo, Sapto, "Dinamika Sosial Budaya PKS", dalam Harian Seputar Indonesia, 7 Mei 2008
- Harian Indopos, "Mencermati Capres PKS", 6 Mei 2008
- Harian Media Indonesia, "Politik Mulai Memanas Akibat Perilaku Elite", 6 Maret 2008
- Harian Indopos, "PKS Tolak Loloskan Parpol Gurem di DPR", 4 Maret 2008

Putin, Vladimir, Sebagaimana dikutip Wahfiudin, dalam wawancara di acara Khazanah, Trans TV, 12 April 2008, jam 06.50 WIB

<http://203.130.201.130/Sejarah/pemilu1955.shtml>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.53 WIB

<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0106/22/NASIONAL/soeh07.htm>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.15 WIB

<http://anismatta.blogs.friendster.com/>, diakses pada 20 Juni 2008, jam 14.08

http://en.wikipedia.org/wiki/Bureaucracy#Origin_of_the_concept, diakses pada 3 Juni 2008, jam 11.37 WIB

http://en.wikipedia.org/wiki/Hidayat_Nur_Wahid, diakses pada 31 Mei 2008, jam 23.37 WIB

<http://fe.iluni.or.id/v2/alumni.php?display=dinamis&kategori=3&id=111>, diakses pada 2 Juni 2008, 14.19 WIB

<http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Economic+bubble>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 14.13 WIB

<http://hnw.or.id/main.php?op=isi&id=255>, diakses pada 31 Mei 2008, jam 23.39 WIB

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071204044425AAsFjvG&show=7>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.45 WIB

<http://id.shvoong.com/books/1755221-supersemar-kudeta-suharto/>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 09.08 WIB

Error! Hyperlink reference not valid., diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.19 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Anis_Matta, diakses pada 20 Juni 2008, jam 14.06

<http://id.wikipedia.org/wiki/GANEFO>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.39 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Pancasila, diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.47 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September#Penangkapan_dan_pembunuhan, diakses pada 20 Mei 2008, jam 09.15 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Konfrontasi_Indonesia-Malaysia, diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.28 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Rama_Pratama, diakses pada 31 Mei 2008, jam 23.55 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/TPI>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.24 WIB

<http://indoprogres.blogspot.com/2008/03/efek-paradoks-liberalisasi-finansial.html>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 09.25 WIB

<http://whitegun.wordpress.com/2007/05/24/fakta-dibalik-peristiwa-g-30-s-pki-versiku-bag-3/>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 09.15 WIB

Error! Hyperlink reference not valid., diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.15 WIB

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1995/10/07/0005.html>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 10.53 WIB

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/02/12/0004.html>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 09.28 WIB

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/09/15/0002.html>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.19 WIB

<http://www.indonext.ppi-australia.org/program/hidayat.php>, diakses pada 31 Mei 2008, jam 23.42 WIB

http://www.jakarta.go.id/jakartaku/museum_di_dki01.htm, diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.33 WIB

<http://www.masjidistiqlal.com/index.php?modul=text&page=detail&textID=19>,

diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.37 WIB

http://www.pks-anz.org/pkspedia/index.php?title=Muhammad_Anis_Matta,

diakses pada 20 Juni 2008, jam 14.09

http://www.pks-anz.org/pkspedia/index.php?title=Rama_Pratama, diakses pada

31 Mei 2008, jam 23.59 WIB

<http://www.ramapratama.com/index.php/profil/>, diakses pada 31 Mei 2008, jam

23.56 WIB

<http://www.rssf.com/tables/ganefo.html>, diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.39

[http://www.silaban.net/2007/01/07/monumen-nasional-kenangan-perjuangan-](http://www.silaban.net/2007/01/07/monumen-nasional-kenangan-perjuangan-bangsa/)

[bangsa/](http://www.silaban.net/2007/01/07/monumen-nasional-kenangan-perjuangan-bangsa/), diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.33

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0403/23/nas09.html>, diakses pada 2 Juni

2008, jam 14.16

<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hidayat-nur-wahid/index.shtml>,

diakses pada 31 Mei 2008, jam 23.45

http://www.tpi.tv/new/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid

[=26](http://www.tpi.tv/new/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid), diakses pada 20 Mei 2008, jam 08.24

http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi5/5berita_6.html, diakses pada 20 Mei

2008, jam 08.51

http://www.uny.ac.id/akademik/sharefile/files/16112007144643_Teori_perubahan

[sosal.ppt](http://www.uny.ac.id/akademik/sharefile/files/16112007144643_Teori_perubahan) diakses pada Selasa, 5 Februari 2008, jam 11.34

<http://penamuda.multiply.com/reviews/item/4>, diakses pada 20 Juni 2008, jam

14.26

Aminuddin, Hilmi, H., sambutan pada Diskusi Terbatas dan Peluncuran Buku Platform PK Sejahtera, 20 April 2008, Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, tidak diterbitkan

Universitas Indonesia

Ashidiqy, Jimly, pembicara pada Diskusi Terbatas dan Peluncuran Buku Platform PK Sejahtera, 20 April 2008, Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, tidak diterbitkan

Azra, Azyumardi, Prof. Dr., pembicara pada Diskusi Terbatas dan Peluncuran Buku Platform PK Sejahtera, 20 April 2008, Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, tidak diterbitkan

Firdaus, Bachtiar, S.T., MPP, wawancara di Jakarta, pada 18 Juni 2008, jam 20.00 – 21.00

Iman, Sohibul, Dr., pembicara pada Diskusi Terbatas dan Peluncuran Buku Platform PK Sejahtera, 20 April 2008, Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, tidak diterbitkan

Indrawati, Sri Mulyani, Dr., pembicara pada Diskusi Terbatas dan Peluncuran Buku Platform PK Sejahtera, 20 April 2008, Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, tidak diterbitkan

Pratama, Rama, S.E., wawancara di Jakarta, pada 1 Juli 2008, jam 14.00 – 15.00

Salim, Umar, SIP, wawancara di Jakarta, pada 7 Juli 2008, jam 12.30 – 13.15

Wahid, Hidayat Nur, pembicara pada Diskusi Terbatas dan Peluncuran Buku Platform PK Sejahtera, 20 April 2008, Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, tidak diterbitkan

Wahono, Untung, pembicara pada Diskusi Terbatas dan Peluncuran Buku Platform PK Sejahtera, 20 April 2008, Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, tidak diterbitkan

ANGGARAN DASAR

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MUQADDIMAH

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang yang sangat menentukan dengan perjuangan yang berat dan kritis. Melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Selanjutnya, dimulailah upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, menyelenggarakan pemerintahan, serta membangun kehidupan berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun tahun 1959, kehidupan demokrasi yang telah berusaha dibangun terhambat dengan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.

Harapan perubahan dan perbaikan yang muncul dengan lahirnya Orde Baru tidak bertahan lama. Pemerintahan ini senyatanya belum bisa menyelenggarakan kehidupan demokrasi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas rahmat Allah Yang Mahakuasa, sampailah bangsa Indonesia pada momentum reformasi Mei 1998. Seluruh anak bangsa kembali mengukirkan harapan mulianya untuk meraih cita-cita kemerdekaan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Bertolak dari kesadaran tersebut maka dibentuklah Partai Keadilan yakni partai politik yang mengemban amanah dakwah demi mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Seiring berkembangnya dinamika aspirasi masyarakat dan untuk menjamin kelangsungan dakwah, maka Partai Keadilan menjelmakan diri menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam rangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan kepartaian, dengan ini Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

1

Universitas Indonesia

NAMA, ASAS, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT

Pasal 1

- (1) Partai ini bernama PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Partai.
- (2) Partai didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 09 Jumadil 'Ula 1423 bertepatan dengan duapuluh April tahun duaribu dua (20-04-2002), adalah kelanjutan Partai Keadilan yang didirikan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1419 bertepatan dengan duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (20-07-1998).

Pasal 2

Partai berasaskan Islam.

Pasal 3

- (1) Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Partai membentuk kepengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Partai dapat membentuk perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Partai memiliki atribut berupa lambang, bendera, mars, dan hymne.
- (2) Ketentuan tentang atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB II TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

Tujuan Partai yaitu:

- (1) Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- (2) Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridlai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Partai menjalankan

Universitas Indonesia

kegiatan antara lain politik, dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial-kemasyarakatan, dan memberikan alternatif solusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara.

Pasal 7

Partai menggunakan berbagai sarana yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan kemaslahatan umum antara lain:

- a. aktivitas politik, pendidikan dan pelatihan, dakwah, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan persoalannya;
- b. menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintahan; badan-badan penentu kebijakan, hukum, dan perundang-undangan; lembaga swadaya masyarakat;
- c. menerima dan menyerap aspirasi serta mengutamakan dialog konstruktif dan kerja nyata dengan semua unsur masyarakat.

BAB III KEANGGOTAAN Pasal 8

Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundangundangan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Partai mengangkat dan memberhentikan Anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Anggota Pendukung;
 - b. Anggota Inti; dan
 - c. Anggota Kehormatan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI Pasal 10

Struktur organisasi Partai terdiri atas:

- (1) Struktur organisasi Partai di tingkat pusat adalah:
 - a. Majelis Syura;
 - b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - c. Majelis Pertimbangan Pusat;
 - d. Dewan Pengurus Pusat; dan
 - e. Dewan Syari'ah Pusat.
- (2) Struktur organisasi Partai di tingkat provinsi adalah:
 - a. Majelis Pertimbangan Wilayah;
 - b. Dewan Pengurus Wilayah; dan
 - c. Dewan Syari'ah Wilayah.
- (3) Struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota adalah:
 - a. Majelis Pertimbangan Daerah;
 - b. Dewan Pengurus Daerah; dan

Universitas Indonesia

- c. Dewan Syari'ah Daerah.
- (4) Struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang.
- (5) Struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa/dengan sebutan lainnya adalah Dewan Pengurus Ranting.
- (6) Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota.
- (7) Ketentuan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), dan (6), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB V

MAJELIS SYURA

Pasal 11

Majelis Syura adalah lembaga tertinggi Partai:

- (1) Berfungsi sebagai lembaga "*Ahlul Halli wal- 'Aqdi*" (Majelis Permusyawaratan) Partai; dipimpin oleh seorang Ketua;
- (2) Majelis Syura mempunyai tugas dan wewenang yaitu:
- a. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura segera setelah pelantikan Anggota Majelis Syura terpilih oleh Anggota Inti Partai.
 - b. Atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan:
 - 1) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat;
 - 2) Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat;
 - 3) Ketua Dewan Syari'ah Pusat; dan
 - 4) Beberapa orang tertentu sebagai Anggota Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syari'ah Pusat.
 - c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai.
 - d. Menetapkan Platform, Visi, dan Misi Partai.
 - e. Menetapkan Kebijakan Dasar dan Rencana Strategis Partai.
 - f. Menetapkan anggaran belanja Majelis Syura.
 - g. Membahas program kerja tahunan, rancangan anggaran, laporan umum, laporan penggunaan anggaran, dan laporan kekayaan Partai.
 - h. Membentuk komisi-komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Majelis Syura.
 - i. Mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
 - j. Menentukan sikap terhadap berbagai aliran, kelompok, dan permasalahan yang berkembang di Indonesia.
 - k. Menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat berdasarkan Putusan Majelis Syura,
 - l. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (3) Masa khidmah Majelis Syura adalah 5 (lima) tahun.

BAB VI
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT
Pasal 12

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah lembaga tinggi Partai:

- (1) Berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura;
- (2) Diketuai oleh Ketua Majelis Syura;
- (3) Beranggotakan:
 - a. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat,
 - b. Presiden Partai,
 - c. Ketua Dewan Syari'ah Pusat,
 - d. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, dan
 - e. Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melaksanakan Putusan Majelis Syura,
 - b. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Putusan Majelis Syura,
 - c. Menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura,
 - d. Mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan Partai di tingkat pusat,
 - e. Membuat kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pasangan calon gubernur/ wakil gubernur, dan pemilihan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta jabatan strategis lainnya,
 - f. Merekomendasikan nama-nama calon yang akan ditempatkan pada posisi jabatan-jabatan sebagaimana yang disebut pada huruf e,
 - g. Dapat menentukan sikap Partai, yang kemudian dilaporkan kepada musyawarah Majelis Syura berikutnya, dalam hal Majelis Syura tidak dapat melaksanakan Pasal 11 ayat (2) huruf j,
 - h. Menentukan sikap terhadap fitnah, kritik, pengaduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan Partai dan/atau Anggota Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai dan/atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku,
 - i. Menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan ditempatkan pada sebuah lembaga/organisasi, atau yang akan mengikuti kongres/seminar baik yang diadakan di dalam maupun di luar negeri,
 - j. Menugaskan kepada setiap Anggota Majelis Syura untuk mengadakan kunjungan kerja perseorangan ataupun bersama-sama di daerah pemilihannya atau daerah yang ditentukan.
 - k. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan Partai, memerintahkan Dewan Pengurus Pusat membekukan struktur organisasi dan/atau kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan/atau Dewan Syari'ah Wilayah melalui mekanisme yang diatur dalam Putusan Majelis Syura,
 - l. Membahas Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syari'ah Pusat, serta Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura,
- (5) Masa khidmah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah 5 (lima) tahun.

BAB VII
MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 13

Kedudukan, fungsi, tugas, dan masa khidmah Majelis Pertimbangan:

(1) a. Pada tingkat pusat adalah Majelis Pertimbangan Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syari'ah Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;

b. Pada tingkat provinsi adalah Majelis Pertimbangan Wilayah yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syari'ah Wilayah, dengan masa khidmah 4 (empat) tahun;

c. Pada tingkat kabupaten/kota adalah Majelis Pertimbangan Daerah yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Syari'ah Daerah, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun.

(2) Pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan adalah sebagai berikut:

a. Majelis Pertimbangan Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura;

b. Majelis Pertimbangan Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah;

c. Majelis Pertimbangan Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(3) Tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Pusat:

a. Memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syari'ah Pusat, terhadap perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program Partai untuk menjamin tetap sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan Majelis Syura;

b. Menetapkan dan mensosialisasikan Pedoman Partai;

c. Menetapkan/mengambil keputusan terhadap produk Peraturan Partai yang saling bertentangan atau tumpang tindih;

d. Membahas rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syari'ah Pusat;

e. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat;

f. Mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

BAB VIII
DEWAN PENGURUS
Pasal 14

Kedudukan, fungsi, tugas, dan masa khidmah Dewan Pengurus:

(1) a. Pada tingkat pusat adalah Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syari'ah Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;

b. Pada tingkat provinsi adalah Dewan Pengurus Wilayah yang berkedudukan

Universitas Indonesia

sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syari'ah Wilayah, dengan masa khidmah 4 (empat) tahun;

c. Pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Pengurus Daerah yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari'ah Daerah, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun;

d. Pada tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang, dengan masa khidmah 2 (dua) tahun;

e. Pada tingkat desa/kelurahan atau dengan sebutan yang lain adalah Dewan Pengurus Ranting, dengan masa khidmah 1 (satu) tahun.

(2) Pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pengurus Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura;

b. Dewan Pengurus Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah;

c. Dewan Pengurus Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah;

d. Dewan Pengurus Cabang berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang;

e. Dewan Pengurus Ranting berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.

(3) Tugas dan wewenang Dewan Pengurus Pusat:

a. Menetapkan dan mensosialisasikan Panduan Dewan Pengurus Pusat;

b. Melaksanakan Manhaj Tarbiyah (Sistem Pembinaan dan Pengkaderan) Partai dan mengontrol pelaksanaannya;

c. Presiden Partai melakukan pembekuan struktur organisasi dan/atau kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota tertentu, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan Partai, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;

d. Ketentuan tentang pembekuan struktur organisasi dan/atau kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat;

e. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

BAB IX

DEWAN SYARI'AH

Pasal 15

Kedudukan, fungsi, tugas, dan masa khidmah Dewan Syari'ah:

(1) a. Pada tingkat pusat adalah Dewan Syari'ah Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;

b. Pada tingkat provinsi adalah Dewan Syari'ah Wilayah yang berkedudukan

Universitas Indonesia

sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, dengan masa khidmah 4 (empat) tahun;

c. Pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Syari'ah Daerah yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun.

(2) Pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban Dewan Syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Dewan Syari'ah Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura;

b. Dewan Syari'ah Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Syari'ah Pusat melalui Musyawarah Wilayah;

c. Dewan Syari'ah Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Syari'ah Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(3) Tugas dan wewenang Dewan Syari'ah Pusat:

a. Menetapkan dan mensosialisasikan Fatwa dan Panduan Dewan Syari'ah Pusat;

b. Menetapkan putusan atas masalah-masalah syar'i yang dilimpahkan oleh Majelis Syura;

c. Menetapkan putusan atas masalah-masalah syar'i (qadha) di lingkungan Partai yang berasal dari Dewan Syari'ah Wilayah;

d. Menetapkan landasan syari'ah bagi Partai;

e. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

BAB X

DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH

Pasal 16

(1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah:

a. Majelis Pertimbangan Wilayah;

b. Dewan Pengurus Wilayah; dan

c. Dewan Syari'ah Wilayah.

(2) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah berkedudukan di ibu kota provinsi.

(3) Koordinator dan penanggung jawab musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah.

BAB XI

DEWAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH

Pasal 17

(1) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah:

a. Majelis Pertimbangan Daerah;

b. Dewan Pengurus Daerah;

c. Dewan Syari'ah Daerah.

(2) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

(3) Koordinator dan penanggung jawab musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah Ketua Majelis Pertimbangan Daerah.

BAB XII
DEWAN PENGURUS CABANG
Pasal 18

- (1) Struktur Partai di tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang.
- (2) Struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang diatur oleh Dewan Pengurus Daerah, dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

BAB XIII
DEWAN PENGURUS RANTING
Pasal 19

- (1) Struktur Partai di tingkat desa/kelurahan adalah Dewan Pengurus Ranting.
- (2) Struktur kepengurusan Dewan Pengurus Ranting diatur oleh Dewan Pengurus Cabang, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengurus Daerah.

BAB XIV
RANGKAP JABATAN
Pasal 20

Setiap Anggota Partai dilarang merangkap jabatan dalam seluruh kepengurusan Partai, kecuali keanggotaan dalam Majelis Syura dan Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota.

BAB XV
KEPENGURUSAN FRAKSI PARTAI
PADA LEMBAGA PERWAKILAN
Pasal 21

- (1) Partai dapat membentuk kepengurusan Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Fraksi adalah pelaksana kebijakan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas peran Partai di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan pembentukan kepengurusan Fraksi serta penempatan dan pemberhentian kepengurusan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Surat

Universitas Indonesia

Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;

c. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan pembubaran kepengurusan Fraksi serta penempatan dan pemberhentian anggota kepengurusan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Partai.

BAB XVI

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 22

(1) Partai menempatkan dan memberhentikan (pergantian antarwaktu) anggotanya pada lembaga perwakilan.

(2) Kewenangan pemberhentian (pergantian antarwaktu) anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:

a. Untuk anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;

b. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;

c. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian (pergantian antarwaktu) anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Partai.

BAB XVII

PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM KONDISI KHUSUS

Pasal 23

(1) Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan Partai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan tidak dapat meneruskan amanahnya, Partai dapat menunjuk pejabat sementara, pelaksana tugas harian, atau pejabat yang melaksanakan tugas.

(2) Ketentuan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XVIII
MUSYAWARAH
Pasal 24

- (1) Musyawarah adalah prinsip dalam pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh struktur organisasi Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, ijma (aklamasi), atau pemungutan suara (voting).
- (3) Jenis-jenis Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah:
- a. Musyawarah Majelis Syura,
 - b. Musyawarah Nasional,
 - c. Musyawarah Wilayah,
 - d. Musyawarah Daerah,
 - e. Musyawarah Cabang, dan
 - f. Musyawarah Ranting.

BAB XIX
HUBUNGAN KEORGANISASIAN
Pasal 25

- (1) Partai melakukan hubungan resmi dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
- (2) Ketentuan tentang hubungan keorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XX
KEUANGAN
Pasal 26

- (1) Keuangan Partai berasal dari:
- a. Iuran Anggota,
 - b. Sumber yang halal dan sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, dan
 - c. Bantuan dari anggaran negara.
- (2) Ketentuan mengenai keuangan dan perbendaharaan Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XX
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 27

- (1) Partai dapat memberi penghargaan kepada Anggota, Pengurus, atau struktur organisasi atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku disiplin berpartai.

Universitas Indonesia

(2) Partai menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pembebanan, pemberhentian sementara, penurunan jenjang keanggotaan, dan pemberhentian dari keanggotaan atas perbuatan Anggota yang melanggar aturan syaria'ah dan/atau organisasi, menodai citra Partai, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan Partai lainnya.

(3) Partai dapat memberi penghargaan kepada instansi, lembaga, dan orang perseorangan yang berjasa luar biasa kepada negara dan bangsa Indonesia, Dakwah Islamiyah, dan/atau Partai.

(4) Ketentuan yang mengatur tentang institusi, prosedur, dan tata cara penegakan disiplin, pemberian penghargaan, dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XXII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

(1) Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan atas usul Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan/atau Anggota Majelis Syura.

(2) Usul Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) orang Anggota Majelis Syura.

(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura dengan mencantumkan bab, pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah berikut alasannya dalam 1 (satu) naskah, dan harus ditandatangani oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah tersebut.

(4) Putusan diambil dengan persetujuan dua pertiga dari jumlah Anggota Majelis Syura.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Segala peraturan, struktur organisasi, dan badan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/ atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.

(2) Dalam hal pembentukan struktur Partai di suatu provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan di wilayah Republik Indonesia belum dapat dilakukan, Dewan Pengurus Pusat, atas izin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, menunjuk Perwakilan Partai, yang ketentuannya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

(3) Seluruh struktur organisasi Partai sudah sesuai dengan Anggaran Dasar ini paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Anggaran Dasar ini disahkan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu

dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini maka ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Putusan Majelis Syura.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/ atau Peraturan Partai lainnya.

Pasal 32

Perubahan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura III pada hari Sabtu tanggal 24 Syawwal 1426 H bertepatan dengan duapuluh enam November tahun duaribu lima (26-11-2005) di Jakarta, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

**MAJELIS SYURA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KETUA,**

HILMI AMINUDDIN

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB 1 TAFSIR LAMBANG PARTAI

Pasal 1 Arti Lambang Partai

Bentuk lambang partai memiliki arti sebagai berikut :

1. Kotak persegi empat berarti kesetaraan, keteraturan dan keserasian.
2. Kotak hitam berarti pusat peribadahan dunia Islam yakni Ka'bah
3. Bulan sabit berarti lambang kemenangan Islam , dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah.
4. Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istiqomah, berani dan ketegasan yang mewujudkan keajahteraan.

Warna lambang partai memiliki arti sebagai berikut :

1. Putih berarti bersih dan kesucian.
2. Hitam berarti aspiratif dan kepastian.
3. Kuning emas berarti kecermelangan, kegembiraan dan kejayaan.

Pasal 2 Makna Lambang Partai

Makna lambang partai secara keseluruhan adalah menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan dan kejayaan ummat dan bangsa.

Bab 2 SASARAN DAN SARANA.

Pasal 3 Sasaran

Untuk mencapai tujuan partai dirumuskan sasaran berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
2. Tegaknya 'Masyarakat Islami' yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.

Sasaran partai yang dimaksud ayat (1) pasal ini diupayakan dalam bingkai Kebijakan Dasar Periodik dan Agenda Nasional Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ini.

Pasal 4 **Sarana dan Prasarana**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya partai menggunakan cara, sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umum, antara lain:

1. Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.
2. Ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, hukum dan perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.
3. Menggalakkan dialog konstruktif disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial.
4. Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasan yang sesuai dengan tujuan partai.

Bab 3 **KEANGGOTAAN**

Pasal 5 **Sistem dan Prosedur Keanggotaan**

Anggota Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari :

1. Anggota Kader Pendukung, yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian.
2. Anggota Kader Inti, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penyeleksian.
3. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Sistem dan prosedur keanggotaan serta hal-hal yang terkait dengan keanggotaan partai diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

Bab 4 **MAJELIS SYURO**

Pasal 6 **Anggota Majelis Syuro**

1. Syarat keanggotaan Majelis Syuro sebagai berikut :
 1. Umur tidak kurang dari 30 tahun qomariyah
 2. Telah menjadi anggota kader inti dengan status anggota ahli Partai
 3. Melaksanakan asas dan tujuan partai
 4. Komitmen dengan kewajiban-kewajiban anggota
 5. Berkelakuan baik dan tidak mendapatkan sanksi dalam 3 tahun terakhir.
 6. Berwawasan syar'i
 7. Bersifat amanah dan berwibawa
2. Jika ada anggota Majelis Syuro berhalangan tetap maka majelis berhak mengangkat dan mensahkan pengantinya.
3. Majelis Syuro berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Partai, terdiri dari para pakar dan tokoh dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 15 % anggotanya.
4. Jika anggota Majelis Syuro telah dipilih, maka masing-masing mengucapkan janji setianya di hadapan Musyawarah Nasional, dengan bunyi sebagai berikut:

'Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh pada syari'at Islam dan untuk berjihad di jalan-Nya, menunaikan syarat-syarat keanggotaan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, melaksanakan tugas-tugas darinya dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya dalam keadaan lapang maupun sempit -selain untuk maksiat-, sekuat tenaga melaksanakannya. Dan saya bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk itu, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.

Pasal 7

Tugas Majelis Syuro

1. Memilih dan menetapkan Ketua majelis, Wakilnya dan Sekretaris Majelis dan menetapkannya sebagai ketua, wakil dan sekretaris Majelis Pertimbangan Partai.
2. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Partai.
3. Memilih, dan menetapkan Ketua, Wakil dan Anggota Dewan Syari'ah Pusat
4. Memilih, dan menetapkan Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jendral dan Bendahara Umum serta beberapa orang Anggota Dewan Pimpinan Pusat.
5. Menyusun tujuan-tujuan Partai, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Nasional.
6. Menetapkan klausul-klausul perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) dan kebijakan politik.
7. Menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dari laporan keuangan.
8. Menetapkan rencana kerja periodik partai, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaannya.

9. Mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal pencemaran nama baik, kritik, pengaduan, dan tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan partai.

Bab 5

MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI

Pasal 8

Anggota Majelis Pertimbangan Partai

Majelis Pertimbangan Partai terdiri dari sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syuro yang dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya.

Pasal 9

Majelis Pertimbangan Partai

1. Menjabarkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro
3. Menentukan sikap Partai terhadap permasalahan-permasalahan umum dan perubahan-perubahan politik secara regional, dunia Islam atau internasional bersama Dewan Pimpinan Pusat.
4. Mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Sidang-sidang Majelis Syuro.
5. Merekomendasikan kebijakan program pemilihan umum dan melegalisir calon-calon partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Menunjuk perwakilan (wakil) Partai pada lembaga-lembaga, organisasi dan kongres-kongres di dalam dan luar negeri bersama Dewan Pimpinan Pusat.
7. Meratifikasi langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja politik (strategis).
8. Meratifikasi anggaran proyek yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat sebelum diajukan ke Majelis Syuro.
9. Meratifikasi pengajuan struktur dan personil Bidang Dewan Pimpinan Pusat.
10. Mengambil tindakan tegas dalam hal fitnah, kritik, aduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan partai dan anggotanya.
11. Majelis berhak membentuk komisi ad-hoc yang terdiri dari unsur anggota Majelis Syuro dan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya.

Bab 6

DEWAN SYARI'AH

Pasal 10

Syarat Anggota Dewan Syari'ah

1. Umur Ketua dan wakil ketua Dewan Syari'ah Pusat tidak kurang dari 35 tahun qomariyah.
2. Umur Ketua dan Wakil ketua Dewan Syari'ah Wilayah tidak kurang dari 30 tahun qomariyah.
3. Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli Partai.
4. Berpegang dan komitmen kepada nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur dan bijaksana.
5. Memiliki pengetahuan hukum-hukum syariat yang memadai, bersifat amanah dan berwibawa.
6. Memiliki pengetahuan di Bidang peradilan dan menguasai mekanisme pengambilan keputusan.

Pasal 11

Fungsi Dewan Syari'ah

1. Sebagai Lembaga Fatwa.
2. Sebagai Lembaga Qadha yang keputusan-keputusannya mengikat.
3. Pelaksana tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.
4. Lembaga Peradilan Banding.

Pasal 12

Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah

1. Memberikan landasan syar'i terhadap kebijakan-kebijakan dan persoalan-persoalan yang dihadapi partai.
2. Melakukan pembinaan terhadap Dewan Syari'ah Wilayah.
3. Melakukan kajian terhadap perkara-perkara yang tidak terselesaikan di Dewan Syari'ah Wilayah.
4. Melakukan investigasi terhadap isu, pengaduan, tuduhan, evaluasi dan kesewenangan yang berkaitan dengan Pimpinan Partai dan mengungkapkan hasilnya kepada Majelis Syuro. Khusus yang berkenaan dengan Ketua Umum Partai atau Ketua Majelis Syuro atau Ketua Majelis Pertimbangan Partai atau Ketua Dewan Syari'ah Pusat untuk kasus yang menyangkut dirinya dilakukan oleh komisi khusus yang dibentuk oleh Majelis Syuro.
5. Mengambil tindakan syar'i dalam masalah-masalah yang diserahkan Dewan Pimpinan Pusat, atau Dewan Syari'ah Wilayah kepadanya.
6. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Syari'ah Pusat kemudian mengajukannya kepada Majelis Syuro.
7. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

Pasal 13

Klasifikasi Pelanggaran dan Hukuman

1. Setiap perbuatan anggota yang menodai citra partai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan Anggaran Dasar atau Anggaran

Rumah Tangga partai adalah pelanggaran yang harus dikenakan sanksi hukum.

2. Klasifikasi pelanggaran berikut hukuman dan cara pelaksanaannya, di atur oleh ketentuan Dewan Syari'ah yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

Bab 7

TUGAS DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 14 :

Tugas Konsepsional

1. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukannya kepada Majelis Pertimbangan Partai.
2. Mengajukan rancangan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada Majelis Pertimbangan Partai.
3. Menetapkan Produk-produk konsepsional untuk Bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.

Pasal 15

Tugas Stuktural

1. Menerima waqaf, hibah dan dana sukarela yang legal.
2. Menyerahkan laporan keuangan dan evaluasi akhir kepada Majelis Pertimbangan Partai.
3. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada Majelis Pertimbangan Partai.
4. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

Pasal 16

Tugas Manajerial

1. Menunjuk ketua-ketua Bidang dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Partai.
2. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
3. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai.
4. Mensahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah
5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 17

Tugas Operasional

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.
2. Menerbitkan pernyataan-pernyataan resmi.

3. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai Bidang.
4. Melaksanakan koordinasi anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berasal dari anggota kader partai.

Bab 8

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 18

Struktur Dewan Pimpinan Wilayah

Dewan Pimpinan Wilayah adalah lembaga eksekutif tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua Umum dan beberapa ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Deputi-deputi.

Pasal 19

Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
4. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Wilayah sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 20

Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah

1. Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.

Bab 9

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 21

Struktur Dewan Pimpinan Daerah

Dewan Pimpinan Daerah didirikan pada tingkat kabupaten/kotamadya yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kotamadya dengan struktur sebagai berikut

1. Ketua Umum dan beberapa ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Bagian-Bagian.

Pasal 22

Tugas Dewan Pimpinan Daerah

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Daerah dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Daerah.
5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Daerah sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 23

Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah

1. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota dewasa.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.

Bab 10

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 24

Struktur Dewan Pimpinan Cabang

Dewan Pimpinan Cabang didirikan pada tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibukota kecamatan dengan struktur sebagai berikut

1. Ketua dan Wakil ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Seksi-Seksi.

Pasal 25

Tugas Dewan Pimpinan Cabang

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Cabang.
5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 26

Syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang

1. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota madya.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 20 tahun qomariyah.

Bab 11

DEWAN PIMPINAN RANTING

Pasal 27

Struktur Dewan Pimpinan Ranting

Dewan Pimpinan Ranting didirikan pada tingkat kelurahan/desa dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Unit-Unit.

Pasal 28

Tugas Dewan Pimpinan Ranting

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dan Dewan Pimpinan Cabang.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Ranting kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang.
3. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Ranting.
4. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Ranting sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
5. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 29

Syarat-syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Ranting

1. Telah menjadi kader pendukung partai dengan status anggota muda.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari ananisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 18 tahun qomariyah.

Bab 12

KEUANGAN

Pasal 30

Sumber Keuangan

Kekayaan Partai diperoleh dari :

1. Iuran, infaq wajib, dan shadaqah yang berasal dari anggota.
2. Infaq dan shadaqah dari luar anggota.
3. Sumbangan dan bantuan tetap atau tidak tetap dari masyarakat atau orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada aktifitas Partai yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
4. Waqaf, wasiat dan hibah-hibah lainnya.

Pasal 31
Pemungutan Iuran dan Infaq Anggota

Partai mempunyai hak untuk mengambil iuran, infaq dan shadaqah dari anggotanya.

Pasal 32
Penyaluran/Pengalokasian Dana

1. Partai mempunyai hak untuk menentukan penyaluran dan atau pengalokasian dana Partai.
2. Dana Partai yang tidak segera digunakan untuk kepentingan aktifitas Partai, pengaturannya ditentukan oleh Majelis Syuro.

Pasal 33
Tugas Bendahara Partai

1. Mengatur kekayaan Partai.
2. Mencatat semua harta Partai dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.
3. Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik.
4. Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.

Bab 13
HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 34
Asas Hubungan Keorganisasian

1. Hubungan dengan oragisasi yang sejenis baik vertikal maupun horizontal atas asas wala' dan ta'awun.
2. Hubungan dengan organisasi Islam atas asas ukhuwah dan ta'awun.
3. Hubungan dengan organisasi umum atas asas kemanusiaan dan kemaslahatan umum yang dibenarkan Islam.

Pasal 35
Hubungan Antar Struktur

1. Hubungan lembaga tertinggi partai dengan lembaga-lembaga di bawahnya bersifat langsung.
2. Hubungan antar lembaga tinggi partai tingkat pusat bersifat langsung, melalui Pimpinan masing-masing.
3. Hubungan lembaga tinggi partai dengan lembaga organisasi partai tingkat wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenangnya.

4. Hubungan departemen di Dewan Pimpinan Pusat dengan deputi terkait di Dewan Pimpinan Wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenang dan kebutuhan, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Apabila departemen di Dewan Pimpinan Pusat tidak mempunyai turunannya di Dewan Pimpinan Wilayah maka departemen tersebut dapat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
6. Hubungan antar pimpinan partai tingkat wilayah dengan struktur di bawahnya, mengikuti pola hubungan antar level kepemimpinan partai seperti tersebut dalam ayat 2 sampai dengan 5 pasal ini..
7. Hubungan lembaga-lembaga struktural di tingkat bawah dengan lembaga-lembaga di atasnya mengikuti mekanisme struktural yang telah ditetapkan.

Bab 14

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 36

Ketentuan Tambahan

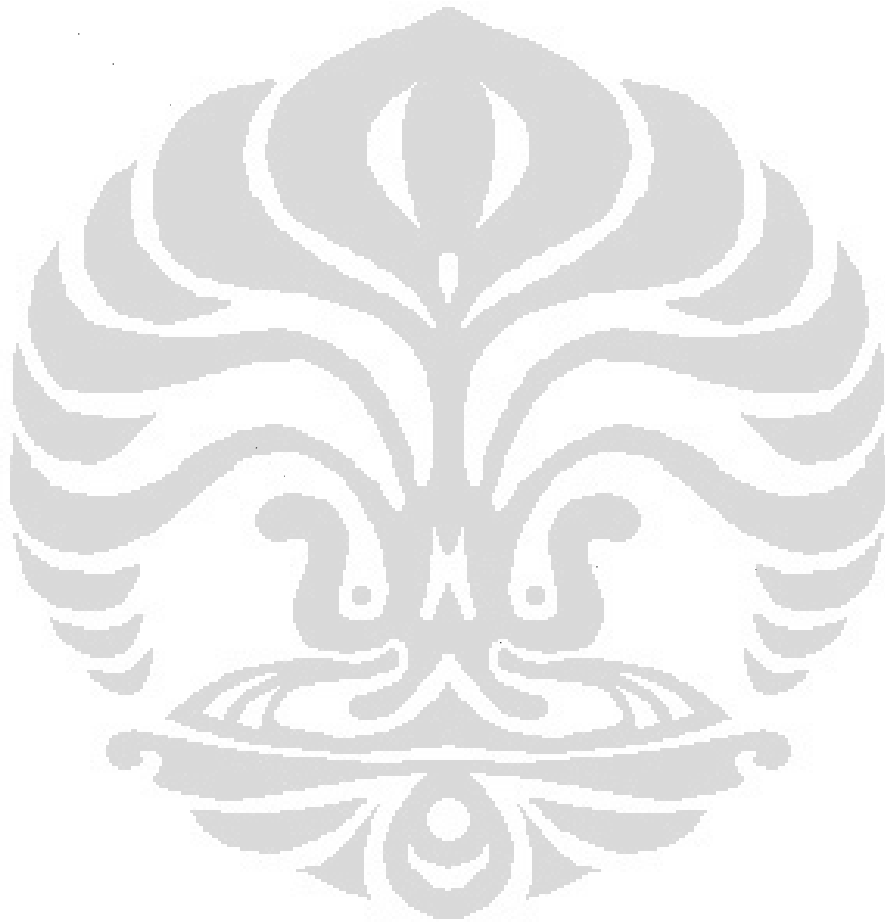
1. Untuk memperluas jaringan kerja dan menampung aspirasi pendukung partai, maka :
 1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk kepengurusan Majelis Kehormatan dan Dewan Pakar,
 2. Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk kepengurusan Dewan Pakar,
 3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk kepengurusan Dewan Penasehat, dan
 4. Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk kepengurusan Dewan Pembina, yang diatur oleh peraturan khusus yang ditetapkan Majelis Syuro.
2. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan kader dari jenjang keanggotaan di bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis Pertimbangan Partai.
3. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan kader dari jenjang keanggotaan di bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
4. Didirikan perwakilan Partai di kalangan warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan khusus yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan.

Bab 15

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Penutup

Dalam hal belum dilaksanakannya Musyawarah Nasional I, maka para pendiri partai bertindak dan melaksanakan tugas selaku Majelis Syuro



VISI DAN MISI

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

VISI

Visi Umum:

- "SEBAGAI PARTAI DA'WAH PENEGAK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN BANGSA."

Visi Khusus:

- PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil 'alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

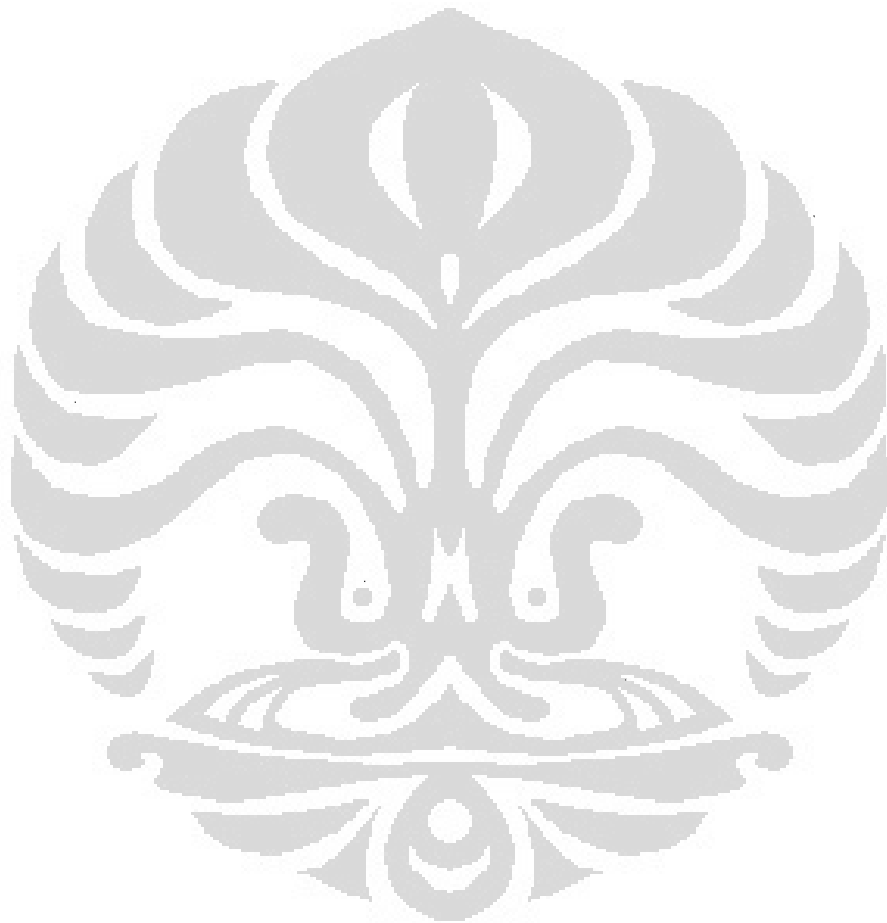
MISI

1. Menyebarkan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen

Universitas Indonesia

bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.



Universitas Indonesia

KEBIJAKAN DASAR

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PENGANTAR

Segala puji dipanjatkan kepada Allah, Rabb sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, shahabat, dan para pejuang risalah yang disampaikannya sampai akhir zaman.

Terima kasih disampaikan kepada semua yang terlibat dalam penyusunan ini, terutama para anggota tim yang telah bersusah payah dan bekerja keras dengan mengerahkan tenaga dan pikiran demi terlaksananya tugas tersebut, serta yang telah melakukan pembahasan secara seksama terhadap draft yang telah disediakan. Semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah dan menjadi bekal bagi kehidupan akhirat nanti.

"Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali." Hanya kepada Allah kita berserah diri.

I. PENDAHULUAN

A. LANDASAN

1. Firman Allah,

Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)." (QS, al-Syura: 13)

2. Firman Allah,

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi

Universitas Indonesia

aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik" (QS, al-Nur: 55)

3. Firman Allah,

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga `Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." (QS, al-Shaff: 10-13)

4. Firman Allah,

Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (QS, al-An'am: 153)

5. AD/ART (Muqoddimah dan Tujuan).

B. DASAR PEMIKIRAN

Islam adalah sistem integral yang mampu membimbing umat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan pribadi (futuḥ khashah) dan kemenangan politik (futuḥ ʿammah). Kemenangan pribadi diraih dengan ketaqwaan yang bersifat individu, sedangkan kemenangan politik diraih dengan ketaqwaan kolektif. Da'wah yang sistemik dan terus-menerus adalah satu-satunya jalan menuju dua kemenangan tersebut

Realitas masyarakat Indonesia saat ini menunjuk kan tengah terjadinya deviasi sistemik kehidupan ber masyarakat dari sendi-sendi tuntunan ilahiyah dalam hampir semua sendi kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Akibat hal tersebut terjadilah berbagai malapetaka yang menimpa bangsa ini dalam berbagai sisi kehidupan. Diyakini, sebuah bangsa akan terbebas dari segala bentuk malapetaka yang menakutkan apabila bangsa tersebut memurnikan keimanannya kepada Allah dan secara konsisten merealisasikan seluruh hukum-hukum-Nya. (QS.6 : 81-82).

Untuk mengembalikan masyarakat kepada tun tunan Allah diperlukan gerakan dakwah, yang pada hakikatnya merupakan proses tahawwul wa taghayyur

Universitas Indonesia

(transformasi dan perubahan) menuju tatanan kehidupan yang islami, baik pada level perorangan maupun pada level kemasyarakatan dan kenegaraan. Gerakan da'wah akan efektif apabila didukung oleh manhaj, uslub dan wasilan yang jelas serta tanpa ragu terjun ke sektor kehidupan, termasuk wilayah politik.

Namun, ketika gerakan dakwah memasuki wilayah kemasyarakatan dan kenegaraan, mau tidak mau dia akan berhadapan dengan berbagai kendala internal dan tantangan eksternal yang harus disikapi dan dihadapi dengan penuh perhitungan agar cita-cita dakwah dapat dicapai dengan baik. Untuk itu diperlukan sebuah perspektif dan kerangka kerja yang menjadi patokan dasar aktifitas Partai serta menjadi guidance bagi aktifis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktifitas sosial politik. Perspektif, patokan dasar dan guidance itu dirumuskan dalam bentuk Kebijakan Dasar Partai.

Dengan kebijakan dasar yang jelas diharapkan seluruh proses perjalanan Partai dan aktifitasnya tetap berada dalam bingkai da'wah. Dengan demikian jati diri Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Da'wah merefleksi ke seluruh sikap, perilaku dan aktifitasnya.

C. TUJUAN

Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera ini dimaksudkan untuk :

1. Meletakkan perspektif dan kerangka kerja Partai dalam menyusun dan mengoperasionalkan program-program strategis.
2. Memberikan kerangka umum kepada Partai untuk memudahkan dalam penyusunan program aksi dan langkah-langkah operasionalnya.
3. Menjadi patokan umum dalam memposisikan Partai sebagai kekuatan politik dalam berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat.
4. Menjadi guidance bagi aktivis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktivitas sosial politik.

II. VISI DAN MISI

A. VISI

Visi Umum:

- "SEBAGAI PARTAI DA'WAH PENEGAK Keadilan dan KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN BANGSA."

Visi Khusus:

- PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.

Universitas Indonesia

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil \diamond alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

B. MISI

1. Menyebarkan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

III. PRINSIP KEBIJAKAN

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah da'wah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu da'wah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah da'wah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.

Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.

Universitas Indonesia

1. Al-Syumuliyah (Lengkap dan Integral)

Sesuai dengan karakteristik da'wah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan Partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, memandangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

2. Al-Ishlah (Reformatif)

Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaikan (ishlah), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka menegakkan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya, dan menegakkan daulah-Nya.

3. Al-Syar'iyah (Konstitusional)

Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (hablun min Allah) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (hablun min al-nas). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (al-istimsak) kepada al-haq, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan komprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibilitas sebagai ciri dari syari'at Islam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian referensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisasikan amanah dan melawan kedhaliman.

4. Al-Wasathiyah (Moderat)

Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (ummatan wasatha). Simbol moralitas masyarakat Islam tersebut melahirkan perilaku, sikap, dan watak moderat (wasathiyah) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. Al-wasathiyah yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek nazhariyah (teoritis) dan amaliyah (operasional) atau aspek tarbiyah (pendidikan) dan tasyri'iyah (perundang-undangan) harus merefleksikan pada aspek ideologi ataupun tashawwur (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), tasyri' dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksagerasi kezhaliman dan kebathilan.

5. Al-Istiqamah (Komit dan Konsisten)

Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap gerakannya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional Partai harus istiqamah (taat asas) pada "hukum transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kawaniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal (al-Qur'an dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinuitas (al-istimrar) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.

6. Al-Numuw wa al-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang)

Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip al-numuw wa al-tathawwur (pertumbuhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal.

7. Al-Tadarruj wa Al-Tawazun (Bertahap, Seimbang dan Proporsional)

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah Partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fithrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (tadarruj dan tawazun) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukungnya ataupun kiprah kolektifnya.

8. Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan)

Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan

Universitas Indonesia

yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip al-awlawiyat dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip al-awlawiyat dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya mashlahah ummah menjadi dasar dan prinsip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsern terhadap semua persoalan yang dihadapi ummat. Kepentingan ummat selalu menjadi pertimbangan dan prioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan ummat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.

9. Al Hulul (Solusi)

Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan ihsan dan itqon (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.

10. Al-Mustaqbaliyah (Orientasi masa depan)

Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak menge nyamping kan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18).

10. Al-'Alamiyah (Bagian dari da'wah sedunia)

Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat ♦alamiyah (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi sunnatudda'wah. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da'wah ♦alamiyah. Oleh sebab itu

prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da'wah sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan da'wah yang bersifat ♦ alami dan tunduk pada sunnatudda'wah tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.

IV. KEBIJAKAN DASAR

Kebijakan Dasar Partai dapat dilihat dalam dua rumusan yaitu Kebijakan Umum dan Strategi Umum. Kebijakan Umum dijabarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup kehidupan sehari-hari partai yaitu Ideologi, Politik, Birokrasi, Ekonomi dan Kesejahteraan, Sosial Budaya, IPTEK dan Hukum. Sementara itu, Strategi Umum ditempuh melalui dua hal yaitu Kebijakan Internal dan Eksternal .

A. Kebijakan Umum :

1. Ideologi

Diprediksi kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring penguatan ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik. Oleh sebab itu perlu ditetapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktivis partai.

1. Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi ummat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.
2. Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT ; pembebasan manusia dari kefajiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam ; dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.
3. Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politiknya di atas tiga prinsip
 - Pertama : Kemenyeluruhan dan finalitas sistem Islam,
 - Kedua : Otoritas syari'ah yang bersumber dari al-Qur♦an dan al-Sunnah, dan ijtihad.
 - Ketiga : Kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat.

2. Politik

1. Pembangunan sistem
Memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan
2. Pembangunan komunikasi politik
Komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal

Universitas Indonesia

yang disampaikan. Dikarenakan komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau berpartisipasi dalam politik maka diperlukan beberapa kerangka dasar yang dapat dijadikan guidance para aktivis dalam komunikasi politik.

1. i. Penysadaran umum pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi terhadap persoalan bangsa dan negara.
2. ii. Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunikasi antara Partai dan masyarakat
3. Pembangunan budaya politik
 1. Mengokohkan Islam sebagai sumber nilai budaya dalam kehidupan politik
 2. Mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik
 3. Membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik
 4. Mengembangkan budaya hisbah.
4. Pembangunan partisipasi politik
 1. Penumbuhan kondisi yang menyebabkan lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi politik melalui Partai Keadilan Sejahtera secara sukarela.
 2. Mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik orang untuk berpartisipasi secara bebas.
5. Hubungan eksternal
Pola ta'awun \blacklozenge alal birri wat taqwa (bekerja sama dalam merealisasikan kebajikan dan taqwa), dan tidak ta'wun \blacklozenge alal ismi wal \blacklozenge udwan (bekerja sama dalam dosa dan melanggar hukum) adalah merupakan prinsip dasar dalam membangun kerja sama. Selain itu Al-Wala merupakan asas hubungan sesama muslim. Sedangkan al-Barra merupakan asas hubungan dengan orang-orang kafir. Dalam rangka optimalisasi prinsip dasar hubungan sesama manusia dalam perspektif Islam itu perlu kebijakan umum.
 1. Bersikap cinta, ta'awun, dan loyal dengan partai, organisasi, dan lembaga-lembaga Islam, baik di dalam ataupun di luar negeri.
 2. Aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk terciptanya kerjasama, ukhuwwah, dan persatuan antara lembaga-lembaga Islam.
 3. Membudayakan sikap husnuzhan (baik sangka) terhadap sesama organisasi Islam
 4. Bersikap tegas terhadap semua institusi yang mengusung dan mengibarkan bendera kekufuran.
6. Pemilu 2004
Menghadapi Pemilu 2004 nanti diperkirakan skala persaingan antarpartai politik semakin luas. Di sisi lain, diterapannya sistem semi distrik (berdasar Undang-undang Pemilu yang baru), seiring dengan menguatnya tuntutan desentralisasi, memerlukan kebijakan dan strategi baru. Dalam kaitan ini Partai Keadilan Sejahtera menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Mengikuti Pemilu tahun 2004 dengan bendera Partai Keadilan Sejahtera
2. Menentukan kawasan-kawasan unggulan untuk sukses dakwah melalui Pemilu yang rinciannya akan ditentukan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera
3. Komitmen untuk memenuhi kuota perempuan dalam Pemilu dengan mencalonkan dari kalangan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
4. Mempercepat proses pembentukan Dewan Pakar di tingkat pusat dan daerah dan mengefektifkannya sebagai sarana rekrutmen tokoh potensial.
5. Memperkuat struktur dan SDM di Dati II sebagai langkah antisipasi diberlakukannya otonomisasi daerah dan Sistem Semi Distrik.
6. Memperkuat lini dan akses ekonomi dan menggalakkan tabungan Pemilu.

3. Birokrasi

Setidak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini :

- Pertama : kebobrokan di semua sektor,
- Kedua : menjadi sarang KKN, dan

Ketiga : tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi untuk memunculkan clean government. Sebagai konsekuensinya perlu Partai memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan islah al-hukumah dengan kebijakan:

1. Lebih memperhatikan birokrasi dengan memasukkan anasir-anasir taghyir internal untuk menuduki jabatan strategis dengan tetap berpegang pada asas kepatutan dan akhlak karimah.
2. Membentuk wadah independen bagi pegawai yang bekerja di pemerintahan.
3. Menjadi pelopor dalam pemberantasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat.
4. Melakukan kontrol secara aktif.

4. Ekonomi dan Kesejahteraan

Kemandirian dalam memenuhi kedua cost dapat membantu terciptanya kesejahteraan yang merata juga merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah struktur partai. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis dan konkret dalam upaya menumbuhkan kemandirian tersebut.

1. Menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam perilaku dan kebijakan ekonomi.
2. Membangun kekuatan ekonomi ummat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi yang mandiri betapa pun kecilnya dan memberantas KKN, sistem kartel dan monopoli yang menghancurkan ekonomi rakyat.
3. Memelihara kekayaan ummat secara umum dengan mendorong berkembangnya industri dan proyek-proyek ekonomi Islam.
4. Tidak membiarkan begitu saja satu keping mata uang jatuh ke tangan musuh-musuh ummat.
5. Menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak
6. Memperbanyak usaha-usaha solutif dan pilot project untuk memajukan ekonomi rakyat bekerjasama dengan berbagai pihak yang komitmen baik di dalam maupun luar negeri.

5. Sosial Budaya

Kecenderungan membiarkannya deviasi sistemik pada bidang sosial budaya, pengabaian nilai-nilai luhur yang diringi dengan menguatnya kultur materialisme, dan dahsyatnya serbuan budaya pop yang dibarengi dengan kecenderungan distorsi pemahaman keagamaan bagi sebagian besar masyarakat muslim telah menjadi fenomena umum. Hal itu melahirkan kondisi lingkungan sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam. Kondisi seperti itu, jika lemah dalam pemberan tasannya, dapat menyerang lingkungan yang semula baik. Oleh sebab itu Partai perlu mengantisipasi sedini mungkin setidaknya-tidaknya untuk membentengi diri dari tertularnya berbagai penyimpangan tersebut dengan menetapkan kebijakan umum berikut:

1. Membangun imunitas individu, keluarga, dan masyarakat dari berbagai virus sosial budaya yang dapat merusak jati diri kaum muslimin.
2. Mengembangkan produk-produk budaya Islam baik dalam bentuk keteladanan ataupun dalam bentuk kesenian.
3. Aktif dalam mewujudkan perundang-undangan yang meninggikan budaya bangsa dan mengkoreksi budaya yang merusak.

6. IPTEK dan Industri

IPTEK dan industri merupakan syarat bagi kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Sedangkan kebahagiaan hakiki hanya mungkin tercapai apabila manusia mampu memahami kehendak Allah yang dimanifestasikan di dalam hukum-hukum-Nya dan aplikasi yang tepat mengenai hukum-hukum itu melalui aktivitas etis, aktifitas sosial dan teknologi yang dikendalikan secara etis. Untuk itu perlu sebuah kebijakan yang dapat mengarahkan IPTEK dan Industri untuk kebahagiaan manusia.

1. Penguasaan bidang IPTEK dan Industri sebagai syarat kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.

2. Menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan aplikasi IPTEK, sehingga menjadi rahmat bagi manusia.
3. Mengembangkan IPTEK terapan untuk membantu akselerasi penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas SDM ummat.
4. Menumbuhkembangkan sentra-sentra industri yang strategis untuk kemajuan ekonomi ummat dan bangsa.

7. Peran dan Tugas wanita

Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (istikhlaf) merupakan tugas kolektif manusia (laki-laki dan wanita) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip 'kemitraan' dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidaknya-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan persamaan dalam tanggungjawab beserta balasannya. Kenyataan lain menunjukkan partisipasi wanita dalam siasah, terutama dalam perolehan suara pada Pemilu, sangat signifikan. Oleh sebab itu Partai perlu memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan wanita dalam politik.

1. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya.
2. Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah.
3. Keseimbangan hak pemberdayaan politik.
4. Keseimbangan proporsional dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
5. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontemporer wanita yang berkembang di masyarakat.
6. Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik.

8. Hukum

Sejatinya hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Tuhan, terhadap makhluk lain, terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan manusia hukum dapat diperlukan memiliki supremasi demi menjamin keteraturan dan menghindari kekacauan. Dalam rangka turut menegakkan supremasi hukum di Indonesia maka Partai Keadilan Sejahtera perlu menentukan kebijakan dasar sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya supremasi hukum didalam kehidupan masyarakat
2. Membangun kesiapan masyarakat untuk secara bertahap menerima syariat Islam melalui cara-cara yang syar'i dan konstitusional
3. Memperjuangkan secara struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang masyarakat telah siap menerimanya

4. Mempraktekkan ajaran Islam dan syariatnya secara istiqomah, sebagai solusi, keteladanan dan rahmat bagi kehidupan.

9. Pendidikan:

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang seyogyanya ditangani secara serius dan bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan adalah dasar pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan otentik bangsa. Maka setiap upaya pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar suatu bangsa akan melahirkan generasi yang rapuh dan lepas dari akar kekuatannya.

1. Mengupayakan secara sungguh-sungguh terselenggaranya sistem pendidikan integral yang menjamin lahirnya generasi yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan trampil.
2. Melindungi anak bangsa dari sasaran rekayasa pendangkalan aqidah dan pemurtadan yang berkedok aktivitas pendidikan.
3. Memperjuangkan model pendidikan yang terjangkau seluruh elemen masyarakat dan berkualitas.

B. Strategi Umum :

Memperhatikan trend umum perubahan yang terjadi dewasa ini diperlukan suatu kebijakan dasar untuk menghadapi dan menuju perubahan ke depan. Untuk itu diperlukan adanya strategi umum yang berkaitan dengan konsolidasi internal dan ekspansi eksternal :

1. Konsolidasi Internal.

1. a. Konsolidasi internal dengan sasaran pengokohan barisan, antisipasi tekanan, dan penataan perubahan:
 1. Mengokohkan komitmen ideologis dan doktrin perjuangan.
 2. Mengembangkan keutuhan fikrah dan keluasan wawasan.
 3. Memperkuat ruh mahabbah, ta'awun dan ukhuwah sesama kader.
 4. Mengintensifkan arus komunikasi dua arah antara struktur dan basis kader/pendukung serta mengembangkan budaya amal-jama'i dengan ruh jundiyah.
2. b. Konsolidasi internal dengan sasaran pengembangan syiar Islam, perluasan basis sosial dan opini umum, dan pengokohan dukungan politik:
 1. Meningkatkan kesadaran tentang wa'yu amni dan siyasi.
 2. Meningkatkan kemampuan identifikasi dan kalkulasi terhadap gerak unsur-unsur kekuatan yang menjadi musuh Islam (yaitu musuh secara ideologis, politis, ekonomis maupun sosial-budaya) di kawasan tanggung-jawab da'wah nya.
 3. Mengembangkan kemampuan pertahanan diri pada setiap kader.

Universitas Indonesia

4. Mengintensifkan ta'umul ijtimai' dengan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh setempat, termasuk aparat dan birokrasi pemerintahan dalam rangka menyerap informasi dan membangun dukungan sosial.
3. c. Konsolidasi internal untuk menata perubahan :
 1. Menumbuhkan kemampuan elemen struktur dan kader untuk memahami kondisi geografis-demografis-politis yang menjadi wilayah tanggung-jawab da'wahnya.
 2. Meningkatkan penguasaan konsep sional dan metode-metode perubahan masyarakat serta pola-pola pengelolaannya.
 3. Meningkatkan efektifitas struktur dalam mengorganisir agenda da'wah, dan melakukan perencanaan strategis sampai tingkat DPD dan menjadikan DPC dan DPRa sebagai ujung tombak ekspansi da'wah di daerahnya.
4. d. Konsolidasi internal tentang Organisasi, Kaderisasi dan Pengembangan SDM:

Mengingat tantangan masa depan da'wah begitu kompleks dan karenanya memerlukan kelincahan bergerak maka perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menentukan kebijakan dasar tentang organisasi, kaderisasi dan pengembangan SDM:

 1. Melakukan reorganisasi partai yang disesuaikan dengan tantangan ke depan.
 2. Membangun pusat-pusat kaderisasi di setiap wilayah dan daerah.
 3. Mengalokasikan secara proporsional potensi SDM Partai pada lembaga-lembaga strategis dan pusat-pusat perubahan.
 4. Menetapkan doktrin perjuangan dan prosedur disiplin organisasi bagi kader untuk mengokohkan militansi ideologis, pemikiran dan gerakan.

2. Ekspansi Eksternal

1. a. Ekspansi eksternal melalui pengembangan syi'ar Islam dan pelayanan sosial:
 1. Memperluas wilayah-wilayah jangkauan da'wah secara geografis dan demografis.
 2. Mengoptimalkan peran media massa dan figur-figur massa dan lembaga-lembaga sosial yang dikelola.
 3. Memperkuat sosialisasi simbol-simbol Islam melalui berbagai media publikasi.
2. b. Ekspansi eksternal untuk memperbesar basis sosial:
 1. Menata personil da'wah dan lembaganya dan meningkatkan aktifitas pembinaan ke berbagai segmen strategis.
 2. Mengembangkan lembaga pendidikan Islam.
 3. Meningkatkan kerjasama da'wah dengan berbagai lembaga, organisasi maupun tokoh-tokoh da'wah.
3. c. Ekspansi eksternal untuk memperluas opini umum:

1. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya media massa yang merusak.
2. Memberdayakan dan mengembangkan media massa internal.
3. Mengefektifkan program-program munasharah dan informasi dunia Islam.
4. Menajamkan kegiatan-kegiatan nadawaat dan sejenis.
4. d. Ekspansi eksternal untuk memperkokoh dukungan politik:
 1. Memperkuat dukungan sosial dan politik.
 2. Optimalisasi peran dan publikasi misi kerja SDM yang ada di legislatif, eksekutif dan birokrasi.
 3. Mendirikan LSM-LSM dan mengembangkan aksi-aksi advokasi sosial, hukum dan politik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah,.
 4. Mengefektifkan instrumen kekuatan politik mahasiswa dan kalangan profesi dalam memperjuangkan agenda reformasi secara berkelanjutan.
 5. Melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan.
 6. Membangun jaringan lobby ke pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan politik yang tersedia.
 7. Mengefektifkan komunikasi dengan partai-partai Islam, partai-partai reformis, ormas-ormas Islam maupun tokoh masyarakat.

V. PENUTUP

Demikianlah beberapa rumusan Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional Pertama Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan pensosialisasian, pendalaman dan pengayaan agar strategi, langkah, dan operasionalisasi yang akan diambil oleh Partai lebih dapat dipertanggungjawabkan.

PANDUAN WAWANCARA

JUDUL TESIS: PERAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DALAM PERUBAHAN
SOSIAL POLITIK DI INDONESIA MELALUI PARTAI POLITIK

(STUDI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)

AKBAR MIA – KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN

Untuk Bachtiar Firdaus dan Rama Pratama	Untuk Umar Salim
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pengaruh mahasiswa pada tahun 98 dan apa yang dikendaki oleh para mahasiswa pada saat itu....?2. Pada saat reformasi banyak partai-partai timbul, dan anda sendiri tergabung dalam satu partai yaitu Partai Keadilan, kenapa anda tertarik untuk bergabung ke Partai Keadilan...?3. Sebagai partai politik PK mempunyai tujuan, sejauh mana keinginan pemuda terakomodasi di PK...?4. PKS memandang pemuda seperti apa....?5. Akan di bawa ke mana Indonesia.....?6. Apa pandangan PKS terhadap masyarakat madani....?7. Apa yang telah di capai oleh PKS....?8. Faktor-faktor apa saja yang harus dimiliki oleh para kader-kader PKS guna menciptakan masyarakat madani....?9. Dalam menjalankan aktifitas kesehariannya seorang kader partai PKS yang menghadapi permasalahan cukup kompleks, Darimana energi ini didapat....?	<ol style="list-style-type: none">1. Mengapa PK (S), mengapa tidak bergabung dengan partai-partai Islam yang sudah ada2. Seberapa besar perbandingan pemuda yang berada di dalam PK Sejahtera3. Seperti apa konsep pemuda di dalam PK Sejahtera4. Bagaimana posisi pemuda di dalam PK Sejahtera5. Adakah peran yang diberikan para pemuda Partai Keadilan Sejahtera dalam proses perubahan sosial politik di Indonesia.6. Sejauh manakah respon pemuda Partai Keadilan Sejahtera terhadap isu – isu sosial dan politik di Indonesia7. Bagaimana/dengan cara apa para pemuda PK Sejahtera dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial politik Indonesia

Universitas Indonesia

TRANSKRIP WAWANCARA

BACHTIAR FIRDAUS, S.T., MPP

Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 18 Juni 2008, jam 20.00 sampai dengan 21.00, di rumah Bachtiar Firdaus di Jl. Poltangan, di bilangan Jakarta Selatan.

Bagaimana pengaruh mahasiswa pada tahun 98 dan apa yang dikendaki oleh para mahasiswa pada saat itu....?

Pertama kali mahasiswa bergerak karena masalah ekonomi, semua harga naik. Dari situlah mahasiswa berkumpul dan mencari tahu kenapa krisis ekonomi terjadi, ternyata karena terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan di bidang politik. Karena untuk mengatasi krisis ekonomi jika krisis politiknya tidak diperbaiki maka krisis ekonomi tidak akan tersembuhkan. Jika dicermati pada tahun 98 itu tuntutan awalnya itu bukan meminta agar Soeharto turun, tetapi lebih kepada tuntutan perbaikan di bidang ekonomi karena kepekaan pemerintah kurang, hanya terkesan bongkar pasang kabinet dan tidak ada keputusan yang jelas yang mengakibatkan tuntutan berkembang menjadi turunkan Soeharto.

Bukankah pada saat itu tidak hanya satu elemen (BEM) saja yang bergerak tetapi banyak elemen, elemen apa saja yang bergerak pada saat itu....?

Pada prinsipnya semua elemen nyaris bergerak dengan derajat dan percepatan yang berbeda-beda. Berbagai analisis dasar pergerakan dari Marxist, radikal kanan Islam dan Kristen yang menjadi landasan pergerakan mereka. Yang pada intinya polarisasi mahasiswa tahun 98 seolah-olah terbuka kembali, sebelum periode itu memang dikalangan mahasiswa ada perbedaan tapi tidak muncul karena kuatnya rezim orde baru dalam meredam pergerakan mahasiswa.

Pada awal-awal tahun 97 banyak analisis dari teman-teman mahasiswa yang beraliran radikal mengatakan bahwa krisis ekonomi ini disebabkan oleh Soeharto, tetapi ada juga teman-teman mahasiswa yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah pengaruh dari ekonomi global dan ada juga yang mengambil dari teori konspiratif mengatakan ini adalah permainan dari mereka-mereka yang menguasai mata uang seperti George Soros. Tetapi pada satu titik perbedaan itu melebur, dan mengerucut menjadi sebuah musuh bersama yaitu Soeharto.

Universitas Indonesia

Pada awal pergerakan tahun 98 seluruh elemen mahasiswa bersatu dalam mengusung suatu perubahan, tetapi mengapa setelah reformasi di raih pergerakan mahasiswa terpecah kembali....?

Karena ketika rezim sudah mulai melemah, perbedaan-perbedaan yang didasari oleh ideologi yang berbeda yang mengakibatkan cara pandang dan bergerak yang berbeda menyebabkan perbedaan, karena ketika musuh bersama sudah kalah, mereka kembali ke pada dasar pergerakan mereka masing-masing, itulah yang menyebabkan pergerakan mahasiswa pasca 98 terpecah.

Alasan yang kedua adalah setelah sekian lama kita di tindas oleh orde baru dalam arti di seragam-seragamkan ideologinya, mahasiswa ketekia itu sering memiliki stigma-stigma, kalau dekat dengan orang ini, dia orang kiri atau orang kanan karena mereka sendiri tidak pernah berdiskusi dengan orang yang berbeda ideologi atau berbeda pendapat, cara pandang, cara bergerak.

Mahasiswa pada dasarnya merupakan suatu gerakan moral tetapi di sisi lain juga gerakan mahasiswa merupakan suatu gerakan politis. Disinilah suatu kelebihan dan juga suatu kekurangan suatu gerakan mahasiswa ketika menghadapi suatu musuh bersama mereka bersatu tetapi kita kemenangan sudah di dapat mereka kembali ke pergerakan masing-masing, juga kelebihan pergerakan mereka murni sepenuhnya adalah gerakan moral. Tetapi disisi lain karena tidak mempersiapkan suatu kepemimpinan nasional, maka kekosongan tersebut di isi kembali oleh orang-orang tua yang menikmati dari hasil perjuangan moral mahasiswa tadi.

Bagaimana menurut anda tentang tanggapan bahwa pergerakan mahasiswa pada saat ini sudah terkotak-kotak....?

Bagi saya memang ini sangat menarik membicarakan ini, dulu sekitar tahun 1970an bahkan sebelum tahun itu dari era kemerdekaan, mahasiswa sudah berpolitik misalnya, HMI dengan Masyusi, PMII dengan NU, dan sebagainya. Pada suatu titik ketika pergerakan mahasiswa dikalahkan pada tahun 1978 ketika rezim Soeharto sudah kuat , maka ada istilah NKK BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang pada akhirnya mensteril kehidupan kampus dari suatu pergerakan politik.

Pada saat reformasi banyak partai-partai timbul, dan anda sendiri tergabung dalam satu partai yaitu Partai Keadilan, kenapa anda tertarik untuk bergabung ke Partai Keadilan...?

Universitas Indonesia

Sebelum adanya Partai Keadilan, memang kita sudah tergabung dalam suatu pergerakan dalam satu wadah Lembaga Da'wah Kampus, dan mengapa saya memilih berafiliasi ke Partai Keadilan karena PK sendiri tidak merupakan suatu partai yang tidak hanya mengurus dalam segi politik saja, tetapi juga mengurus dalam kesenian, sosial dan nilai-nilai ajaran islam yang sangat universal. Dari situlah ketertarikan saya untuk bergabung dengan PK.

Sebagai partai politik PK mempunyai tujuan, sejauh mana keinginan pemuda terakomodasi di PK...?

Pada prinsipnya karena pemimpin PK pada saat itu mayoritas masih muda, rata-rata masih berusia di bawah 40 tahun tentunya mereka membutuhkan kalangan yang siap untuk merumuskan permasalahan-permasalahan. Jadi jika ditanyakan, bagaimana PK mengakomodasi aspirasi kalangan pemuda....? Tentu PK mengakomodasi itu karena pemimpin-pemimpinnya terdiri dari kalangan pemuda dari tingkat pusat sampai tingkat I.

PKS memandang pemuda seperti apa....?

Pemuda adalah : pertama dia tiangnya sebuah negara artinya jika pemudanya kuat maka negaranya kuat, jika pemudanya lemah maka lemah juga negaranya. Yang kedua rahasia kejayaan atau kelemahan sebuah negara juga tergantung dari kalangan pemudanya. Ketiga kita memandang pemuda adalah sebuah kekuatan pengubah artinya bahwa “tidak banyak berharap lagi” kepada golongan tua-tua. Karena golongan tua itu di bangun oleh jamannya.

Akan di bawa ke mana Indonesia.....?

Pada intinya semua cita-cita PKS bagaimana kita menciptakan masyarakat adil dan sejahtera dengan nilai-nilai islam. Sebenarnya apa permasalahan-permasalahan yang mendasar yang ada di Indonesia, setelah kita mengetahui baru kita pecahkan solusi-solusinya. Hal-hal apa saja yang menjadi pendorong suatu perubahan dan apa saja yang menjadi penghambat dalam perubahan tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, kita merumuskan dalam platform berbagai sektor. Yang pada intinya kita terbuka, tidak ada yang disembunyikan.

Apa pandangan PKS terhadap masyarakat madani....?

Universitas Indonesia

Masyarakat madani adalah masyarakat yang bersandarkan pada nilai-nilai islam. Kita mengakui adanya perbedaan-perbedaan. Diyakinkan betul perjuangan ke arah itu dibutuhkan proses yang lama dan kerja keras dari seluruh kader terutama bagaimana membentuk kepribadian kader yang baik dan bersikap profesionalisme.

Apa yang telah di capai oleh PKS....?

Dari segi struktur pengkaderan PKS telah mencapai 80% kepengurusan di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Sementara dari segi politik kita telah berhasil menampilkan sosok pigur-pigur pemimpin yang anti KKN, serta para kader PKS yang duduk di legaslatif dan eksekutif juga mereka telah menampilkan suatu prestasi yang cukup baik seperti menolak dan mengembalikan uang gratifikasi di DPR. Kemudian prestasi yang ketiga ketika kita menjadi suatu partai politik yang baru kita bisa menata AD/ART yang baik. Yang ke empat bagaimana kita memperluas cakupan dakwah, kalau kita konservatif tetapi sekarang kita bisa berdakwah di kalangan berbagai line seperti seni dan budaya. Yang kelima prestasi PKS adalah PKS menjadi partai yang dipercaya oleh masyarakat, ini terbukti ketika suatu daerah terkena bencana, kader PKS menjadi garda terdepan dalam hal membantu para korban bencana tersebut.

Faktor-faktor apa saja yang harus dimiliki oleh para kader-kader PKS guna menciptakan masyarakat madani....?

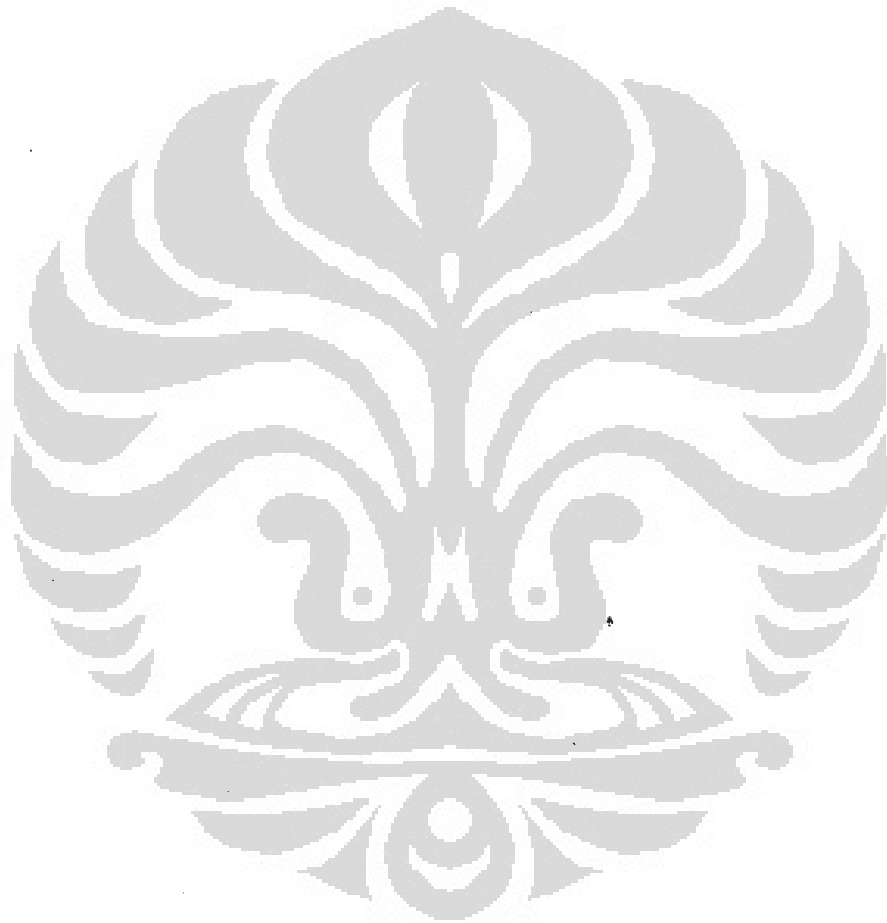
Kita mengharapkan kader-kader yang kritis yang mengikuti instruksi berdasarkan pemahaman-pemahaman bukan berdasarkan. Selama para kader bergerak dengan pemahaman selama itulah PKS tetap bergerak dalam koridornya. Yang kedua selama kita terus bergerak bersama masyarakat, bukan bergerak untuk kepentingan sendiri tetapi bergerak memperjuangkan aspirasi rakyat, memberikan advokasi kepada masyarakat. Ketika

Dalam menjalankan aktifitas kesehariannya seorang kader partai PKS yang menghadapi permasalahan cukup kompleks, Dimana energi ini didapat....?

Energinya kembali kepada ideologi kepada partai politik itu sendiri, artinya bagaimanapun partai politik, bagaimanapun yang namanya organisasi, kalau dia tidak mempunyai daya tahan yang tinggi, daya tahan militansi yang kuat untuk mewujudkan cita-citanya. Semua itu harus ditunjang dengan suatu ideologi yang benar-benar yang mampu membawa semua orang dalam satu visi, yang membuat

Universitas Indonesia

batasan-batasan yang jelas, yang menjadi pagar pembatas antar yang benar dan yang salah. Ketika itulah gerakan menjadi semakin kuat. Karena banyak partai yang saya lihat hanya terpaku dengan suatu kharisma pemimpin, ketika pemimpin meninggal atau membelot, maka hancurlah partai atau organisasi tersebut. Jadi bagi saya pilihan ideologi kemudian bagaimana mentransferkan ideologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten, itulah yang akan membuat partai tersebut maju atau tidak karena dia harus terus-menerus memiliki daya tahan militansi yang kuat. Yang membedakan PKS dengan partai lain adalah tidak menjadikan ideologi sebagai barang dagangan tetapi jadikan ideologi itu sebagai daya tahan perubahan, militan yang tidak kunjung padam.



Universitas Indonesia

TRANSKRIP WAWANCARA

RAMA PRATAMA, S.E.

Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 1 Juli 2008, jam 14.00 sampai dengan 15.00, di kantor Rama Pratama di Plaza BBD, Jakarta.

Bagaimana pengaruh mahasiswa pada tahun 98 dan apa yang dikendaki oleh para mahasiswa pada saat itu....?

Waktu itu mahasiswa bergerak untuk meminta penguasa melakukan perubahan. Secara sosial saat itu hanya segelintir orang yang muncul ke permukaan dan kemudian memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menghisap kekayaan negeri ini. Secara politik kekuasaan juga terpusat di segelintir orang, terutama orang-orang yang dekat dengan penguasa “seumur hidup” di negeri ini. Mahasiswa menuntut adanya perbaikan, perubahan atau reformasi istilahnya, supaya keadilan bisa ditegakkan, kesejahteraan bisa merata. Pengaruh gerakan mahasiswa yang menuntut perubahan tersebut sangat besar, bisa dirasakan hingga saat ini. Termasuk mungkin anda sendiri yang merasakannya. Pengaruhnya terutama adanya pergantian kepemimpinan yang dirasa sangat korup, perubahan yang luar biasa dalam tatanan sosial, perundang-undangan, kebebasan mengeskpresikan pendapat dan lain sebagainya.

Bukankah pada saat itu tidak hanya satu elemen (BEM) saja yang bergerak tetapi banyak elemen, elemen apa saja yang bergerak pada saat itu....?

Ya, benar. Selain BEM-BEM di seluruh Indonesia, ada juga rekan-rekan dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda lainnya. Misalnya, KAMMI, HMI, Forkot, FKSMJ, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan hampir seluruh elemen bergerak, baik yang berhaluan kiri, kanan atau yang lainnya. Bahkan elemen pemuda yang notabene merupakan underbouw penguasa saat itu juga turut serta menuntut reformasi. Saya sendiri kurang tahu apa motif mereka, apakah murni menuntut perubahan atautah mencari aman karena melihat gelombang reformasi semakin besar, dan saat itu besar kemungkinan penguasa akan tumbang, sehingga mereka berbalik pro reformasi. Saya tidak berani memberikan penilaian.

Pada awal pergerakan tahun 98 seluruh elemen mahasiswa bersatu dalam mengusung suatu perubahan, tetapi mengapa setelah reformasi di raih pergerakan mahasiswa terpecah kembali....?

Universitas Indonesia

Saya melihatnya karena musuh bersamanya sudah hilang. Tahun 1998 itu semua elemen mahasiswa, pemuda dan masyarakat disatukan oleh kepentingan yang sama, menumbangkan rezim yang korup dan menindas. Setelah reformasi, semuanya kembali ke agenda masing-masing. Masalahnya, pergerakan mahasiswa masing-masing punya alat analisa tersendiri. Katakanlah ada yang memakai alat analisa marxis, agama, ilmiah dan lain sebagainya. Perbedaan cara pandang ini berakibat pada perbedaan cara pergerakan, perbedaan tahapan pergerakan dan perbedaan tujuan pergerakan. Ini yang kemudian membuat masing-masing kembali ke agendanya dan pergerakan mahasiswa sekan terpecah.

Bagaimana menurut anda tentang tanggapan bahwa pergerakan mahasiswa pada saat ini sudah terkotak-kotak....?

Saya melihatnya pergerakan mahasiswa bukan terkotak-kotak. Masing-masing elemen memang punya gaya dan kecenderungannya sendiri-sendiri. Ada saat dimana gaya dan kecenderungan itu tidak bisa disatukan. Bahkan sebagian bisa dikatakan bertolak belakang. Dalam hal ini, perbedaan ideologi, gaya dan kecenderungan memang tidak bisa dipaksakan untuk dipersatukan. Itu gaya Oder Baru. Tapi dalam keseharian, saya melihat semua mahasiswa sama, bahkan mereka saling berinteraksi.

Tapi kalau kita bicara soal pilihan politik, menurut saya itu adalah pilihan pribadi. Saya sendiri cenderung setuju dengan masuknya partai politik ke kampus. Dalam artian partai politik masuk ke dalam forum-forum di kampus untuk menguji platform mereka, tujuan, visi dan misi di dunia akademis. Meski begitu, saya tidak setuju kalau parpol berkampanye terbuka seperti orasi dan lainnya, di kampus. Di dunia akademik, kampanye yang ada adalah dalam bentuk akademis juga, misalnya itu tadi, menguji visi-misi di depan civitas akademika.

Pada saat reformasi banyak partai-partai timbul, dan anda sendiri tergabung dalam satu partai yaitu Partai Keadilan, kenapa anda tertarik untuk bergabung ke Partai Keadilan...?

Bagi saya, pilihan politik saya harus mencerminkan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dan bagian dari elemen pergerakan kepada masyarakat. Ketika saya memilih partai, atau memilih bergabung dengan partai politik tertentu, saya harus memastikan bahwa partai tersebut bisa memperjuangkan apa yang selama ini saya perjuangkan, utamanya dalam gerakan reformasi. Ketika saya memilih bergabung dengan partai politik, saya harus memastikan bahwa saya bisa melanjutkan perjuangan saya memperjuangkan cita-cita reformasi melalui partai tersebut. Sejauh ini, saya melihat hal itu terdapat di Partai Keadilan, atau Partai Keadilan Sejahtera sekarang ini.

Universitas Indonesia

Sebagai partai politik PK mempunyai tujuan, sejauh mana keinginan pemuda terakomodasi di PK...?

Menurut saya PKS itu partai yang pemuda "*banger*". Sebagian besar pengurus dan anggotanya adalah pemuda. Setahu saya, kaum tua di PKS itu lebih banyak berfungsi sebagai pengawas, atau Pembina. Dengan demikian *day by day*-nya PKS dijalankan oleh para pemudanya. Kalau ditanya sejauh mana keinginan atau aspirasi pemuda di akomodasi di PKS, jelas sangat diakomodasi. Sebagian besar kebijakan PKS diformulasikan oleh para pengurusnya yang notabene didominasi oleh pemuda. Kalau ada yang mempersonifikasikan gerakan PKS sebagai gerakan pemuda, mungkin tidak bisa disalahkan. Meski bukan berarti PKS mewakili seluruh pemuda Indonesia, dan bukan berarti pula aspirasi generasi yang lebih tua tidak diakomodir di PKS.

PKS memandang pemuda seperti apa....?

Pemuda memegang peran yang sentral baik di PKS maupun di Indonesia secara umum. Sebagai tulang punggung bangsa, di bahunyalah terletak jatuh banggunya bangsa ini. Pemuda Indonesia sebenarnya memiliki beban besar untuk membangun negeri ini, tapi sayangnya masih banyak yang tidak atau belum menyadari hal itu. Makanya PKS membidik pemuda sebagai target utama perekrutan. Bukan hanya untuk direkrut sebagai kader partai, lebih dari itu untuk dibina. PKS bermula dari gerakan pembinaan individu, berupa pembinaan mental, spiritual. Pemuda-pemuda yang direkrut PKS kemudian kami bina, kami berharap pemuda-pemuda tersebut yang nantinya menjadi motor-motor penggerak perubahan di negeri ini. Dan sejauh ini, Alhamdulillah kami sudah mulai membuktikan eksistensi kami sebagai penggerak perubahan. Meskipun kami tidak bisa mengklaim bahwa itu hanya hasil kami semata. Itu adalah kerja besar seluruh elemen bangsa ini, alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpartisipasi dan mengambil peran dalam perubahan tersebut, peran yang menurut saya cukup signifikan.

Akan di bawa ke mana Indonesia.....?

Sebenarnya hal ini sudah kami tuangkan secara lengkap dalam buku Platform Kebijakan Pembangunan kami. Intinya kami ingin membentuk negara yang di dalamnya tegak nilai-nilai Islam yang universal, diantaranya keadilan dan kesejahteraan. Kami tidak semata menginginkan negara Islam seperti yang diagungkan sebagian rekan kami, namun lebih dari itu adalah bagaimana negara tersebut mempraktekkan nilai-nilai Islam yang universal tersebut. Jangan sampai terjebak hanya pada nama negara Islam secara formal, namun dalam prakteknya nilai-nilai Islam itu sendiri tidak dijalankan. Sejarah telah membuktikan betapa ajaran Islam dapat diterima tidak hanya oleh Muslim saja, tetapi juga non Muslim.

Universitas Indonesia

Apa pandangan PKS terhadap masyarakat madani....?

Masyarakat madani adalah masyarakat yang bersandarkan pada nilai-nilai islam. Di dalamnya diakui adanya perbedaan-perbedaan. Kami meyakini perjuangan ke arah itu dibutuhkan proses yang lama dan kerja keras dari seluruh kader. Perjuangan itu baru akan membuahkan hasil ketika kami semua mampu menanamkan nilai-nilai kepribadian yang baik dan profesional, tidak hanya kepada kader kami semata tetapi juga para masyarakat luas. Inilah salah satu inti perjuangan kami melakukan perubahan di bumi Indonesia ini.

Apa yang telah di capai oleh PKS....?

Saya ingin memfokuskan jawaban pertanyaan ini kepada tujuan perubahan kami. Sejauh ini, meski kami masih terhitung muda dan awam dalam dunia politik, kami telah bergerak melakukan perubahan sejak lama. Dari situ kami telah mulai berusaha melakukan perubahan masyarakat melalui apa yang kami sebut dakwah individu dan dakwah masyarakat. Kami berusaha menularkan pemahaman dan pemikiran kami kepada masyarakat. Sejauh ini sudah cukup banyak yang kami capai. Dalam konteks kepartaian, dapat dikatakan kami membawa gelombang baru politik Indonesia. Politik yang bersih, santun dan damai. Misalnya, dalam berbagai aksi yang kami gelar, meskipun aksi yang kami lakukan bersifat massif dengan menghadirkan puluhan bahkan ratusan ribu orang, alhamdulillah tidak pernah terjadi kerusuhan ataupun kekerasan. Bahkan kami berusaha keras menjaga kebersihan dan lalu lintas di jalan-jalan yang kami lewati. Para kader kami di berbagai dewan legislatif termasuk sosok-sosok yang awal-awal mengembalikan berbagai dana yang tidak jelas yang kerap menghampiri. Bahkan ada beberapa kasus dimana kader kami melaporkan penerimaan dana tersebut yang kemudian setelah diselidi yang berwenang, menyeret banyak pihak yang terkait.

Faktor-faktor apa saja yang harus dimiliki oleh para kader-kader PKS guna menciptakan masyarakat madani....?

Yang terutama adalah menajdi contoh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al Quran, untuk mengajak orang lain untuk berubah, kita harus menjadi orang pertama yang melakukan perubahan tersebut. Ini menurut saya yang harus dipegang. Alhamdulillah selama ini banyak kader PKS, terutama kader mudanya, yang telah menjadi pelopor atau teladan di bidangnya masing-masing.

Yang kedua adalah istiqamah atau konsisten. Jalan dakwah, atau dalam bahasa ilmiahnya jalan perubahan, ini adalah jalan yang sangat panjang. Kalau tidak menguatkan hati, pasti akan terlempar. Kami meyakini bahwa ini adalah perintah Allah, kami harus melakukan perbaikan terhadap ummat. Untuk itu setiap kader

Universitas Indonesia

harus menguatkan hatinya untuk senantiasa istiqamah atau konsisten dalam perjuangan ini.

Yang ketiga yaitu gigih atau *persistence*. Ini sangat diperlukan karena kami menyadari bahwa melakukan perubahan terhadap masyarakat bukan suatu hal yang mudah. Pasti akan ada cemooh, ejekan bahkan penolakan. Untuk itu diperlukan kegigihan untuk menawarkan konsep perubahan ini. Berdakwah atau mengubah masyarakat itu 'kan sama saja dengan marketing konsep. Kalau seorang marketing barang saja gigih sekali menawarkan barangnya, *masak* kita yang menawarkan sesuatu hal yang baik mudah putus asa.

Bagaimana dalam menjalankan aktifitas kesehariannya seorang kader partai PKS yang menghadapi permasalahan cukup kompleks, kemudian apa energinya....?

Saya meyakini energi itu berasal dari Allah, dalam hal ini kembali kepada ideologi Islam yang kami pergunakan. Dalam melakukan perubahan, harus ditunjang dengan suatu ideologi yang benar-benar yang mampu membawa semua orang dalam satu visi, yang membuat batasan-batasan yang jelas, yang menjadi pagar pembatas antar yang benar dan yang salah. Ketika itulah gerakan menjadi semakin kuat. Perintah dakwah itu kan dari Allah, pasti Allah yang akan membalasnya. Jadi energinya tidak terbatas, karena energinya berasal dari Sang Pencipta. Keyakinan bahwa akan ada balasan, tidak hanya di dunia tapi yang lebih penting lagi di akhirat, merupakan sumber energi yang sangat besar. Itulah mengapa para kader PKS rela bersusah payah, bahkan sampai mengorbankan banyak hal, demi dakwah, demi melakukan perubahan terhadap masyarakat Indonesia. Perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, mengubah Indonesia menjadi masyarakat madani.

TRANSKRIP WAWANCARA

UMAR SALIM, SIP

Wawancara dilakukan pada hari Senin, 7 Juli 2008, jam 12.30 sampai dengan 13.15, di kantor Umar Salim di Senayan, Jakarta.

Mengapa PK (S), mengapa tidak bergabung dengan partai-partai Islam yang sudah ada

Kami melihat bahwa partai-partai yang sudah ada sebagian besar masih belum mampu melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, dalam artian masih terkait dengan rezim orde baru. Kalaupun ada partai yang memang murni produk reformasi, kami memandang bahwa partai tersebut tidak dapat dijadikan kendaraan bagi kami dalam mencapai tujuan besar kami. Tujuan kami mendirikan partai bukan hanya sebagai kendaran politik, melainkan juga sebagai sarana berdakwah. Tujuan akhir dakwah adalah menegakkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Artinya nilai-nilai Islam yang universal harus tersebar di bumi Indonesia ini. Dengan demikian orang akan mengakui bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, tidak sebagaimana pemahaman sebagian rekan sesama muslim selama ini.

Seberapa besar perbandingan pemuda yang berada di dalam PK Sejahtera

Sejauh yang saya tahu, perbandingan anggota yang pemuda dengan non pemuda di PK Sejahtera mencapai sekitar 60%-40% atau 70-30%, saya kurang tahu angka pastinya. Seharusnya ditetapkan dahulu, batasan yang disebut pemuda itu apa. Apakah menggunakan batasan politis, sosiologis atau psikologis. Tapi secara umum, para anggota PK Sejahtera berusia dibawah 50 tahun. Hanya sedikit yang berusia 50-65 tahun.

Seperti apa konsep pemuda di dalam PK Sejahtera

Konsep pemuda dalam PK Sejahtera sebenarnya menurut saya menggunakan batasan psikologis. Artinya selama orang tersebut masih mampu berfikir dengan gaya berpikir pemuda yang logis, kritis, sistematis, maka masih bisa digolongkan sebagai pemuda. Tapi tentunya harus juga digunakan batasan usia. 'Kan tidak mungkin orang yang sudah berusia 55 atau 60 tahun tetap disebut sebagai pemuda, meskipun secara pemikiran masih prima. Yang pasti, pemuda dalam PK

Universitas Indonesia

Sejahtera dirumuskan sebagai bagian golongan masyarakat yang memiliki potensi sangat besar baik secara mental, fisik maupun ruhani, dimana potensi tersebut sangat dibutuhkan untuk membawa masyarakatnya menuju perbaikan, menuju perubahan yang terencana sebagai bagian dari *grand strategy* perubahan bangsa.

Bagaimana posisi pemuda di dalam PK Sejahtera

Pemuda dalam pergerakan PK Sejahtera memegang peran yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa pemuda di dalam PK Sejahtera merupakan tulang punggung atau urat nadi pergerakan PK Sejahtera. Bagaimana tidak, sebagian besar pengurus, anggota ataupun simpatisan kami berasal dari golongan pemuda. Selain itu, pergerakan sehari-hari partai ini juga berada di tangan para pemuda. Di partai kami, golongan yang lebih tua umumnya ditempatkan sebagai pengawas, pengarah, dan pembina kami yang muda-muda ini. Dengan demikian segala gerak kami bisa tetap berada dalam koridor syariah Islam yang kami pegang. Meskipun bukan berarti tidak ada pemuda yang duduk sebagai bagian pengawas, pengarah dan Pembina kami, dan bukan pula berarti tidak ada satupun generasi tua yang bergerak sebagai pengurus harian di partai kami.

Adakah peran yang diberikan para pemuda Partai Keadilan Sejahtera dalam proses perubahan sosial politik di Indonesia.

Menurut saya banyak sekali. Sebagian besar pengurus kami merupakan pemuda-pemuda terdidik yang ketika masih menjadi mahasiswa merupakan aktivis berbagai organisasi. Bahkan sebagian diantara pengurus kami masih tercatat sebagai mahasiswa berbagai perguruan tinggi di berbagai jenjang, baik itu jenjang S1, S2 maupun S3. Kalau anda ingat, gerakan reformasi 1998 itu digerakkan oleh mahasiswa, nah sebagian aktivis gerakan reformasi 1998 kemudian bergabung dengan kami di PK Sejahtera. Perubahan sosial politik di sini jangan diartikan perubahan sistem politik ataupun sistem/stuktur sosial masyarakat *an sich*. Kami melihat bahwa dakwah yang kami lakukan pada hakikatnya adalah usaha mengubah masyarakat. Kalau dulu misalnya politik itu dianggap kotor karena penuh dengan proses lobi, KKN dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami bisa membuktikan bahwa politik itu sebenarnya bersih, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Adalah orang-orang didalamnya yang kemudian mencitrakan politik itu sebagai barang kotor. Masyarakat kemudian juag sudah menerima bahwa aktivitas politik itu bukan hanya lima tahunan. Kami bergerak dalam lingkup harian, mingguan. Kami banyak menggelar bakti sosial, bazaar murah dan sebagainya. Kami melihat hal ini sebagai upaya menumbuhkan kepedulian sosial diantara masyarakat agar saling memperhatikan dan saling membantu.

Universitas Indonesia

Sejauh manakah respon pemuda Partai Keadilan Sejahtera terhadap isu – isu sosial dan politik di Indonesia

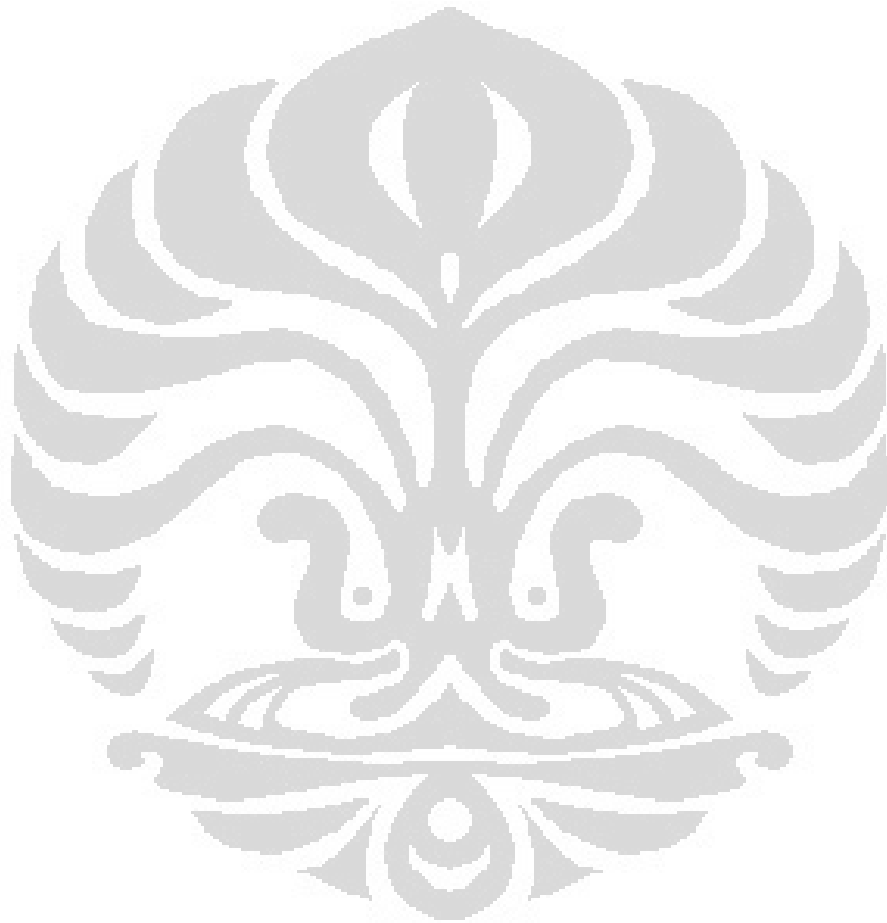
Seperti yang saya katakan tadi, kami melihat aktivitas kami sebagai aktivitas dakwah. Dakwah tidak mengenal dikotomi agama-politik. Sosial, politik, budaya, ekonomi dan lain sebagainya adalah bagian dari dakwah kami, bagian dari ajaran Islam yang menyeluruh. Oleh karena itu kami memandang bahwa isu-isu sosial politik hanya bagian dari isu-isu yang harus kami perhatikan. Memang sebagai partai politik, kedua hal tersebut menjadi bagian dari hal yang harus mendapat perhatian ekstra dari kami. Sejauh ini kami berusaha untuk tetap responsif. Misalnya saja, kami menjadi partai yang pertama mengirimkan bantuan ke daerah-daerah bencana. Ketika Jakarta mengalami banjir parah tempo hari, bisa dikatakan kami termasuk orang-orang pertama yang masuk ke daerah-daerah korban dan menyediakan bantuan, baik itu berupa dapur umum, pengobatan, pakaian dan lain sebagainya.

Bagaimana/dengan cara apa para pemuda PK Sejahtera dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial politik Indonesia

Kami meyakini bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan keteladanan. Dengan demikian, kami harus menjadi teladan-teladan di tengah-tengah lingkungan kami masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk kembali ke fitrahnya masing-masing. Misalnya dalam pemilihan umum ataupun pilkada. Siapa yang tidak butuh uang? Namun kami mengajak masyarakat agar tidak mudah tergoda hanya demi kepentingan sesaat. Salah pilih berarti menerima pemimpin yang salah untuk minimal lima tahun kedepan. Kami juga memelopori gerakan agar masyarakat menyadari hak pilihnya. Hak pilih itu bukan sekedar hak. Hak pilih adalah sumbangsih nyata masyarakat dalam mengupayakan perbaikan dan pembangunan bangsa, caranya dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tepat. Para wakil kami di dewan (perwakilan rakyat, pen.) di berbagai daerah juga menjadi pelopor sosok-sosok bersahaja yang menolak uang-uang yang tidak jelas. Bagi kami pertanggungjawaban kepada Allah jauh lebih penting daripada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Mungkin masyarakat atau lembaga

Universitas Indonesia

pemeriksa dapat dibohongi. Namun sepintar-pintarnya kita menyimpan kebusukan, Allah tetap tahu. Itu tanggung jawab moral kami kepada Allah dan masyarakat yang mempercayakan suaranya kepada kami. Alhamdulillah sekarang sudah banyak pihak yang juga berani lantang menyuarkan kebenaran. Sehingga kami memiliki rekan-rekan yang memperjuangkan kebenaran, siapapun dia, dari kelompok manapun ia berasal.



Universitas Indonesia

BIOGRAFI HIDAYAT NUR WAHID

Nama : DR. H.M. Hidayat Nur Wahid, M. A.

Lahir : Klaten, 8 April 1960

Agama : Islam

Jabatan : - Ketua MPR 2004-2009

- Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera

Isteri : Hj. Kastrian Indriawati (almarhum, meninggal pada Januari 2008)

dr. Diana Thalib Abbas (menikah pada Mei 2008)

Anak : 1. Inayatu Dzil Izzati

2. Ruzaina

3. Alla Khairi

4. Hubaib Shidiqi

Pendidikan:

- SDN Kebondalem Kidul I, Prambanan Klaten, 1972
- Pondok Pesantren Walisongo, Ngabar Ponorogo, 1973
- Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, 1978
- IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta (Fakultas Syari'ah), 1979
- Fakultas Dakwah & Ushuluddin Universitas Islam Madinah Arab Saudi, 1983
(Judul Skripsi “ *Mauqif Al-Yahud Min Islam Al Anshar*”)

Universitas Indonesia

- Program Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah Arab Saudi, jurusan Aqidah, 1987 (Judul Skripsi “ *Al Bathiniyyaun Fi Indonesia, ‘Ardh wa Dirosah*”)
- Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Islam Medina, Arab Saudi, Fakultas Dakwah & Ushuludiin, Jurusan Aqidah, 1992 (Judul Disertasi “*Nawayidh lir Rawafidh Lil Barzanji, Tahqiq wa Dirosah*”)

Pekerjaan:

1. Dosen Pasca Sarjana Magister Studi Islam, UMJ
2. Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, UMJ
3. Dosen Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Dosen Fakultas Ushuluddin (Program Khusus) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5. Dosen Pasca Sarjana Universitas Asy-Syafi’iyah, Jakarta
6. Ketua LP2SI (Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam) Yayasan Al-Haramain, Jakarta
7. Dewan Redaksi Jurnal “Ma’rifah”
8. Ketua Forum Dakwah Indonesia

Organisasi:

- Anggota PII, 1973
- Andalan Koordinator Pramuka Gontor bidang kesekretariatan, 1977 – 1978
- Training HMI IAIN Yogyakarta, 1979
- Sekretaris MIP PPI Madinah, Arab Saudi, 1981 – 1983
- Ketua PPI Arab Saudi, 1983 – 1985
- Peneliti LKFKH (Lembaga Kajian Fiqh dan Hukum) Al Khairat
- Anggota Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, 1999

Seminar dan Karya Ilmiah:

1. Menghadiri undangan MASG di Illinois, AS, 1994 (Menyampaikan prasaran)

Universitas Indonesia

2. Menghadiri undangan International Islamic Student Organisation di Istanbul, Turki, 1996
3. Seminar Internasional madrasah wak Tanjung Al-Islamiyyah, Singapore, 1998 (Menyampaikan makalah).
4. Menghadiri undangan Seminar International dari Moslem Association of Britain di Manchester dan London.
5. Seminar mahasiswa Indonesia di Malaysia, 1999 (Menyampaikan makalah).
6. Seminar Internasional dari LIPIA dari Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh, di Jakarta (Menyampaikan makalah), 1999 bersama KH. Irfan Zidny, MA, Prof. Ismail Sunni dan KH. Abdullah Syukri Zarkasi, MA.
7. Menghadiri seminar Internasional di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, bekerjasama dengan Universitas Imam Muhammad Saud, Jakarta 1999.
8. Menghadiri undangan festival nasional dan seminar internasional Janadriyah, Riyadh, Arab Saudi (tahun 2000) bersama Prof. Dr. Nurcholis Madjid dan Prof. Dr. Amien Rais.
9. Menghadiri undangan seminar Perkembangan Islam di Eropa dari Islamiska Forbundet I Sverige, Stockholm, Swedia.
10. Berbagai seminar di dalam negeri
11. Membimbing dan menguji tesis master mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah dan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Kata Pengantar buku-buku terjemahan:

- Prinsip-prinsip Islam untuk kehidupan oleh Prof. Sholeh Shawi
- Ensiklopedi Fiqh wanita oleh Prof. Abdul Karim Zaid (cetakan Rabbani Pres)
- Pengantar studi Islam oleh Ust. Prof. Yusuf Al Qaradhawi (cetakan Al-Kautsar)
- As-Sunnah sebagai sumber ilmu dan kebudayaan oleh Ust. Prof. Yusuf Al Qaradhawi (cetakan Al-Kautsar)
- Fitnah Kubro, klarifikasi sikap para sahabat oleh Prof. Amhazun (cetakan Al-Haramain)
- Kajian atas kajian Hadits Misogini (dalam buku Feminisme)

Universitas Indonesia

- Tadabbur Surah Al Kahfi (dalam bulletin Tafakkur)
- Tadabbur Surah Yasin (dalam bulletin Tafakur)
- Editor terjemah tafsir Ibnu Katsir
- Menulis rubrik HIKMAH di harian REPUBLIKA
- Beberapa makalah diseminar-seminar
- Tajdid sebagai sebuah harakah (jurnal Ma'rifah)
- Revivalisme Islam dan Fundamentalisme sekuler dalam sorotan sejarah (dalam buku Menggugat Gerakan Pembaharuan Islam)
- Inklusivisme Islam dalam literatur klasik (dalam jurnal Profetika)

Pemikiran M. Hidayat Nurwahid

Ia politisi, ustadz dan cendekiawan yang bergaya lembut serta mengedepankan moral dan dakwah. Sosoknya semakin dikenal masyarakat luas setelah ia menjabat Presiden Partai Keadilan (PK), kemudian menjadi Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera). Partai ini memperoleh suara signifikan dalam Pemilu 2004 yang mengantarkannya menjadi Ketua MPR 2004-2009. Pada sidang umum pertama setelah menjadi Ketua MPR, ia menolak bermalam di sebuah hotel berbintang lima, ia menyatakan kalau saja seluruh anggota legislatif melakukan hal yang sama, negara dapat menghemat triliunan rupiah. Ia juga menolak mobil dinas mewah Volvo yang sedianya diperuntukkan bagi dirinya.

Sebagai salah satu pemimpin nasional, keteladanannya telah diakui oleh berbagai pihak. Dengan karakternya yang low profile, senantiasa memenuhi janjinya, ia berkomitmen memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Kepemimpinannya memberi warna tersendiri dalam peta perpolitikan nasional.

Setelah terpilih menjadi Ketua MPR, dia pun mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PK Sejahtera, 11 Oktober 2004. Majelis Syura DPP

Universitas Indonesia

PK Sejahtera memilih Tifatul Sembiring menggantikannya sampai akhir periode (2001-2005). Sudah menjadi komitmen partainya, setiap kader tidak pantas merangkap jabatan di partai manakala dipercaya menjabat di lembaga kenegaraan dan pemerintahan (publik). Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatan. Sekaligus untuk dapat memusatkan diri pada jabatan di lembaga kenegaraan tersebut.

Dalam memimpin PK Sejahtera, ia bertekad menjadikan partai ini merupakan solusi bagi permasalahan bangsa. Dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia DotCom, ia mengatakan, partainya tidak semata-mata ingin ikut dan memenangkan Pemilu, melainkan kehadiran PK Sejahtera harus merupakan solusi bagi permasalahan bangsa. PK Sejahtera datang sebagai bagian dari solusi. Caranya adalah dengan tidak menjalankan politik kotor, menghalalkan segala cara, politik yang menolerir korupsi. Maka, kalau ada tokoh yang mempunyai massa besar tapi moralitas Islamnya bermasalah, tidak mempunyai tempat di PK (PK Sejahtera). Partai ini lebih memilih menjadi partai yang kecil tapi signifikan ketimbang harus merusak citra Islam hanya dengan dalih vote getter.

Begitu pula dalam memilih koalisi. PK Sejahtera membuka diri untuk bekerja sama dengan beragam partai yang tetap berkomitmen dengan politik yang bersih, peduli, bermoral dan berpegang pada cita-cita reformasi.

Bagi PK Sejahtera, dalam berpolitik, keberkahan adalah hal yang utama. Kemenangan bukan tujuan PK Sejahtera. "Itulah sebabnya kalau bukan lantaran pertolongan Allah SWT mustahil PK (PK Sejahtera) bisa melangkah seperti sekarang. Ini semua bagian dari tadbir rabbani (pengaturan Allah)," kata pria kelahiran Klaten 8 April 1960, yang juga aktif dalam gerakan menolak perang dan rencana serangan militer Amerika Serikat ke Irak dan tindakan tidak berperikemanusiaan Israel kepada Palestina.

Ia dalam memimpin PK sangat selektif dalam soal kepemimpinan dan kepengurusan. Namun bukan berarti partai ini eksklusif. Karena menurutnya, soal

Universitas Indonesia

eksklusif atau tidak itu soal persepsi. Sebab, pada tingkat konstituen, PK Sejahtera terbuka terhadap siapa pun, termasuk kalangan nonmuslim. Ia mengakui, dengan menyatakan diri sebagai partai Islam, PK (PK Sejahtera) pernah dianggap eksklusif, bahkan sempat dicap fundamentalis. "Ya, itu bisa eksklusif jika Islam dipahami sebagai sesuatu yang sangat terbatas dan sangat angker. Tapi itu bisa inklusif jika Islam dipahami sebagai sebuah paradigma," katanya.

Sebagai sebuah paradigma, jelasnya, Islam sedikitnya meliputi empat hal. Pertama, al-islam itu sendiri, yakni penyerahan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kedua, al-silm, yang berarti kedamaian. Ketiga, al-salam, artinya kesejahteraan. Keempat, al-salamah, yang artinya keamanan atau keselamatan.

Itulah nilai-nilai Islam yang berlaku universal. Tapi, menurut-nya, yang terpenting memang perilaku kader PK itu sendiri. Apakah mereka bisa bekerjasama secara konstruktif dengan pihak-pihak lain atau tidak. "Sejauh yang kami lihat, kawan-kawan PK, termasuk yang ada di lembaga perwakilan, umumnya bisa bekerja-sama dengan pihak lain dalam membela kebenaran," kata alumnus Universitas Islam Madinah ini.

Dalam sebuah partai, menurut-nya, ada dua hal yakni massa dan pemimpin. Sama halnya dengan dakwah, kalau partai ini dipimpin oleh orang yang punya massa banyak tapi secara moral bermasalah, misalnya berperilaku maling, maka kita bukan lagi sedang men-jalankan Islam tapi malah menipu masyarakat dan perpolitikan kita. Ia menegaskan bahwa partainya tidak mau seperti itu. Karena pada hakekatnya politik PK Sejahtera adalah politik Islam yang dasarnya Islam dan visinya dakwah dan pelayanan.

Karena itu, PK Sejahtera tidak perlu memasukkan hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram, walaupun hal itu bisa mendatangkan kepuasan. Sebab, menurutnya, kalau itu dilakukan juga, maka yakinlah bahwa umur dakwah ini akan sangat pendek. Sebentar saja akan muncul berbagai konflik yang luar biasa, fitnah yang tidak karuan yang pada akhirnya akan mematikan dakwah.

Dalam bekerjasama dengan pihak lain, prinsipnya, PK Sejahtera tidak pernah memetakan pihak lain dalam posisi yang selalu benar atau selalu salah. Meski demikian PK Sejahtera selalu melihatnya secara kritis. Karena itu, katanya, PK Sejahtera tidak pernah pilih-pilih untuk bekerja sama, selama itu menyangkut kemaslahatan dan membela kebenaran. Sebaliknya, PK Sejahtera akan selalu tegas menolak, jika itu menyangkut kemudharatan atau upaya mengaburkan kebenaran.

Selama kepemimpinannya, PK Sejahtera selalu tampil simpatik dalam menyikapi berbagai masalah dalam negeri maupun dunia. Termasuk dalam menyikapi konflik antara orang Islam dan non Islam seperti di Maluku, PK Sejahtera tidak bersikap reaktif seperti Laskar Jihad. Juga dalam menyikapi ancaman perang yang dilancarkan AS ke Irak. PK Sejahtera melakukan demo besar-besaran, tetapi sangat tertib dan simpatik. Hal ini didasari pemahaman kader partai ini tentang Islam.

“Pemahaman ini menjadi landasan etis bagi kami dalam menyikapi suatu peristiwa dan melakukan dakwah. Di satu sisi, kami memang mencoba memahami bahwa gerakan-gerakan seperti itu merupakan akibat dari akumulasi kekecewaan terhadap kelambanan pemerintah menangani berbagai kasus. Tapi kami lebih memilih gerakan simpatik. Kami mencoba memberikan kontribusi riil, seperti bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi,” katanya.

Ia terpilih jadi Presiden Partai Keadilan (PK) dalam Munas I menggantikan Dr.Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, MSc yang memilih mundur untuk tetap sebagai PNS. Pemilihan itu berlangsung lancar dan dalam suasana yang sejuk. Tidak seperti pemilihan ketua beberapa partai yang berlangsung panas dan penuh intrik. Meski ia terpilih dengan mengantongi suara lebih dari 50% pemilih, tak nampak ekspresi kemenangan yang terpancar di wajahnya begitu ia dinyatakan sebagai Presiden PK terpilih ketika itu. Baginya, ini adalah amanat yang sangat berat. Dan amanat ini bukan hanya harus ia pertanggungjawabkan pada Munas PK (PK Sejahtera), tetapi juga kepada masyarakat Indonesia serta di hadapan Allah SWT.

Universitas Indonesia

Dalam sambutan saat jumpa pers setelah terpilih menjadi Presiden PK, ia pun kembali mengatakan bahwa jabatan itu merupakan amanah yang tidak ringan. Kalau boleh dikatakan, tantangan yang terberat. Ia merinci tantangan dimaksud.

Pertama, masalah pencitraan. Ini suatu hal yang sangat penting. Sebab kadang-kadang orang hanya dari citra saja sudah mengambil sikap. PK misalnya dicitrakan sebagai partainya anak muda, partainya orang-orang yang tidak merokok atau juga partainya orang yang berjilbab.

Pencitraan ini di satu sisi positif yakni segmentasi di dalam PK menjadi jelas. Tapi kemudian dalam konteks dakwah ini menjadi tidak tepat, sebab dasar dakwah ialah Yaa ayyuhannaas, berlaku kepada seluruh segmen masyarakat, apapun kondisi mereka. Tapi pencitraan tadi akhirnya menghambat pelebaran dakwah, sebab nilai-nilai dakwah PK seolah-olah terkungkung hanya pada segmen yang terbatas. "Ini harus kita atasi," tegasnya.

Kedua, seperti tergambar dari pandangan DPW-DPW dan utusan luar negeri, yakni faktor konsolidasi internal. Memang banyak pihak yang menilai sangat positif. Misalnya ketika saya ke Riyadh bersama Profesor Nurcholish Madjid, dia ditanya tentang PK. Kemudian beliau menjawab dengan mengambil pendapat dari pandangan Prof. Miriam Budiardjo bahwa PK itu partai orang-orang terpelajar. Tapi sesungguhnya kami sendiri melihat bahwa masih banyak celah yang harus kami konsolidasikan lagi.

Ketiga adalah faktor sosialisasi dan komunikasi massa. Banyak orang yang menilai bahwa setelah Pak Nur jadi menteri seolah-olah PK tiarap. Padahal tidak begitu. Karenanya kami harus menjalin lagi komunikasi yang lebih baik dengan kawan-kawan pers dan siapapun yang punya akses massa.

Keempat, bagaimanapun juga karena kami sudah terjun dalam kancah partai politik, orang tidak lagi memaklumi hal-hal yang riil. Mereka menuntut bahwa partai ini harus besar. Padahal PK ini baru sama sekali. Tentu saja ini

Universitas Indonesia

merupakan satu masalah sehingga ke depan kami harus melakukan pengkaderan yang masif dan terus-menerus. Targetnya sampai nilai-nilai dakwah menjadi dominan di masyarakat.

Seperti yang sering ia katakan, “Bahkan seandainya Anda tidak masuk ke PK (PK Sejahtera) sekalipun, tapi Anda mendukung, menegakkan dan melaksanakan keadilan, yang itu berarti Anda mengamalkan Islam, maka Anda sesungguhnya sudah menjadi bagian dari kami.” Tapi tentu saja agar nilai-nilai itu bisa semakin luas, maka mau tidak mau yang memperjuangkannya harus semakin banyak.

Kelima, adalah masalah finansial. Bagaimanapun kegiatan partai adalah massal dan harus terprogram secara profesional. Untuk itu kami harus memikirkan bagaimana agar bisa memiliki sumber finansial yang mandiri. Meski begitu sejak awal kami punya keyakinan bahwa aktivitas ini juga adalah aktivitas dakwah yang kewajibannya bersifat individual, sehingga para individu itu juga berkewajiban membiayai dakwah ini.

Perihal kemungkinan kerjasama dengan partai lain, ia mengatakan seperti tergambar dalam gagasan keadilan yang disebutkan Qur'an surat al-Maidah ayat 8, semangat pembelaan kebenaran harus diberlakukan dengan non Islam sekalipun. Maka, katanya, dalam konteks hubungan kami dengan di luar PK Sejahtera, selama mereka bisa sesuai dengan visi PK Sejahtera maka tidak masalah kita bekerjasama.

Begitu pula tentang kemungkinan bergabung dengan sesama partai Islam, ia berpegang pada komitmen bahwa PK Sejahtera adalah partai yang berusaha mengutamakan wihdatul ummah (persatuan ummat). “Makanya kami setuju dengan ide satu partai saja untuk ummat Islam. Tapi pada saat yang sama kita juga harus realistis dalam memandang Islam itu sendiri sebab Islam itu tidaklah menafikan kelompok yang banyak,” ujarnya.

Universitas Indonesia

Sementara, mengenai adanya tadzkirah (peringatan) pada saat Munas bagi para kader PK (PK Sejahtera) supaya tidak larut ketika berinteraksi dengan masyarakat, ia menjelaskan bahwa tadzkirah itu bermanfaat untuk orang mu'min. *Fainnadz dzikra tanfa'ul mu'minin*. Meski begitu, bukan berarti tadzkirah itu terkait dengan keadaan, tapi bisa merupakan tindakan preventif. "Kami sadar PK adalah kumpulan manusia yang tidak selalu benar. Sehingga taushiyah semacam itu tetap kami perlukan. Jangan dikira pendukung PK itu sama semua tingkat keimanannya," katanya.

"Dalam hal ini ada kaidah yang disampaikan Sayid Qutub bahwa generasi Qur'an salah satu cirinya adalah *yakhtalituun walakin yatamaayazuun*, mereka berinteraksi dengan masyarakat tapi mereka tidak larut dengan berbagai kebiasaan buruk masyarakat. Bahkan mereka muncul cemerlang dan berbeda di tengah masyarakat dalam hal sikap dan penampilannya yakni selalu berpegang dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran," jelas pengajar dan pengurus Yayasan Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam Al Haramain ini.

BIOGRAFI RAMA PRATAMA

- Nama Lengkap : Rama Pratama, S. E
- Nama istri : Alin Halimatussadiyah
- Pekerjaan istri : Staf pengajar FE UI
- Jumlah anak : 2
- Nama anak : Muhammad Alaudin Zufar

Muhammad Rahman Fadhil

Pendidikan

1. SDN 05 Pagi Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (1981-1987)
2. SMPN 98 Lenteng Agung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (1987-1990)
3. SMAN 28 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (1990-1993)
4. S1 Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta (1993-1999)

Pengalaman Kerja

1. Senior Auditor Kantor Akuntan Publik Erns & Young, di Gedung BEJ (1999-2002)
2. Konsultan Partner MBS Consulting (perusahaan konsultan keuangan dan manajemen) (2002-2004)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota DPP Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) (1999-2004)
2. Anggota Forum Studi Islam FE Universitas Indonesia Jakarta (1997)
3. Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta (1997-1998)
4. Ketua Umum BEM UI Jakarta (1998)
5. Aktivistis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) Jakarta (1998)
6. Anggota Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Jakarta (1999)

Universitas Indonesia

7. Wakil Ketua Ikatan Alumni (Iluni) FE UI Jakarta (2004)
8. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
9. Anggota Tim Asistensi Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)

Pemikiran Rama Pratama

Rama Pratama mulai dicatat kiprahnya ketika ia menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SM UI) periode 1997 - 1998. Bersama rekan-rekannya dari SM UI dan perguruan tinggi lain mereka menuntut reformasi dengan tuntutan meminta mundur Presiden RI saat itu, Soeharto.

Selain aktivitas di DPR, Rama Pratama kini mengetuai organisasi kepemudaan, GEMA (Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan), yang merupakan organisasi pemuda underbow PK Sejahtera, Ketua DPP KNPI Bidang Hukum dan HAM Periode 2005-2008, Wakil Sekjen IIFSO (International Islamic Federation of Student & Youth Organization) periode 2006-2009. Ia juga menjadi Wakil Ketua ILUNI (Ikatan Lulusan Universitas Indonesia) FEUI untuk periode kepengurusan 2003 - 2006.

Rama Pratama mulai dikenal secara luas ketika menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Indonesia. Meskipun secara resmi masa jabatannya adalah 1997 - 1998, namun pada prakteknya ia menjabat antara 1997 - 1999. Tahun 1998 adalah masa pergolakan, pada tahun itulah dimulainya gerakan reformasi. Karena massifnya demonstrasi-demonstrasi yang diadakan mahasiswa saat itu, agenda suksesi Senat Mahasiswa pun terlupakan, sehingga suksesi Senat Mahasiswa UI baru diadakan kembali pada tahun 1999, dengan menggunakan format yang baru yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Rama merupakan bagian dari garda terdepan dalam demonstrasi-demonstrasi yang menuntut Soeharto untuk mundur sebagai salah satu agenda utamanya.

Rama Pratama kini aktif sebagai anggota legislatif dari fraksi PK Sejahtera. Namun, meski telah menjabat sebagai anggota legislatif, Rama tetap kritis pada pemerintah dan masih menjadi pemerhati gerakan mahasiswa.

Ketika ia dipercaya menjadi anggota legislatif, ia mengatakan bahwa fokusnya adalah memperketat pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengawasan ketat diperlukan agar kebocoran anggaran yang selama ini terjadi bisa dihindari, sehingga APBN bisa lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. "Anggaran kita ini kedodoran karena munculnya praktik mark up sehingga tingkat kebocoran anggaran cukup tinggi," ungkapnya. Secara makro ekonomi, kata Rama, penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan akan menjadi fokus perhatian selanjutnya. Dia akan memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mengatasi persoalan ini. Rama juga menjanjikan untuk memperbaiki materi Undang-undang yang selama ini merugikan masyarakat.

"Untuk mengatasi pengangguran hal yang juga harus diperhatikan adalah perlu adanya UU mengenai sektor riil sehingga sektor ini bisa berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja," ujarnya. Ia meyakini bahwa untuk dapat mencapai kinerja yang baik sebagai anggota legislatif, maka harus dilakukan sinergi dengan elemen-elemen yang memiliki konsep sama dengan yang ia perjuangkan, termasuk di dalamnya gerakan mahasiswa.

Menanggapi soal pergerakan mahasiswa saat ini, Rama mengatakan, pergerakan mahasiswa sekarang memiliki tantangan yang berbeda dengan gerakan mahasiswa 98. Menurutnya, sebuah pergerakan dapat bertahan kalau bisa mencermati perkembangan situasi dan bisa menjawab tantangannya yang ada. Menurutnya, kebanyakan teman-teman mahasiswa sekarang salah menilai dan mengevaluasi kondisi dan situasi setelah 98.

Rama menjelaskan, pada tahun '98, gerakan mahasiswa lebih bersifat politis dan fisik. Wacana tidak diperlukan, karena pada saat itu hanya ada pertarungan rezim dengan mahasiswa. Setelah 98, ujar Rama, masyarakat sempat

Universitas Indonesia

dibuat bingung dengan wacana yang muncul. Sayangnya di tengah situasi seperti itu mahasiswa gagal mendominasi ruang publik, karena mereka cenderung menggunakan metode-metode yang sama seperti tahun '98, padahal tantangannya sudah beda. "Sekarang inilah saatnya pertarungan wacana, bukan lagi pertarungan fisik," jelasnya

Sejak jadi aktifis mahasiswa sampai sekarang, Rama memegang teguh pandangan hidupnya yaitu melakukan semua aktivitas dengan diikuti nilai kebaikan dan amal sholeh. Meski demikian, bukan berarti Rama tidak pernah mengalami batu sandungan dalam hidupnya. "Isu miring itu bukan berarti tidak ada, yang pasti saya akan tetap konsisten dan istiqomah," ujarnya. Lebih lanjut Rama mengatakan, pergerakan mahasiswa pasca 98 mempunyai kepentingan yang berbeda. Dia melihat adanya orientasi keuntungan materi pergerakan itu yang justru merusak mental aktivis. Hal ini tidak hanya berlaku bagi aktivis mahasiswa, namun juga bagi seluruh aktivis yang menginginkan tegaknya nilai-nilai moral kebajikan di tengah bangsa Indonesia.

BIOGRAFI M. ANIS MATTA

Muhammad Anis Matta, Lc (Bone, Sulawesi Selatan, 28 September 1968) adalah salah satu politikus muda Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera.

Ia meraih gelar S1 di bidang Syariah Islam dari LIPIA pada tahun 1992. Pada tahun 2001, ia mengikuti pendidikan di Lemhannas. Kini ia aktif sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera dan Majelis Hikmah PP Muhammadiyah.

Riwayat Pendidikan

1. SD di Welado, Bone.
2. Pesantren Muhammadiyah "Darul Arqam" Gombara, (selesai 1986).
3. S1 di Fakultas Syari'ah, LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab), sebuah lembaga di bawah Universitas Imam Muhammad bin Saud, Saudi Arabia (selesai 1992).
4. Mengikuti Kursus Singkat Angkatan (KSA) IX Lemhannas tahun 1999 dan menjadi peserta terbaik, bahkan ia diminta menjadi staf pengajar pada tahun berikutnya.
5. Mengikuti program Pertukaran Politisi Muda di Amerika atas undangan American Council for Young Political Leader (ACYPL) tahun 2000.

Organisasi

1. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan(PK), tahun 1998-2003.
2. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tahun 2003-sekarang.

Karya Tulis

1. Konsep Seni dalam Islam (tulisan bersama dalam "Ruh Islam dalam Budaya Bangsa"), Festival Istiqlal, Jakarta, 1995.
2. Kumpulan Cerpen Intifadah (terjemah), Jakarta, 1995.

Universitas Indonesia

3. Wawasan Islam dan Ekonomi (tulisan bersama untuk mata kuliah Agama Islam - Ekonomi Islam) pada Program Studi Ekstension FE-UI, 1997.
4. Sepanjang Hari bersama Allah : Seni Berdo'a, 1997
5. Biar Kuncupnya Mekar Menjadi Bunga, 2000, kumpulan tulisan kolom "Ayah" di majalah Ummi
6. Membangun Karakter Muslim, I'tishom, 2002.
7. Model Manusia Muslim: Pesona Abad 21, Asy-Syaamil, 2002.
8. Sebelum Anda Mengambil Keputusan Besar Itu (Kumpulan Ceramah Tentang Pernikahan), Asy-Syaamil, 2003.
9. Menikmati Demokrasi, 2003.
10. Mencari Pahlawan Indonesia, The Tarbawi Center, 2004, kumpulan tulisan kolom "Thumuhath" di majalah Tarbawi.
11. Dari Gerakan Ke Negara, Fitrah Rabbani dan Hidayatullah, 2006, kumpulan tulisan Rubrik Kajian Utama di Majalah Hidayatullah.

Pemikiran Muhammad Anis Matta

Dalam buku Dari Gerakan ke Negara, Anis Matta menyoroti tentang sebuah negara Madinah yang dibangun dari sebuah gerakan selama perjuangan di Mekah. Seperti dalam sejarah kenabian, selama tigabelas tahun di Mekah, Rasulullah Saw melakukan perjuangan yang menekankan pembangunan akidah dalam diri individu maupun masyarakat. Kemudian, gerakan tersebut bermetamorfosis melalui sebuah momentum hijrah ke Madinah yang kelak disinilah akan terbentuk sebuah komunitas muslim yang dibingkai dalam sebuah negara.

Lantas, Anis Matta memotret fenomena kenegaraan Madinah tersebut dalam konteks kekinian. Dalam pandangannya, tidak begitu masalah apakah bentuk negara itu khilafah, kerajaan ataupun negara bangsa, begitu juga dengan sistem pemerintahan, entah monarki, presidensiil atau parlementer walaupun ada kecenderungan pada pilihan khilafah yang mirip dengan konsep global state (negara dunia) seperti yang diimpikan George Bush junior penguasa Amerika, hal ini didasarkan pada alasan peran dan efektifitas. Tapi, yang lebih penting justru

Universitas Indonesia

bukan pada bentuknya, tapi pada fungsinya yaitu sebagai institusi yang mewadahi penerapan syari'at Allah SWT.

Berbicara dalam konteks Indonesia, Anis Mata berpendapat bahwa gerakan-gerakan pemikiran Islam yang dibangun sebagai kekuatan pro sekuler didalam basis-basis pertahanan budaya Islam, baik yang dulu bernama gerakan pembaharuan maupun yang reinkarnasinya kini bernama Islam Liberal atau Islam kiri, tidak pernah sanggup membawa konsep-konsep pemikiran yang orisinal, komprehensif, berlandaskan metodologi yang kokoh dan output empiris yang sukses. Sementara, permasalahan lain dari gerakan sekuler seperti Islam Liberal atau Islam kiri adalah ketergantungan mereka akan dukungan politik, media dan dana dari Barat.

Anis Matta menyebut gerakan semacam itu dengan istilah “pepesan kosong”, doyan bermain retorika, tidak produktif dan lebih berorientasi mengganggu apa yang mereka sebut sebagai gerakan “Islam Fundamentalis”, ketimbang membangun sebuah dunia nyata dari gagasan besar yang lengkap. Di contohkan, misalnya bagaimana tokoh sekularis yang dikagumi kalangan dalam dan luar negeri seperti Gus Dur, membangun pepesan kosongnya selama duapuluh tahun untuk kemudian menduduki kursi presiden selama 21 bulan.

Anis Matta mengajak kaum muda untuk bangkit kembali. Anak-anak muda yang telah berhasil menumbangkan rejim orde baru tidak boleh berhenti untuk berkiprah. Ajakan ini sekaligus menjadi motivasi yang besar bagi generasi muda kini untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, yang dalam istilahnya untuk “Menata ulang Taman Indonesia”. Buku ini secara garis besar memberikan peta bagi generasi muda kini untuk melakukan kiprah dan tugas intelektualnya dalam konteks kenegaraan. Jadi, bagi siapapun yang tertarik untuk mendapatkan pencerahan tentang bagaimana kita melangkah menata negeri ini, buku ini perlu dibaca. Setidaknya, bisa memberikan alternatif pemikiran bagi gerakan untuk perubahan kedepan menuju kondisi yang lebih baik.

Menurut Anis Matta, majunya kader PKS ke arah kepemimpinan nasional, bukanlah merupakan konsekuensi dari kemenangan dalam pemilu.

Universitas Indonesia

Bukan karena menang pemilu maka kader PKS memimpin; namun menjadi pemimpin adalah *leverage to lead*. *Leverage to lead* menyangkut syarat-syarat kepemimpinan yang dituntut kepada para kader PKS, atau kualitas-kualitas yang diperlukan jika ingin memimpin negara. Dengan kata lain, kader PKS harus memimpin karena kemampuan yang dimilikinya.

Dalam pemahaman Anis Matta, keinginan kader PKS untuk memimpin karena fungsi besar yang mereka emban, yaitu merekonstruksi kembali kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan instrumen yang bernama kekuasaan negara. Negara dibutuhkan karena untuk menjalankan fungsi besar tersebut, dibutuhkan institusi, negara sendiri merupakan institusi/organisasi yang paling besar dalam kurun 500 tahun terakhir. Kepemimpinan merupakan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengelola instrumen besar tersebut.

Menurut Anis Matta, ukuran hakiki kesuksesan memimpin bangsa ini adalah seberapa banyak orang menjadi beraga dengan semua kesejahteraan yang dikejar sebelumnya, kesejahteraan yang didapat dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Cita-cita yang diusung sebenarnya ada tiga: satu politik, yang kedua dakwah dan yang ketiga peradaban. Menurut Anis, cara agar PKS dapat memimpin, yaitu harus memiliki *share* yang besar pada tiga panggung utama; *state*, *civil society* dan *market*.

Dalam pandangan Anis Matta, kapasitas pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah *naratif intelijen*, kemampuan menguasai orang melalui kata. Kapasitas *leadership* yang kedua yaitu kapasitas eksekusi, yang ditentukan oleh dua faktor, yaitu orang dan uang (SDM dan modal). Dengan bahasa lain, diperlukan adanya *social capital*, *financial capital* dan *political capital*.